

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Syeldila Sandy

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang
e-mail: syeldilasandy@gmail.com

Niki Lukviarman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang
e-mail: lukviarman@gmail.com

Abstract

The purpose of the study was to investigate the effect of corporate governance on tax avoidance. The secondary data for the study were collected from manufacturing companies that listed in Indonesian Stock Exchange in the period of 2011-2013 by using purposive sampling technique. In order to test hypotheses, the study performed multiple regression analysis. The results indicated that proportion of independent commissioner, audit quality, and audit committee had a negative and significant affect on tax avoidance, while institutional ownership was not consider as a determinant of tax avoidance in Indonesian manufacturing firms.

Keywords: Corporate Governance and Tax Avoidance.

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance pada penghindaran pajak. Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2013 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini dilakukan analisis regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.

Kata kunci: Corporate Governance dan Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia di biayai dari penerimaan pajak. Berdasarkan data sekunder tahun 2011-2013 ditemukan rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN adalah 69,38%, kontribusi penerimaan non-pajak adalah 30,38%, hibah sebesar 0,24% (www.fiskal.depkeu.go.id). Fakta yang ditemukan selama tahun 2011-2013 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan

bahkan mengalami penurunan secara terus menerus. Kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak.

Tax avoidance merupakan segala sesuatu yang dilakukan perusahaan yang berakibat pada pengurangan terhadap pajak perusahaan (Dyreg, Hanlon, dan Maydew 2008). Motif perusahaan pada praktek ini adalah upaya memperbesar keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham, dan pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala 2006). Praktek penghindaran pajak membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik untuk tujuan keuntungan

jangka pendek yang kemungkinan besar akan merugikan pemegang saham dalam jangka panjang (Minnick dan Noga 2010). *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong et al. 2013).

Lukviarman (2006) menjelaskan CG adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar (*doing the right things right*). Manusia itu bersifat oportunistik, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar (Lukviarman 2006).

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah menjadi perhatian para peneliti dalam satu dekade terakhir (Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013; Armstrong et al. 2013; Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012). Namun literatur terdahulu menunjukkan pandangan yang berbeda-beda terkait faktor determinan *tax avoidance*. Ketidak konsistenan tersebut cenderung disebabkan oleh masih lemahnya konsep dan pengukuran *tax avoidance* serta tidak relevannya dalam praktek (Desai dan Dharmapala 2006). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model yang parsimoni sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan oleh praktisi secara sederhana.

Disisi lain, CG telah teridentifikasi sebagai variabel penting yang menjelaskan variasi *tax avoidance* (James dan Igbeng 2014; Armstrong et al. 2013). Namun hasil penelitian empiris menunjukkan hubungan antara CG dan *tax avoidance* masih belum konklusif. Beberapa peneliti terdahulu menemukan variabel CG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012; Kurniasih dan Sari 2013; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Prakosa 2014), sementara para peneliti lain menemukan bahwa CG memiliki dampak yang negatif dan signifikan

terhadap *tax avoidance* (Armstrong et al. 2013; Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Darmawan dan Sukartha 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013).

Hal yang menarik untuk dipahami bahwa kebanyakan penelitian empiris tentang hubungan antara CG dan *tax avoidance* didominasi pada negara-negara maju (Desai dan Dharmapala 2006; Minnick dan Noga 2010; James dan Igbeng 2014; Fernandes, Martinez, dan Nossa 2013; Armstrong et al. 2013; Khoala 2013; Rego dan Wilson 2008; Sabli dan Noor 2012), sementara di negara berkembang khususnya Indonesia masih sangat terbatas. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh CG terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew 2008). Menurut Shafer dan Simmons (2006) *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat disimpulkan *tax avoidance* adalah tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Corporate Governance

Good Corporate Governance di definisikan sebagai *The blend of law, regulation and*

appropriate voluntary private sector practices, Which enable a corporation to attract financial and human capital, perform efficiently and thereby perpetuate it self by generating long term economic value for its shareholders and society of the whole (Wardani 2008).

Lukviarman (2006) mendefinisikan CG adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). CG memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi CG harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar. sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Prinsip CG di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-16/MMBU/2012 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu: (1) *Transparency*, (2) *Accountability* (3) *Responsibility*, (4) *Independency*, dan (5) *Fairness*.

Kehadiran CG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. Mekanisme CG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian empiris, para peneliti terdahulu melakukan pengukuran CG dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) variabel yaitu kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

Kepemilikan Institutional

Kepemilikan Institutional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Kepemilikan saham institusional adalah prosentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan

blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial. Terdapat beberapa kelebihan Kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepemilikan Institutional dapat diukur dengan cara jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang beredar (Khurana dan Moser 2009; Annisa dan Kurniasih 2012). Investor institusi yang dimaksud adalah perusahaan lain yang memiliki saham pada korporasi tertentu dimana indikatornya adalah persentase saham yang dimiliki investor institusi tersebut dibandingkan dengan jumlah saham korporasi yang beredar.

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasehat pada direksi (UU PT No. 40 Tahun 2007). Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan 2008). Jumlah Komisaris Independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu Komisaris Independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengukuran variabel proporsi Komisaris

Independen dapat dilakukan dengan cara perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah Dewan Komisaris (Siallagan dan Machfoedz 2006; Mayangsari 2003).

Kualitas Audit

Dalam penerapan CG, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting. Menurut Sartori (2010), transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Laporan keuangan memiliki peranan yang penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya atau tidak. KAP *The Big Four* adalah *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan *go public* (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan *private* besar lainnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Sebab Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan Kualitas Audit yang tinggi pula.

Kualitas Audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk

dalam KAP *The Big Four* atau tidak (Setiana dan Setyowati 2014). Variabel ini diukur dengan variable dummy, angka dua untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *Big Four* angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *non The Big Four*.

Komite Audit

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance* (GCG). Menurut Daniri (2006), sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2000, Komite Audit telah menjadi komponen umum dalam struktur CG perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh Komisaris Independen.

Pohan (2008) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Pengembangan Hipotesis

Kepemilikan Institutional dan *Tax Avoidance*

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh *investor* institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institutional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institutional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term Shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*longterm shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak.

H1: Kepemilikan Institutional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Proporsi Komisaris Independen dan *Tax Avoidance*

Dari perspektif teori agensi, anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari Komisaris Independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham. Sebaliknya, semakin besar Proporsi Komisaris Independen, maka akan dapat meningkatkan

kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Sedangkan dari perspektif *stakeholder*, keberadaan Komisaris Independen dalam perusahaan merupakan strategi *stakeholder* untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi *stakeholder*. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Timothy 2010; Lanis dan Richardson 2011; Setiana dan Setyowati 2014; Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014).

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Kualitas Audit dan *Tax Avoidance*

Dalam implementasi CG, Kualitas Audit dengan pengungkapan yang transparan (*transparency*) menjadi salah satu elemen yang penting. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi dalam hal pajak kepada pemegang saham semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori 2010).

Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Perusahaan yang memilih menggunakan jasa auditor yang berkualitas dapat menjamin informasi keuangan yang dilaporkan kepada investor. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak.

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan akan semakin sulit melakukan kebijakan penghindaran pajak. Dengan demikian, apabila semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu 2009). Secara empiris, para peneliti terdahulu telah

membuktikan bahwa Kualitas Audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014).

H3: Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komite Audit terhadap Tax

Avoidance

Komite Audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008). Komite Audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari 2003).

Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan Kurniasih 2012).

H4: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013. Teknik penarikan sampel (*sampling technique*) yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu metode penarikan sampel berdasarkan

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sekaran and Bougie 2010). Adapun kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: (1) Perusahaan memuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember periode 2011-2013; (2) Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang Rupiah. Penggunaan satuan mata uang selain Rupiah, meskipun dapat dikonversi, dapat menimbulkan perbedaan akibat kurs yang terus berubah; (3) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami rugi periode 2011-2013; (4) Perusahaan yang memiliki data mengenai Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan informasi KAP yang mengaudit perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan manufaktur dari tahun 2011 sampai 2013. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

Definisi dan Operasional Variabel

***Tax Avoidance* (TA)**

Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Variabel ini di proksikan dengan menggunakan rumus Tarif Pajak Efektif (*ETR*). Tarif pajak efektif digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perbedaan laba buku dan laba fiskal. Tarif Pajak Efektif (*ETR*) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Kepemilikan Institutional (KI)

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini Kepemilikan Institutional diukur menggunakan presentase (Khurana and Moser 2009). Kepemilikan Institutional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang diterbitkan}}$$

Proporsi Komisaris Independen (PKI)

Keberadaan variabel Proporsi Komisaris Independen yang menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktifitas monitoring diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Siallagan dan Machfoedz 2006). Dalam penelitian ini variabel Proporsi Komisaris Independen diproksikan dengan persentase keberadaan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan (Siallagan dan Machfoedz 2006; Mayangsari 2003). Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$PKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Kualitas Audit (KualAudit)

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar atau kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *The Big Four*, maka akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Kurniasih dan Sari 2013). Dalam penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young-E&Y* akan diberi nilai 2, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1.

Komite Audit (KomAudit)

Kehadiran Komite Audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Mayangsari 2003). Dalam penelitian ini Komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate govenance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

Teknik Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Tujuan menggunakan uji asumsi klasik adalah untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan analisis regresi yang terdiri dari: (1) Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable-varibel yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. pedoman yang dipakai untuk uji normalitas adalah uji *Kolmogorov Smirnov*, dimana kriteria uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan (\square 0,05) maka residual terdistribusi tidak normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan (\square 0,05) maka disimpulkan residual terdistribusi normal; (2) Uji Linearitas, bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Untuk menentukan apakah fungsi persamaan regresi yang digunakan berbentuk liner dapat dilihat dari nilai signifikan. Bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti persamaan regresi yang digunakan berbentuk linear dan sebaliknya; (3) Uji Multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas. Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolonearitas; (4) Uji Autokolerasi, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu.

Metode yang digunakan adalah *Durbin Watson* (DW) dengan kriteria pengujiannya sebagai berikut: (a) Angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif, (b) Angka DW diantara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi, dan (c) Angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi *negative*.

Multiple Regression Analysis

Tujuan menggunakan *multiple regression analysis* dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel CG terhadap *tax avoidance* dengan persamaan sebagai berikut:

$$\log TA = a - b_1 \log KI - b_2 \log PDKI - b_3 \text{KualAudit} - b_4 \text{KomAudit} + e \quad (1)$$

Keterangan:

- logTA = log *Tax Avoidance*
- a = Konstanta
- b1-4 = Koefisien regresi
- KI = Kepemilikan Institutional
- PKI = Proporsi Komisaris Independen
- KualAudit= Kualitas Audit
- KomAudit= Komite Audit

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti yaitu *tax avoidance* (TA) dan variabel *corporate governance* (CG).

Untuk menginterpretasikan implementasi CG maka skor *range* (1,17) dibagi dengan 5 untuk menentukan interval masing-masing kategori yaitu Sangat Baik (1,4864 s/d 1,7204), Baik (1,2523 s/d 1,4863), Cukup Baik (1,0182 s/d 1,2522), Kurang Baik (0,7841 s/d 1,0181), dan Tidak Baik (0,5500 s/d 0,7840). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa skor rata-rata (mean) variabel CG adalah 1,0007.

Temuan ini memberikan makna bahwa implementasi CG pada perusahaan sampel terpilih masuk kedalam kategori kurang baik.

Berdasarkan variabel CG, skor rata-rata variabel Kepemilikan Institutional (KI) adalah 0,6681 yang bermakna bahwa rata-rata saham yang dimiliki oleh institusi adalah 66,81% dari jumlah saham yang beredar atau diterbitkan. Dari sisi variabel Proporsi Komisaris Independen (PKI) masih ditemukan adanya perusahaan sampel terpilih yang belum memenuhi ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris adalah Komisaris Independen yang ditunjukkan nilai minimal 0,2500 atau 25%. Skor rata-rata variabel Kualitas Audit (KualAudit) ditemukan sebesar 1,49 dimana dari 150 data yang diamati terdapat sebanyak 77 data observasi (51,3%) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four yaitu Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y, dan sebanyak 73 data observasi (48,7%) diaudit oleh Non-Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Four. Variabel Komite Audit (KomAudit) skor rata-rata diperoleh sebesar 3,13 dengan skor minimum 2 dan maksimum 5. Hal ini bermakna bahwa masih ditemukan (4,7%) data observasi yang belum memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good corporate govenance jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang yang ditunjukkan dengan nilai minimal 2. Sementara skor rata-rata variabel *tax avoidance* (TA) diperoleh sebesar 0,2789 yang bermakna bahwa tingkat perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sampel terpilih sebesar 27,89%.

Tabel 1: Deskripsi Variabel Penelitian (N=150)

No	Variabel	Mean	Median	Range	Min	Max
1	Corporate Governance	1,0007	1,0658	1,17	0,55	1,72
	a. Kepemilikan Institutional	0,6681	0,6275	0,5905	0,3711	0,9616
	b. Proporsi Komisaris Independen	0,3808	0,3333	0,5500	0,2500	0,8000
	c. Kualitas Audit	1,49	1,00	1	1	2
	d. Komite Audit	3,13	3,00	3	2	5
2	Tax Avoidance	0,2798	0,2534	0,8695	0,0412	0,9107

Sumber: Data yang diolah, 2015

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi kalsik bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan analisis regresi. Persyaratan tersebut terdiri dari uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel yang diteliti terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Asymp Sig adalah 0,460. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak.

Untuk menentukan apakah fungsi persamaan regresi yang digunakan berbentuk liner dapat dilihat dari nilai signifikan. Hasil uji linearitas disajikan dalam Tabel 3.

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua variabel CG (KI, PKI, Kualitas Audit, dan Komite Audit) memiliki hubungan linear dengan tax avoidance. Hal ini dapat dibuktikan dimana semua nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

			Standardized Residual
N			150
Normal Parameters	a,b	Mean	0
		Std. Deviation	0.9830783
Most Extreme Differences		Absolute	0.07
		Positive	0.059
		Negative	-0.07
Kolmogorov-Smirnov Z			0.853
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.46

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah, 2015

Tabel 3: Hasil Uji Linearitas

No	Arah Hubungan	Cut-Off	Signifikan	Keterangan
1	KI terhadap TA	0,05	0,002	Linear
2	PKI terhadap TA	0,05	0,000	Linear
3	KualAudit terhadap TA	0,05	0,000	Linear
4	KomAudit terhadap TA	0,05	0,000	Linear

Sumber: Data yang diolah, 2015

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel Bebas	Tolerance	Cut-Off	VIF	Cut-Off	Keterangan
1	KI	0,911	0,10	1,098	10	Bebas Multikol
2	PKI	0,892	0,10	1,122	10	Bebas Multikol
3	KualAudit	0,841	0,10	1,189	10	Bebas Multikol
4	KomAudit	0,851	0,10	1,175	10	Bebas Multikol

Sumber: Data yang diolah, 2015

Tabel 5: Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 ^a	.471	.456	.13435	1.390

a. Predictors: (Constant), KomAudit, LogKI, LogPKI, KualAudit

b. Dependent Variable: LogTA

Sumber: Data yang diolah, 2015

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu KI, PKI, KualAudit, dan KomAudit memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat diartikan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antar sesama variabel bebas. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah Durbin Watson (DW). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 5.

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson (DW) adalah 1,390 yang berarti terletak antara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada autokorelasi atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu.

Multiple Regression Analysis

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 6 di bawah dapat dikemukakan persamaan sebagai berikut:

$$\log TA = 0,350 - 0,220X1 - 0,598\log X2 - 0,086X3 - 0,132X4 + e$$

Koefisien regresi variabel log Kepemilikan Institutional (X1) ditemukan sebesar -0,220 dan signifikan 0,052 (lebih besar dari 0,05). Temuan ini dapat diartikan bahwa variabel Kepemilikan Institutional (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), sehingga H1 tidak dapat diterima atau ditolak. Koefisien regresi variabel log Proporsi Komisaris Independen (X2) ditemukan sebesar -0,598 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05), sehingga H2 yang menyatakan “Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*” dapat diterima.

Koefisien regresi variabel Kualitas Audit (X3) ditemukan sebesar -0,086 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Temuan ini dapat diartikan bahwa variabel Kualitas Audit (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), sehingga H3 dapat diterima. Koefisien regresi variabel Komite Audit (X4) ditemukan sebesar -0,132 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Temuan ini dapat diartikan bahwa variabel Komite Audit (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y), sehingga H4 dapat diterima.

Tabel 6: Hasil *Multiple Regression Analysis*

Variabel	Tax Avoidance (Y)		Keputusan
	β	Sig.	
Konstanta (a)	0,350	0,000	-
LogKI (X1)	-0,220	0,052	H1 Ditolak
LogPKI (X2)	-0,598	0,000	H2 Diterima
KualAudit (X3)	-0,086	0,000	H3 Diterima
KomAudit (X4)	-0,132	0,000	H4 Diterima
F Statistics	32,225	0,000	-
R2	0,471		-

Sumber: Data yang diolah, 2015

Nilai F statistik ditemukan sebesar 32,225 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Temuan ini dapat diartikan bahwa model penelitian tentang pengaruh variabel CG (Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit) terhadap *tax avoidance* dinyatakan layak. Sementara nilai R² (R square) diperoleh sebesar 0,471 yang bermakna bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh variabel CG (Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit) terhadap *tax avoidance* adalah 47,1%.

Pembahasan

Hasil analisis deskriptif menemukan bahwa rata-rata tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sampel terpilih adalah 27,98% dimana tingkat penghindaran pajak terendah adalah 4,12% dan tertinggi adalah 91,07%. Rata-rata saham yang dimiliki oleh institusi adalah 66,81% dari jumlah saham yang beredar atau diterbitkan dimana kepemilikan saham institusi minimum 37,11% dan maksimum 96,16%. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diperoleh koefisien regresi variabel Kepemilikan Institutional (X1) sebesar -0,220 dan signifikan 0,052. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institutional (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel Kepemilikan Institutional. Dengan kata lain tinggi atau rendahnya persentase saham yang dimiliki institusi dibandingkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau saham beredar tidak akan memberikan dampak yang berarti terhadap perilaku penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014; Annisa dan Kurniasih 2012) dimana variabel Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rata-rata jumlah komisaris independen pada perusahaan sampel terpilih adalah 38,08% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris. Walaupun demikian, masih ditemukan pada perusahaan sampel terpilih yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh BEI yaitu jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor minimal 0,2500 pada variabel Proporsi Komisaris Independen (X2). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diperoleh koefisien regresi variabel Proporsi Komisaris Independen (X2) sebesar -0,598 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh variasi variabel Proporsi Komisaris Independen. Dengan kata lain, apabila semakin besar Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin kecil Proporsi Komisaris Independen maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Timothy 2010; Lanis dan Richardson 2011; Setiana dan Setyowati 2014; Maharani dan Suardana 2014; Prakosa 2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut menemukan bahwa variabel Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Skor rata-rata variabel Kualitas Audit (X3) ditemukan sebesar 1,49 dimana dari 150 data yang diamati terdapat sebanyak 77 data observasi (51,3%) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young-E&Y*, dan sebanyak 73 data observasi (48,7%) diaudit oleh Non-Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diperoleh koefisien regresi variabel Kualitas Audit (X3)

sebesar -0,086 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Audit (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y).

Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh Kualitas Audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Annisa & Kurniasih, 2012; Maharani & Suardana, 2014; Dewi & Jati, 2014) dimana penelitian terdahulu tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Skor rata-rata variabel Komite Audit (X4) sebesar 3,13 dimana dari 150 data observasi masih ditemukan sebanyak 4,7% data observasi yang belum memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* yaitu jumlah anggota Komite Audit minimal 3 orang. Selanjutnya hasil analisis deskriptif menemukan sebanyak 81,3% memiliki jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 orang, 10% memiliki jumlah anggota Komite Audit 4 orang, dan 4% memiliki jumlah anggota Komite Audit 5 orang. Temuan ini memberikan makna bahwa sebanyak 95,3% data observasi telah memiliki jumlah anggota Komite Audit 3 orang atau lebih. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diperoleh koefisien regresi variabel Komite Audit (X4) sebesar -0,132 dan signifikan 0,000 dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Komite Audit (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Y). Temuan penelitian ini bermakna bahwa tinggi

atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ditentukan oleh Komite Audit. Dengan kata lain, apabila semakin banyak jumlah anggota Komite Audit maka akan semakin rendah *tax avoidance*. Namun sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota Komite Audit maka akan semakin tinggi *tax avoidance*. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu (Maharani dan Suardana 2014; Dewi dan Jati 2014) dimana para peneliti terdahulu tersebut membuktikan secara empiris bahwa variabel Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut: (1) Kepemilikan Institutional (KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*; (2) Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*; (3) Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dan; (4) Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Limitations and Directions for Future Research

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut: (1) Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013 dan hanya membatasi pada tiga sektor yaitu industri & kimia (Porselin, Kertas, Kimia, Logam Pakan Ternak, Plastik, Semen), aneka industri (Alas Kaki, Kabel, Otomotif, Tekstil & Garmen), dan barang konsumsi (Farmasi, Kosmetik, Makanan & Minuman, Peralatan RT, Rokok); (2) Penelitian ini hanya mengkonsepkan CG berdasarkan Kepemilikan Institutional, Proporsi Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit sebagai determinan *tax avoidance*.

Berpedoman kepada beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan

diatas, maka penulis memberikan saran-saran bagi peneliti yang akan datang sebagai berikut: (1) Peneliti yang akan datang dapat mereplikasi model penelitian ini dan selanjutnya mengujikan pada industri lainnya seperti pertambangan (*mining*), agrikultur (*agriculture*), dan jasa (*service*); (2) Peneliti yang akan datang dapat mempertimbangkan variabel lain dalam konsep CG seperti variabel *managerial incentives*, karakteristik eksekutif (resiko perusahaan), kepemilikan keluarga dan lain lain.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, N.A., dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8 (2): 95–189.
- Armstrong, C.S., J.L. Blouin, A.D. Jagolinzer, dan D.F. Larcker. 2013. *Corporate Governance, incentives, and tax avoidance*. Rock Center for Corporate Governance Stanford University, Working Paper Series No. 136. Diakses dari <http://ssrn.com/abstract=2252682>.
- Chai, H., dan Q. Liu. 2009. Competition and corporate tax avoidance: Evidence from Chinese industrial firms. *Economic Journal* 119 (537): 764–795.
- Daniri, M. A. 2006. *Good Corporate Governance: Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. eds kedua. Jakarta: PT. Ray Indonesia.
- Darmawan, I. G. H., dan I. M. Sukartha. 2014. Pengaruh penerapan Corporate Governance, Leverage, ROA dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi* 9 (1): 143–161.
- Desai, M.A., dan D. Dharmapala. 2006. Corporate tax avoidance and high powered incentives.” *Journal of Financial Economics* 79 (1): 145–179.
- Dewi, N.N., dan I.K. Jati. 2014. Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi* 6 (2): 249–260.
- Dyreg, S., M. Hanlon, dan E. L. Maydew. 2008. Long-run corporate tax avoidance. *The Accounting Review* 83 (2): 61–82.
- Fernandes, V.L., A.L. Martinez, dan V. Nossa. 2013. The Influence of the best Corporate Governance practices on the allocation of value added to taxes: A Brazilian case contabilidade, gestão e governança. *Brasilia* 16 (3).
- James, O.K., dan E.I. Igbeng. 2014. Corporate Governance, shareholders wealth maximization and tax avoidance. *Research Journal of Finance and Accounting* 5 (2): 127–130.
- Kementerian BUMN, 2012. *Keputusan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*.
- Khoala, A. 2013. Does Corporate Governance affect tax planning? Evidence from American companies. *International Journal of Advanced Research* 1 (10): 864–873.
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. Diakses dari www.ssrn.com.
- Kurniasih, T., dan M. Sari. 2013. Pengaruh ROA, leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 1–84.
- Lanis, R., dan G. Richardson. 2011. The Effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting & Public Policy* 30 (1): 50–70.

- Lukviarman, N. 2006. Etika bisnis tidak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam Corporate Governance? *Jurnal Siasat Bisnis* 9 (2): 139–156.
- Maharani, I.G., dan K.A. Suardana. 2014. Pengaruh Corporate Governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 9 (2): 525 –539.
- Mayangsari, S. 2003. Analisis pengaruh independensi, kualitas audit, serta mekanisme Corporate Governance terhadap integritas laporan keuangan. Surabaya: Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Minnick, K., dan T. Noga. 2010. Do Corporate Governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance* 16 (5): 703–718.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Prakosa, K. B. 2014. Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan Corporate Governance terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Mataram: Simposium Nasional Akuntansi XVII.
- Rego, S.O., dan R. Wilson. 2008. Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness, and Future Firm Performance. Diakses dari [http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/TaxCenter/taxsym09/Documents/Rego and%20Wilson_2008.pdf](http://areas.kenan-flagler.unc.edu/Accounting/TaxCenter/taxsym09/Documents/Rego_and%20Wilson_2008.pdf).
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Sabli, N., dan R.M. Noor. 2012. Tax planning and Corporate Governance. In *The 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding*.
- Sartori, N. 2010. Effect of strategic tax behavior on Corporate Governance. www.ssrn.com.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2010. *Research Methods for Business. A Skill Building Approach*. John Wiley and Sons, Ltd.
- Setiana, D., dan W. Setyowati. 2014. Pengaruh Corporate Governance, kompensasi rugi fiskal, ROA, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Journal Accounting and Banking* 3 (2).
- Shafer, W., dan R. Simmons. 2006. Social responsibility, machiavellianism and tax avoidance: A Study of Hong Kong tax professionals. Working Paper No.5.
- Siallagan, H., dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme Corporate Governance, Kualitas laba dan nilai perusahaan. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Solomon, J. 2007. *Corporate Governance and accountability*. 2nd ed. The Atrium, West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
- Tarjo. 2008. Pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham serta cost of equity capital. Pontianak: Simposium Nasioanal Akuntansi XI.
- Timothy, Y. C. K. 2010. Effects of Corporate Governance on tax avoidance. Hong Kong Baptist University. Diakses dari www.lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf.
- Tuanakotta, T. M. 2007. *Setengah abad profesi akuntansi*. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Wardani, D. K. 2008. Pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP ASIMETRI INFORMASI

Ana Pratiwi

Universitas Brawijaya
e-mail: anapratwie@gmail.com

Nurkholis

Universitas Brawijaya
e-mail: hnurkholis_ub@yahoo.com

Abdul Ghofar

Universitas Brawijaya
e-mail: abdulghofar@yahoo.com

Abstract

This research aims to test the effect of corporate governance and ownership structure on information asymmetry. Corporate governance is proxied by the ASEAN corporate governance scorecard, and ownership structure is proxied by institutional ownership and managerial ownership. This research adds control variables such as company size, trading volume, and variant return. The population of this research is companies that have score from ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2010-2011. Research samples are determined by purposive sampling method and there are 120 companies fulfill the research criteria. Analysis method used in this research is Multiple Regression Analysis. The findings show that the corporate governance and institutional ownership have no impact on the asymmetric information. On the contrary, managerial ownership has negative and significant affect on the asymmetric information. It is also found that the control variables, the size and volume of trading companies have no effect on asymmetric information but return variant has negative affect on asymmetric information.

Keywords: *corporate governance, institutional ownership and managerial ownership, asymmetric information.*

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art2>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap asimetri informasi. Corporate governance diproksikan dengan ASEAN Corporate Governance Scorecard sedangkan struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, volume perdagangan, dan varian return. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki skor dari ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2010 dan 2011. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling dan diperoleh 120 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance dan kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Sedangkan kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi. Hasil penelitian dari variabel kontrol ukuran perusahaan dan volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi, sedangkan varian return berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi.

Kata kunci: Corporate governance, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, asimetri informasi.

PENDAHULUAN

Ditinjau dari sudut pandang teori keagenan, asimetri informasi dilatarbelakangi oleh terganggunya proses komunikasi informasi antara *principal* dan manajer. Terganggunya proses komunikasi ini merupakan akibat dari tindakan manajer sebagai pengelola perusahaan yang mengetahui lebih banyak informasi internal ataupun prospek perusahaan, namun tidak memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan kepada *principal* dan *stakeholders* (Ujiyanto dan Pramuka 2007). Tindakan manajer yang cenderung tidak memberikan informasi yang jelas kepada *principal* dilakukan manajer karena manajer cenderung melaporkan dan melakukan tindakan untuk memaksimalkan utilitasnya (Wisnumurti 2010). Arifin dan Rahmawati (2006) mengungkapkan bahwa ketergantungan pihak eksternal terutama pemilik pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk memaksimalkan keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi laporan untuk kepentingan pribadi.

Asimetri informasi antara manajemen dan *principal* dapat memberi peluang bagi manajer dalam melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Contoh kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh manajer karena adanya asimetri informasi yang ada di Indonesia antara lain kasus Bank Century dan kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Indofarma yang *overstated*. Kedua kasus tersebut terjadi karena ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lainnya. Dalam kasus Bank Century, asimetri informasi terjadi saat Robert Tantular melakukan pemecahan deposito milik Sampoerna, yang dilakukan karena mengetahui bahwa Bank Century sedang tidak sehat. Pemecahan deposito tersebut dimaksudkan untuk mendapat penggantian dari LPS, dan mengindikasikan adanya pencucian uang sedangkan dalam kasus PT. Indofarma, pihak manajemen melakukan pengelembungan laba bersih tahunan.

Contoh kasus-kasus tersebut merupakan cerminan adanya ketidakterbukaan informasi serta adanya benturan kepentingan dan keinginan (*conflict of interest*) antara *agent* dan *principal* yang tidak diungkapkan kepada publik secara jelas, terutama kepada para investor. Untuk mengantisipasi terjadinya asimetri informasi, diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalkan tingkat asimetri informasi yang dilakukan oleh *agent* kepada *principal*. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah konsep *corporate governance* yang merupakan sistem, struktur, dan proses yang terintegrasi untuk mewujudkan kelima prinsip utama dari *corporate governance*, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Pelaksanaan *corporate governance* memerlukan adanya struktur yang ideal seperti komisisaris independen, komite audit, direksi, dan komite penunjang lainnya.

Penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Konsep *corporate governance* ini pada intinya menginginkan adanya transparansi yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan yang jika berhasil diterapkan dengan baik akan meningkatkan kinerja dan nilai dari perusahaan. Sistem *corporate governance* akan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham dan kreditor pada investasi yang telah mereka lakukan. Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) menjelaskan bahwa konsep *corporate governance* merupakan kontrol serta prosedur yang memastikan bahwa tindakan yang dilakukan manajemen atau *agent* merupakan tindakan yang mengikuti kepentingan pemilik saham atau *principal*. *Indonesian Institute for Corporate governance* (IICG) mendefinisikan *corporate governance* (CG) sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (www.iicg.org).

Karena asimetri informasi sulit dihindari, *corporate governance* selalu dibutuhkan

baik oleh perusahaan kecil maupun besar, bahkan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek pun perlu menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, *corporate governance* menjadi perhatian yang serius dikarenakan terjadinya kegagalan penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Berbagai pihak diantaranya regulator dan pemegang saham terus menekan agar prinsip-prinsip *good corporate governance* terus ditingkatkan dan diterapkan (Cai et al. 2008). Penelitian tentang *corporate governance* juga terus dikembangkan. Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki nilai penerapan *corporate governance* yang baik akan memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah dalam kurun waktu pengumuman laba triwulan.

Menurut Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dan Crutchley dan Hansen (1989) konflik kepentingan antara manajer dan *agent* juga dapat dikurangi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, dalam hal ini sebagai *monitoring agents*. Disini peningkatan kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kedudukan manajerial dengan pemegang saham, sehingga pihak manajerial akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Peningkatan struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan diharapkan akan membuat manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham, karena manajer secara otomatis akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan struktur kepemilikan juga dapat menjadi pengawas bagi manajemen yang akan berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan kecurangan, sehingga asimetri informasi dapat berkurang.

Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan memberikan implikasi tersajinya informasi yang lebih baik sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Salah satu penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap asimetri informasi dilakukan oleh Kanagaretnam,

Gerald, dan Dennis (2007). Penelitian tersebut menggunakan *bid ask spread* dan *depths* yang merupakan proksi dari penurunan asimetri informasi, sedangkan *corporate governance* diproksikan oleh komisar independen, struktur dewan, dan aktivitas dewan. Untuk analisis *bid ask spread*, Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) menggunakan ukuran perusahaan, volatilitas dan harga saham sebagai variabel kontrol. Sedangkan untuk analisis *depths*, menggunakan saham yang beredar dan volume perdagangan sebagai variabel kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap asimetri informasi di sekitar pengumuman laba triwulanan. Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang berjalan efektif akan meningkatkan kualitas dan frekuensi informasi yang diterbitkan oleh manajemen. Semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh perusahaan, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan. Atau dapat disimpulkan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan *corporate governance* maka semakin rendah pula tingkat asimetri informasi yang terjadi.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) yang meneliti pengaruh struktur *corporate governance* terhadap asimetri informasi dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar NYSE atau AMEX dengan periode penelitian pada bulan Juni dan September tahun 2000. Variabel *corporate governance* yang digunakan meliputi komisar independen, struktur dewan, dan aktivitas dewan.

Penelitian ini memproksikan *Corporate governance* dengan skor ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk Indonesia (indeks *corporate governance*), kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dengan mengambil periode penelitian tahun 2010-2011. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan publik di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN *corporate governance scorecard*, yaitu daftar yang dibuat oleh

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), sebagai *Domestic Body ASEAN corporate governance scorecard* yang telah melakukan penilaian terhadap tata kelola perusahaan terbuka di Indonesia yang didukung oleh *Asian Development Bank* dan kemudian ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melanjutkan penilaian tersebut. Penelitian ini menggunakan data pada periode tahun 2010-2011. Periode dalam penelitian ini terbatas dikarenakan untuk periode 2012 pihak regulator yaitu OJK belum merilis data tersebut. Jadi data periode yang diambil peneliti hanya 2 tahun.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dapat dikurangi dengan penerapan *corporate governance* yang berkualitas dan baik. Penerapan *corporate governance* disini dapat dijadikan struktur, sistem serta proses yang berintegrasi untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, dan adil. *Corporate governance* merupakan perlindungan terhadap investasi yang dilakukan. Sehingga mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Dalam teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) telah diungkapkan bahwa dalam dunia bisnis terjadi fenomena oportunistik dan manusia sebagai individu cenderung untuk memenuhi utilitasnya secara maksimal. Hal ini mengakibatkan adanya distribusi informasi yang tidak merata antara *agent* dan *principal*.

Distribusi informasi yang tidak merata juga disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi tentang perusahaan lebih banyak daripada *principal*. *Agent* disini dapat juga mengetahui prospek tentang perusahaan di masa depan. Kondisi ketimpangan informasi ini juga dapat memberikan peluang kepada *agent* untuk memanipulasi pelaporan untuk memaksimalkan utilitasnya.

Bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* terhadap asimetri informasi diantaranya dinyatakan oleh Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007), yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap asimetri informasi pada perusahaan yang terdaftar di NYSE atau AMEX dengan periode penelitian bulan Juni dan September tahun 2000. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *corporate governance* dan asimetri informasi. Selain itu ada penelitian lain yaitu dari Purwanti (2013) yang membuktikan adanya pengaruh negatif antara *corporate governance* dan asimetri informasi.

Penggunaan variabel penelitian menggunakan ASEAN CG *Scorecard* ini karena perusahaan-perusahaan yang mengikuti pemeringkatan ini mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan penerapan *corporate governance* dengan baik. ASEAN *corporate scorecard* adalah indeks berupa presentase dengan skala 1%-100% yang dikeluarkan oleh IICD yang merupakan *domestic body* dari ASEAN CG *scorecard*. Sedangkan struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang akhirnya berpengaruh terhadap tingkat asimetri informasi.

Perumusan Hipotesis

Dalam penelitiannya, Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang berkualitas akan menurunkan asimetri informasi. Hal ini dikarenakan jika *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan berkualitas, maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan akan transparan. Sehingga dapat dikatakan informasi yang dimiliki oleh investor benar-benar mencerminkan perusahaan tempat mereka berinvestasi.

ASEAN *corporate governance scorecard* adalah indeks berupa presentase dengan yang dikeluarkan oleh IICD yang merupakan *domestic body* dari ASEAN CG *scorecard*. Penilaian *corporate governance* berdasarkan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang beranggotakan para regulator

pasar modal di negara ASEAN. Penilaian ini juga telah digunakan untuk menilai praktek *corporate governance* perusahaan terbuka di negara ASEAN lainnya yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Selanjutnya, Klein, Shapiro, dan Young (2005) menggunakan indeks GMI (*Governance Metrics International*) sebagai proksi untuk *corporate governance*. Penelitian tersebut dilakukan di Kanada yang menunjukkan hasil tidak ada pengaruh yang signifikan, tetapi Klein, Shapiro, dan Young (2005) menyimpulkan bahwa *corporate governance* secara umum dapat mengurangi asimetri informasi.

Dengan adanya pengukuran yang dipublikasikan tentang *corporate governance*, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat. Dengan kata lain, perusahaan yang mempublikasikan indeks pengukuran *corporate governance* dipercaya akan memiliki tingkat asimetri informasi yang lebih kecil. Maka berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dalam penelitian ini disusun hipotesis berikut:

H1: *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi

Konflik kepentingan mendasari adanya biaya keagenan, dengan asumsi rasionalitas ekonomi dimana orang yang akan mendahulukan kepentingannya terlebih dahulu sebelum kepentingan orang lain. Demikian juga dengan manajemen perusahaan. Teori keagenan menyatakan bahwa sulit untuk mempercayai bahwa manajemen akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham. Karena hal tersebut, maka diperlukan pengawasan dari pemegang saham sehingga konflik keagenan yang terjadi dapat dikurangi (Copeland dan Weston 1992).

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan suara suatu institusi terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diproksikan dengan menggunakan presentase kepemilikan saham institusi di perusahaan. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku

oportunistik. Dengan adanya kepemilikan institusional manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Henry (2010); Singh dan Davidson (2003); Knight dan Weir (2009) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *agency conflict*. *Agency conflict* disini akan berpengaruh terhadap tersalurnya asimetri informasi antara manajer dan principal. Selain itu Klein, Shapiro, dan Young (2005) juga menyebutkan bahwa kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat mengurangi adanya asimetri informasi dalam perusahaan.

Di Indonesia, Purwanti (2013) juga melakukan penelitian yang menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap asimetri informasi dan hasilnya tidak terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap asimetri informasi. Perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik (Purwanti, 2013). Dengan pengungkapan yang lebih baik akan meningkatkan transparansi. Transparansi yang baik akan menurunkan tingkat asimetri informasi. Maka berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dalam penelitian ini disusun hipotesis berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Dalam suatu perusahaan, jika didalamnya terdapat kepemilikan manajerial maka informasi yang diberikan kepada publik akan lebih banyak. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik antara *principal* dan *agent* dapat dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan. Menurut Crutchley dan Hansen (1989) dan Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk menyesuaikan kedudukan para manager dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai keinginan pemegang saham. Dengan pening-

katan presentase kepemilikan manajerial, para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Henry (2010); Singh dan Davidson (2003); Knight dan Weir (2009) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *agency conflict*. *Agency conflict* disini akan berpengaruh terhadap tersalurnya asimetri informasi antara *manager* dan *principal*. Semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka akan semakin kecil asimetri informasi dalam perusahaan tersebut.

Dalam penelitiannya, Purwanti (2013) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Semakin tinggi kepemilikan manajerial suatu perusahaan maka tingkat asimetri informasi dalam perusahaan tersebut akan semakin rendah. Kekayaan pribadi manajemen yang terkait dengan nilai perusahaan dalam bentuk saham diharapkan akan membuat manajemen untuk bertindak demi meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat mengurangi konflik keagenan. Konflik keagenan yang berkurang dapat mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Maka berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut maka dalam penelitian ini disusun hipotesis berikut:

H3: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Asimetri informasi

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar dalam ASEAN *corporate scorecard*. Jumlah perusahaan yang memiliki indeks ASEAN CG Scorecard antara tahun 2010-2011 adalah 155 perusahaan.

Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. Penggunaan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini karena sampel yang digunakan diharapkan akan memberikan hasil yang lebih valid dan tidak bias. Kriteria-

kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan yang termasuk dalam ASEAN *corporate governance scorecard* pada tahun 2010-2011. Kelompok perusahaan tersebut adalah hasil survey yang dilakukan oleh *Indonesian Institute of Corporate Directorship (IICD)* yang merupakan *domestic body* dari ASEAN CG Scorecard. (2) Perusahaan yang mempublikasikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) untuk periode 31 Desember 2010-2011. (3) Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam Laporan Tahunannya untuk periode 31 Desember 2010-2011. (4) Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia dalam Laporan Tahunan periode 2010-2011 baik data untuk *corporate governance* dan struktur kepemilikan maupun data untuk asimetri informasi).

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana *agent* memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* (Richardson 1998). Penelitian ini mengukur asimetri informasi dengan menggunakan *bid-ask spread*. Model untuk menyesuaikan perhitungan Asimetri Informasi (Kanagaretnam, Gerald, and Dennis 2007) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Asimetri Informasi} = (\text{Ask}-\text{bid})/\{(\text{Ask}+\text{bid})/2\}$$

Ask adalah Harga permintaan tertinggi saham perusahaan i pada tahun t

Bid adalah Harga penawaran terendah saham perusahaan I pada tahun t

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), yaitu: 1) *Corporate governance*. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ASEAN *corporate governance scorecard*. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* adalah indeks berupa prosentase dengan skala 1%-100% yang dikeluarkan oleh IICD yang merupakan *domestic body* dari ASEAN CG

Scorecard. Penilaian *corporate governance* yang merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang beranggotakan para regulator pasar modal di negara ASEAN (IICD 2014). 2) Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan Manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang ada di perusahaan (Gideon dan Milgrom 1985). Ada atau tidaknya kepemilikan manajerial terhadap suatu perusahaan merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan. Jika manajemen memiliki kekayaan di perusahaan, maka diharapkan manajemen akan bertindak lebih transparan untuk kepentingannya. 3) Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan suara suatu institusi terhadap perusahaan (Beiner et al. 2003). Dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan saham suatu institusi di perusahaan.

Sedangkan variabel Kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: (1) ukuran perusahaan (*size*) yang diukur dengan total asset perusahaan; (2) volume perdagangan yaitu penutupan pasar bulanan yang kemudian dirata-rata dalam satu tahun, dan; (3) varian *return* yang diukur dengan:

$$R = (P_t - P_{t-1}) / (P_{t-1})$$

R = return saham

P_t = harga saham pada bulan ke t

P_{t-1} = harga saham pada bulan t-1

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *corporate governance* dan struktur kepemilikan terhadap asimetri informasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah: 1) Analisis Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk kuantitatif sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai data tersebut dan hubungan antara variabel yang akan digunakan dalam penelitian

(Ghozali 2006). 2) Uji Asumsi Klasik. Untuk mendukung kebenaran interpretasi hasil analisis dengan model regresi maka dilakukan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi meliputi uji normalitas residual yaitu data residual harus normal, non-multikolinearitas, dan homokedastisitas. Namun sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model telah memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimated* (BLUE) (Ghozali 2006). 3) *Multiple Regression Analysis*. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali 2006). Model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$AI = a + b_1 CG + b_2 KI + b_3 KM + b_4 Size + b_5 Vol + b_6 Return + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

b1-b5 = Koefisien Regresi

AI = Asimetri Informasi

CG = *Corporate Governance*

KI = Kepemilikan Institusional

KM = Kepemilikan Manajerial

Size = Ukuran Perusahaan

Vol = Volume Perdagangan

Return = Varian Return saham

e = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang terdiri dari 155 perusahaan yang berpartisipasi dalam *ASEAN corporate governance scorecard* pada periode tahun 2010-2011. Sedangkan perusahaan yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 120 perusahaan. Data menggunakan signifikansi 10% dengan tingkat keyakinan 90%.

Statistik Deskriptif

Untuk memberi gambaran atau deskripsi data dalam penelitian ini dilakukan analisis data deskriptif seperti tampak pada tabel 1.

Tabel 1: Statistik Deskriptif

	Maksimum	Minimum	Rerata	Standar Deviasi	N
Asimetri Informasi (Y)	2,0663	1.6185	1,86757	0,069907	120
Corporate governance (X1)	89,26%	20,81%	54,1393%	20,11374%	120
Kepemilikan Institusional (X2)	75,55%	0%	27.1451%	14,54533%	120
Kepemilikan Manajerial (X3)	7,93%	0%	0,3772%	1,16174%	120
Size (X4)	8,40	5,44	7,0859	0,57198	120
Volume Perdagangan (X5)	9,22	4,02	7,7829	0,94157	120
Varian Return (X6)	1,7368	-0,8249	0,2279	0,53819	120

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 1 diatas dapat memberikan sejumlah informasi, antara lain bahwa N atau jumlah total observasi pada setiap variabel yaitu 138 perusahaan dengan periode pengamatan 2010-2011, namun dikarenakan adanya data outlier maka data tersebut di-buang sehingga diperoleh jumlah observasi 120 perusahaan. Asimetri informasi disini diukur dengan *bid ask spread* yaitu dengan harga saham harian. Rata-rata asimetri informasi dalam perusahaan sampel adalah 1,86757 sedangkan standar deviasinya sebesar 0,069907. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata menunjukkan variasi yang kecil antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan, atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari asimetri informasi dalam perusahaan sampel.

Corporate governance diukur dengan indeks ASEAN CG Scorecard yang dikeluarkan oleh IICD yang merupakan *domestic body* dari penilaian *corporate governance* yang merupakan inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang beranggotakan para regulator dari negara-negara di ASEAN. Rata-rata nilai *corporate governance* adalah 54,1393% sedangkan standar deviasinya 20,1137%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi yang kecil antara nilai maksimum dan minimum selama periode pengamatan atau dengan kata lain tidak ada kesenjangan yang cukup besar dari nilai *corporate governance*. Data maksimum dan minimum adalah 89,26% dan 20,81%.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan suara yang dimiliki oleh suatu institusi terhadap suatu perusahaan. Nilai rata-rata kepemilikan institusional dalam penelitian ini

adalah 27,1451% sedangkan standar deviasinya adalah 14,54532%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi yang kecil antara nilai maksimum dan minimum atau dengan kata lain tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari kepemilikan institusional.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan suara yang dimiliki oleh pihak manajer dalam perusahaan. Nilai rata-rata kepemilikan manajerial dalam penelitian ini adalah 0,3772% sedangkan standar deviasinya adalah 1,1617%. Nilai standar deviasi lebih besar daripada rata-rata menunjukkan bahwa tingginya nilai variasi antara nilai maksimum dan minimum dalam penelitian, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan yang cukup besar dari kepemilikan manajerial.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai yang lebih besar daripada 0,05, yaitu 1,32 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normal telah dipenuhi sehingga model regresi ini layak digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan VIF variabel di bawah 10, yang menunjukkan bahwa dalam persamaan ini tidak terjadi multikolinearitas antar variable, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam persamaan regresi.

Uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik *scatterplot*, hasilnya menunjukkan

penyebaran titik-titik yang tidak mempunyai pola yang jelas, serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan ini, sehingga persamaan regresi ini layak dipakai untuk penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) untuk membuktikan hipotesis yang dibuat. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 90%, jadi tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah sebesar 10%. Sehingga jika nilai signifikansi kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Dari hasil perhitungan, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$AI = 1,842 - 6,374E-005 CG + 0,001 KI - 0,010 KM + 0,007 Size - 0,003 Vol - 0,033 Return + e$$

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini dihasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,09. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 9% variasi dari asimetri informasi dapat dijelaskan dengan keenam

variabel independen dan variabel kontrol yaitu *corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, volume perdagangan, dan varian return. Sedangkan sisanya yaitu 91% dijelaskan oleh variabel lain atau sebab-sebab yang lain yang berada diluar model. Dari hasil perhitungan regresi yang dilakukan juga didapatkan hasil konstanta sebesar 1,842 hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap konstan maka variabel asimetri informasi sebesar 1,842.

Pengujian hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi dengan nilai signifikansi sebesar 0,848 (lebih besar dari α yaitu 0,10). Dengan demikian hipotesis pertama ditolak. koefisien regresi dari *corporate governance* ini adalah -6,374E-005. Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap asimetri informasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Klein, Shapiro, dan Young (2005). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam, Gerald, dan Dennis (2007) yang menyatakan bahwa *corporate governance* yang berkualitas akan menurunkan asimetri informasi.

Tabel 2: Hasil Penelitian

Variabel Bebas	Koefisien	T-Stat	Sig.
Konstanta	1,842	18,959	0,000
<i>Corporate governance</i>	-6,374	-0,192	0,848
Kepemilikan Institusional	0,001	1,422	0,158
Kepemilikan Manajerial	-0,010	-1,860	0,065
Ukuran Perusahaan	0,007	0,575	0,567
Volume Perdagangan	-0,003	-0,495	0,622
Varian Return	-0.033	-2,871	0,005
R Square = 0.136	Sig F = .010		
Adj. R Square = 0.090			
F Stat = 2,960			

Sumber: data sekunder yang diolah

Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Klein, Shapiro, dan Young (2005), dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Hal ini dikarenakan oleh dalam penelitian ini menggunakan ASEAN *corporate scorecard* untuk menilai *corporate governance*. *Scorecard* ini menggunakan penilaian dengan standar di Negara-negara ASEAN. Standart yang dilakukan dalam ASEAN CG Scorecard ini lebih baik daripada yang ada di Indonesia, karena di Indonesia peraturan tentang penerapan *corporate governance* hanya mewajibkan perusahaan publik mengangkat dewan komisaris dan komite audit. Sedangkan penilaian yang dilakukan di ASEAN CG scorecard melakukan penilaian yang lebih baik, penilaian dalam *scorecard* ini, selain kewajiban adanya komite audit dan dewan komisaris dalam suatu perusahaan, juga mencakup tentang hak-hak pemegang saham dan kesejahteraan karyawan masuk dalam kriteria penilaian bahkan keselamatan pelanggan juga termasuk dalam penilaiannya.

Kriteria penilaian di Indonesia yang lebih sedikit daripada penilaian ASEAN CG Scorecard mengakibatkan *score* yang didapatkan perusahaan-perusahaan di Indonesia rendah. Hal ini mengakibatkan pengaruh hasil penelitian yang tidak signifikan terhadap asimetri informasi. Karena, nilai *corporate governance* yang kecil mengakibatkan asimetri informasi yang besar.

Pengujian hipotesis 2

Pengujian hipotesis yang kedua (H2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Berdasarkan pengujian regresi berganda yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,158 (lebih besar dari nilai $\alpha=0,10$) dan koefisien regresi sebesar 0,001 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2013). Dalam penelitiannya Purwanti (2013) menghasilkan tidak adanya hubungan negatif

antara kepemilikan institusional dan asimetri informasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional akan memberikan tekanan yang tinggi kepada manajer untuk memberikan pengungkapan yang lebih baik.

Selain itu, rata-rata kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan lebih kecil daripada kepemilikan publik. Hal ini mengindikasikan kepemilikan institusional belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Dan kemungkinan pihak institusional tidak melakukan pengawasan dikarenakan akan menimbulkan biaya yang besar (Klein, Shapiro, dan Young 2005), karena pihak institusional adalah pemilik yang memfokuskan pada *current earnings*. Fokus pihak institusional yang hanya pada *current earnings* ini membuat para manajer melakukan tindakan yang tidak transparan agar investor institusional berinvestasi. Tindakan tidak transparan disini misalnya melakukan manajemen laba, manajemen laba akan mengakibatkan asimetri informasi.

Pengujian hipotesis 3

Pengujian hipotesis yang ketiga (H3) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Berdasarkan pengujian regresi berganda yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,065 (lebih kecil dari nilai $\alpha=0,10$) dan nilai koefisien regresi sebesar -0,010 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan diterima. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam penerapan *corporate governance* yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka pengungkapan informasi yang terjadi dalam perusahaan tersebut semakin tinggi pula, sehingga akan mengurangi adanya kesenjangan informasi yang ada didalamnya.

Hal ini dikarenakan oleh banyaknya perusahaan di Indonesia yang menggunakan manajemen yang berpengalaman dan profesional. Penggunaan manajemen yang profesional akan membuat transparannya informasi

yang ada di dalam perusahaan. Selain itu kepemilikan manajerial akan membuat kinerja para manajer semakin baik dikarenakan adanya rasa memiliki dalam perusahaan. Rasa memiliki ini akan mengakibatkan para manajer meningkatkan transparansi dan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan prinsip transparansi dalam penerapan *corporate governance* yang mengungkapkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka pengungkapan informasi yang terjadi dalam perusahaan tersebut semakin tinggi pula, sehingga akan mengurangi kesenjangan informasi yang ada di dalamnya. Kepemilikan manajerial ini juga dalam hal ini juga akan mengurangi ketidakselarasan kepentingan antara agen dan principal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2013) dan Crutchley dan Hansen (1989). Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan yang kecil akan mengurangi asimetri informasi antara agen dan principal. Hal ini dikarenakan oleh proporsi kepemilikan manajerial atas perusahaan akan menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan *principal*. Dengan adanya hal tersebut maka kepentingan antara agen dan principal akan menyatu sehingga *gap* informasi antara keduanya akan dapat diperkecil.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki peran untuk pengawasan sehingga akan memberikan keyakinan kepada investor bahwa dana yang diinvestasikan aman. Tidak adanya pengaruh ini dikarenakan penerapan *corporate governance* yang ada di Indonesia cenderung tertinggal dari negara-negara lain, sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Hasil penelitian yang menguji pengaruh struktur kepemilikan terhadap asimetri informasi menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Hal ini dikarenakan oleh fokus investor institusional yang hanya kepada *current earnings*. Fokus yang hanya kepada *current earnings* membuat para manajer melakukan tindakan tidak transparan.

Sedangkan untuk kepemilikan manajerial, terdapat pengaruh yang signifikan dengan koefisien negatif terhadap asimetri informasi. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap asimetri informasi. Hal ini dikarenakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini menggunakan manajemen yang profesional dan berpengalaman. Penggunaan manajemen yang profesional akan mengurangi kesenjangan informasi dalam perusahaan. Karena manajemen yang profesional akan menjaga kredibilitasnya sehingga perusahaan yang menjadi tanggungjawabnya akan lebih transparan.

Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* struktur kepemilikan institusional secara umum tidak dapat mengurangi asimetri informasi. Sedangkan untuk struktur kepemilikan manajerial terbukti berpengaruh terhadap asimetri informasi. Dengan demikian, melalui studi ini dapat memberikan kontribusi untuk mempertimbangkan *corporate governance* dan struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan untuk melindungi investasi yang akan ditanamkan dalam perusahaan tersebut.

Peneliti menyadari terdapat keterbatasan dalam studi ini. Keterbatasan pertama rentang tahun penelitian yang hanya 2 tahun terlalu sempit. Keterbatasan ini terjadi karena salah satu variabel yaitu *corporate governance* diprosikan dengan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dimulai pada tahun 2010. Peneliti hanya bisa mendapatkan data tahun 2010 dan 2011, pada tahun selanjutnya data ASEAN *corporate governance scorecard* belum dikeluarkan oleh *domestic body* di Indonesia yaitu IICD.

Berdasarkan keterbatasan yang ada di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan

peneliti dalam penelitian selanjutnya. Pertama, peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan tahun penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indeks yang lain untuk memproksikan *corporate governance*. Kedua, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun jika dirasa sulit untuk menggunakan proksi indeks *corporate governance*, maka sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan mekanisme *corporate governance*.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Z., dan N. Rahmawati. 2006. Pengaruh corporate governance terhadap efektifitas mekanisme pengurang masalah agensi. *Jurnal Siasat Bisnis* 3 (3): 237–47.
- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid, dan H. Zimmermann. 2003. *Is board sizes an independent corporate governance mechanism?* Working Paper, University of Basel, Basel, Switzerland.
- Cai, J. Y., Y. Qian, Y. Liu, dan M. Yu. 2008. *Information asymmetry and corporate governance*. Drexel College of Business Research Paper No. 2008-02. Diakses dari <http://ssrn.com/Abstract=1082589>.
- Copeland, T. E., dan J. F. Weston. 1992. *Financial theory and corporate policy*. edisi ke-5. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Crutchley, C., dan R. Hansen. 1989. A Test of the agency theory of managerial ownership, corporate leverage, and corporate dividends. *Financial Management* 18 (Winter): 36–46.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. edisi ke-4. Semarang: BP. Universitas Diponegoro.
- Gideon, L., dan P. Milgrom. 1985. Bid ask spread and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics* 14 (1): 71–100.
- Henry, D. 2010. Agency cost, ownership structure, and corporate governance compliance: a private contracting perspective. *Pasific-Basin Finance Journal* 18 (1): 24–46.
- IICD. 2014. Indonesian Institute for Corporate Directorship: Search result.” Diakses dari <http://www.iicd.or.id/en/search-result.html?search=Penilaian+corporate+governance+yang+merupakan+inisiatif+dari+ASEAN+Capital+Market+Forum+%28ACMF%29+yang+beranggotakan+para+regulator+pasar+modal+di+negara+ASEAN&id=40>.
- Jensen, G.R., D.P. Solberg, dan T.S. Zorn. 1992. Simultaneous determination of insider ownership, debt, and dividend. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 27 (2): 247–263.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305–360.
- Kanagaretnam, K.L., J.L. Gerald, dan J. W. Dennis. 2007. Does corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earnings announcement? *Journal of Accounting and Public Policy* 26 (4): 497–522.
- Klein, P., D. Shapiro, dan J. Young. 2005. Corporate governance, family ownership and firm value: the canadian evidence. *Corporate Governance An International Review* 13 (6): 769–784.
- Knight, P. J., dan C. Weir. 2009. Agency cost, corporate governance mechanism, and ownership structure in large uk publicly quoted companies: a panel data analysis. *The Quarterly Review of Economics and Finance* 49 (2): 139–150.

- Purwanti, T. 2013. The impact of corporate governance mechanism on the asymmetry information. *Jurnal Kiat BISNIS* 5 (2): 129–147.
- Richardson, V. J. 1998. Information asymmetry and earning management: some evidence. *Journal Financial and Economics*. Diakses dari <http://www.ssrn.com>.
- Singh, M., dan W. N. Davidson. 2003. Agency cost, ownership structure, and corporate governance mechanism. *Journal of Banking and Finance* 27 (5): 793–816.
- Ujiyanto, M. A., dan B. A. Pramuka. 2007. *Mekanisme corporate governance, manajemen laba dan kinerja keuangan*. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X.
- Wisnumurti, A. 2010. *Analisis pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba*. Semarang: Universitas Diponegoro.

DETEKSI *FINANCIAL STATEMENT FRAUD* DENGAN *ANALISIS FRAUD TRIANGLE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Laila Tiffani

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
e-mail: lailatiffani93@gmail.com

Marfuah

e-mail: marfuah@uii.ac.id
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Abstract

The purpose of this study is to test the effect of fraud triangle in explaining the phenomenon of financial statement frauds. To achieve these objectives, this research examines the factors that influence financial statement frauds consists of 7 (seven) independent variables are adopted from research (Skousen, Smith, and Wright 2009). Four variables of pressure elements (financial stability, personal financial need, external pressure and financial targets), the two variables of opportunity elements (nature of the industry and effective monitoring) and one variable of the elements of rationalization. Based on logistic regression analysis of the 36 companies that commit fraud and 54 companies that did not commit fraud during 2011 to 2013 concluded that there is a positive influence between financial stability (ACHANGE) and external pressure (LEV) against financial statement frauds, while the effective monitoring (IND) has negative effect on the financial statement frauds. These results give support to the fraud triangle theory in explaining the phenomenon of financial statement frauds.

Keywords: *fraud, opportunity, pressure, rationalization*

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art3>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fraud triangle dalam menjelaskan fenomena kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini terdiri dari tujuh variabel independen yang diadopsi dari penelitian (Skousen, Smith, dan Wright 2009). Empat variabel dari elemen pressure (*financial stability, personal financial need, external pressure, dan financial target*). Dua variabel dari elemen *opportunity* (*nature of the industry dan effective monitoring*) dan satu variabel dari elemen rationalization. Berdasarkan analisis regresi logistik dari 36 perusahaan yang melakukan fraud dan 54 perusahaan yang tidak melakukan *fraud* selama 2011 sampai 2013 menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara financial stability (ACHANGE) and external pressure (LEV) terhadap *financial statement fraud*, sementara *effective monitoring* (IND) memiliki pengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. Hasil ini memberikan dukungan kepada *fraud triangle theory* dalam menjelaskan fenomena *financial statement fraud*.

Kata kunci: *fraud, opportunity, pressure, rationalization*

PENDAHULUAN

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan

beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas. Ernst & Young (2009) menemukan bahwa kasus *fraud* yang terjadi dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dewan direksi. Selain itu, ACFE juga menemukan bahwa lebih dari setengah pelaku *fraud* adalah manajemen. Jika *financial statement fraud*

memang sebuah masalah yang signifikan, auditor sebagai pihak yang bertanggungjawab harus dapat mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan.

Skandal akuntansi telah berkembang secara luas, seperti halnya di Amerika Serikat. Spathis (2002) menjelaskan bahwa di USA, kecurangan akuntansi yang menimpa Enron menimbulkan kerugian yang sangat besar di hampir seluruh industri. Skandal akuntansi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian bagi Enron sebesar US\$50 miliar, ditambah lagi kerugian investor sebesar US\$32 miliar dan ribuan pegawai Enron harus kehilangan dana pensiun mereka sekitar US\$1 miliar.

Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang belum stabil juga terkena wabah meluasnya kasus skandal akuntansi. Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (BAPEPAM 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Maraknya skandal kecurangan akuntansi di Indonesia juga diindikasikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD (Soselisa dan Mukhlisin 2008).

Pendeteksian terhadap *financial statement fraud* tidak selalu mendapatkan titik terang karena berbagai motivasi yang mendasarinya serta banyaknya metode untuk melakukan *financial statement fraud* (Brennan dan McGrath 2007). *Corporate governance* seringkali dikaitkan dengan *fraudulent financial reporting*. Pernyataan itu dibuktikan dengan penelitian Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) yang menemukan bahwa kejadian kecurangan paling tinggi terjadi pada perusahaan yang lemah *corporate governancenya*, seperti perusahaan yang lebih didominasi oleh orang dalam dan cenderung tidak memiliki komite audit. Temuan Dechow, Sloan, dan

Sweeney (1996) diperkuat kembali oleh Dunn (2004) yang menyimpulkan bahwa kecurangan lebih mungkin terjadi ketika ada konsentrasi kekuasaan di tangan orang dalam.

Dalam rangka memberikan solusi terhadap kelemahan dalam prosedur pendeteksian kecurangan di dunia, *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA 2002) menerbitkan *Statement of Auditing Standards No. 99* (SAS No. 99) mengenai *Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit* pada Oktober 2002. Tujuan dikeluarkannya SAS No.99 adalah untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan menilai pada faktor risiko kecurangan perusahaan. Faktor risiko kecurangan yang diadopsi dalam SAS No.99 didasarkan pada teori faktor risiko kecurangan (Cressey 1953).

Menurut teori Cressey (1953), terdapat tiga kondisi yang selalu hadir dalam tindakan *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization* yang disebut sebagai *fraud triangle*. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor risiko munculnya kecurangan dalam berbagai situasi.

Penelitian di Indonesia tentang deteksi kecurangan telah dilakukan sebelumnya oleh Sukirman dan Maylia (2013) yang menunjukkan bahwa *financial stability (ACHANGE)*, *external pressure (LEV)* dan *financial target (ROA)* dan *nature of industry (RECEIVABLE)* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap *fraud* yaitu *audit report* yang merupakan proksi dari rasionalisasi.

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan Sukirman dan Maylia (2013) dalam beberapa hal. *Pertama*, Sukirman dan Maylia (2013) mengidentifikasi perusahaan melakukan *fraud* berdasarkan daftar resmi perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan laporan Bapepam, sedangkan penelitian ini membedakan perusahaan dalam kelompok sampel *fraud* dan *non fraud* berdasarkan perhitungan Model Beneish-M Score (Beneish 1997). *Kedua*, variabel independen yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam penelitian Sukirman dan Maylia (2013) terdiri dari 5 (lima) variabel, sedangkan penelitian ini

menggunakan 7 (tujuh) variabel. Ketiga, variabel pengukur rasionalisasi dalam penelitian Sukirman dan Maylia (2013) menggunakan *audit report*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pergantian auditor.

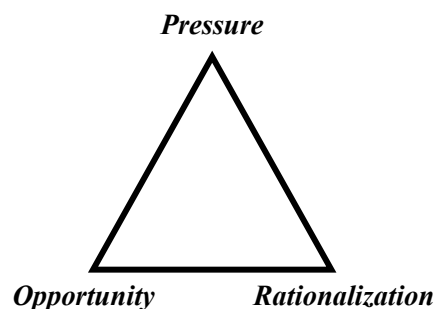
Mengacu pada SAS No. 99 (AICPA 2002), faktor tekanan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need* dan *financial targets*. Faktor peluang terdiri dari *nature of industry* dan *effective monitoring*, sedangkan *organizational structure* tidak digunakan sebagai variabel pengukur peluang, karena alasan kesulitan data. Faktor yang ketiga adalah rasionalisasi. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi *financial statement fraud* dengan analisis *fraud triangle*. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menguji apakah faktor tekanan yang terdiri dari *financial stability*, *personal financial need*, *external pressure* dan *financial target* dan faktor peluang yang terdiri dari *nature of industry* dan *effective monitoring* serta variabel rasionalisasi mempengaruhi *financial statement fraud*.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Fraud Triangle Theory

Fraud triangle theory merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle*. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization* seperti disajikan pada gambar 1.

Menurut SAS No.99 (AICPA, 2002) terdapat 4 (empat) jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Sedangkan *opportunity* terdiri dari 3 (tiga) kategori kondisi, yaitu *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. Komponen terakhir yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*) adalah rasionalisasi. Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya.



Gambar 1: *Fraud Triangle* (Cressey 1953)

Financial Stability dan Financial Statement Fraud

Menurut SAS No. 99 (AICPA 2002), manajer menghadapi tekanan untuk melakukan *financial statement fraud* ketika stabilitas keuangan (*financial stability*) terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi. *Financial stability* merupakan keadaan yang menggambarkan kondisi ketidakstabilan keuangan perusahaan (Skousen *et al.* 2009).

Manajemen seringkali mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola aset dengan baik sehingga laba yang dihasilkannya juga banyak dan nantinya akan menghasilkan return yang tinggi pula untuk investor. Dengan alasan demikian, manajemen memanfaatkan laporan keuangan sebagai alat untuk menutupi kondisi stabilitas keuangan yang buruk dengan melakukan *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa persentase perubahan total aset (ACHANGE) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Financial Stability* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Personal Financial Need dan Financial Statement Fraud

Personal financial need merupakan suatu kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan (Skousen *et al.* 2009). Beasley (1996), *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*

(COSO) (1999), dan Dunn (2004) menunjukkan bahwa ketika eksekutif perusahaan memiliki peranan keuangan yang kuat dalam perusahaan, *personal financial need* dari eksekutif perusahaan tersebut akan turut terpengaruh oleh kinerja keuangan perusahaan.

Adanya kepemilikan saham oleh orang dalam perusahaan menyebabkan yang bersangkutan merasa punya hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan sehingga akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Ketidakjelasan pemisahan antara pemilik dan kontrol dari perusahaan memicu para manajer sewenang-wenang menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contoh kepentingan pribadi yang merupakan tekanan yang dialami para manajer yang akan mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan antara lain tekanan keuangan, tekanan kebiasaan buruk dan tekanan berkaitan dengan pekerjaan. Semakin tinggi persentase kepemilikan saham oleh orang dalam maka praktek *fraud* dalam memanipulasi laporan keuangan semakin bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa persentase kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis berikut:

H2: *Personal Financial Need* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

External Pressure dan Financial Statement Fraud

External pressure merupakan tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Menurut SAS No. 99, saat tekanan berlebihan dari pihak eksternal terjadi, maka terdapat risiko kecurangan terhadap laporan keuangan. Hal ini didukung oleh pendapat Skousen *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa salah satu tekanan yang seringkali dialami manajemen perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal.

Person (1999) menyatakan bahwa leverage (LEV) yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan kemampuan yang lebih rendah untuk memperoleh tambahan modal melalui pinjaman. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Lou dan Wang (2009) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami tekanan eksternal perusahaan, dapat diidentifikasi risiko salah saji material yang lebih besar akibat kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa persentase total hutang terhadap total aset (LEV) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: *External Pressure* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Financial Target dan Financial Statement Fraud

Menurut SAS No.99 (AICPA, 2002), *financial target* adalah risiko adanya tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen, termasuk tujuan-tujuan penerimaan insentif dari penjualan maupun keuntungan. Skousen *et al.* (2009) mengatakan bahwa *Return on asset* (ROA) sering digunakan dalam menilai kinerja manajer dan dalam menentukan bonus, kenaikan upah, dan lain-lain.

Semakin tinggi ROA yang ditargetkan perusahaan, maka semakin rentan manajemen akan melakukan manipulasi laba yang menjadi salah satu bentuk kecurangan sehingga memiliki hubungan positif dengan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Financial Targets* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Nature of Industry dan Financial Statement Fraud

Nature of Industry merupakan keadaan ideal suatu perusahaan dalam industri. Pada laporan keuangan terdapat akun-akun tertentu yang besarnya saldo ditentukan oleh perusahaan

berdasarkan suatu estimasi, misalnya akun piutang tak tertagih dan akun persediaan usang. Summers dan Sweeney (1998) mencatat bahwa akun piutang dan persediaan memerlukan penilaian subjektif dalam memperkirakan tidak tertagihnya piutang. Summers dan Sweeney, (1998) juga menyatakan bahwa manajer akan fokus terhadap kedua akun tersebut jika berniat melakukan manipulasi pada laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Summers dan Sweeney (1998) menunjukkan bahwa rasio perubahan dalam piutang usaha (RECEIVABLE) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: *Nature of Industry* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Effective Monitoring dan Financial Statement Fraud

Fraud dapat diminimalkan salah satunya dengan mekanisme pengawasan yang baik. Komite audit dipercaya dapat meningkatkan efektifitas pengawasan perusahaan. Beasley, Dana dan Terry (2010) menyatakan bahwa anggota komite audit yang lebih besar dapat mengurangi insiden *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) menunjukkan bahwa proporsi anggota komite audit independen (IND) berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H6: *Effective monitoring* berpengaruh negatif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Rationalization dan Financial Statement Fraud

Auditor adalah pengawas penting dalam laporan keuangan. Informasi tentang perusahaan yang terindikasi terjadi kecurangan, biasanya juga diketahui dari auditor. Perusahaan yang melakukan *fraud* lebih sering melakukan pergantian auditor, karena manajemen perusahaan cenderung berusaha mengurangi kemungkinan pendeteksian oleh auditor lama terkait tindak kecurangan laporan keuangan.

Lou dan Wang (2009) menyatakan bahwa sebuah perusahaan bisa mengganti auditor untuk mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh pihak auditor. Loebbecke, Eining, dan Willingham (1989) menunjukkan bahwa 36 persen dari kecurangan dalam sampel mereka dituduhkan dalam dua tahun awal masa jabatan auditor. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H7: *Rationalization* berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud*.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari uraian di atas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritis seperti pada Gambar 2 di bawah.

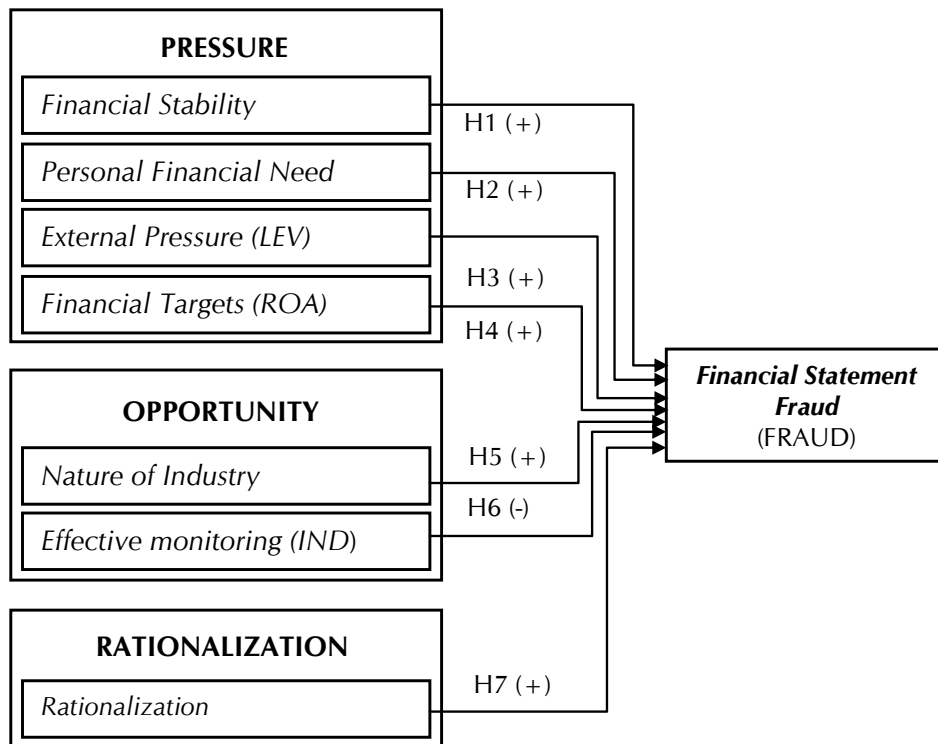
METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar (*listed*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama periode tahun 2011 - 2013.
2. Perusahaan yang menyajikan *annual report* lengkap dalam website perusahaan atau website BEI secara berturut-turut selama periode pengamatan.
3. Perusahaan terindikasi melakukan manipulasi (*fraud*) minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan.

Untuk menentukan apakah perusahaan terindikasi melakukan manipulasi (*fraud*) atau tidak, peneliti menggunakan model perhitungan Beneish M-Score. Jika Beneish M-Score lebih besar dari -2.22 mengindikasikan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi dan jika skor lebih kecil dari -2.22 maka perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan manipulasi (*non fraud*).



Gambar 2: Kerangka Pemikiran Teoritis

Tabel 1: Proses Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Total
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berturut-turut selama tahun 2011 -2013	136
2.	Perusahaan tidak mengeluarkan <i>annual report</i> secara berturut-turut selama tahun pengamatan	(36)
3.	Perusahaan tidak terindikasi melakukan manipulasi (<i>fraud</i>) minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan	(70)
	Perusahaan terindikasi melakukan fraud minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan	30

Sumber : Data Diolah, 2015

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan *fraud* minimal 1 kali dalam 3 tahun pengamatan adalah sebanyak 30 perusahaan, sehingga sampel keseluruhan selama 3 tahun sebanyak 90 sampel. Dari 90 sampel terpilih, kemudian diklasifikasikan menjadi 2 kelompok sampel, yaitu kelompok perusahaan yang terindikasi melakukan *fraud* sebanyak 36 dan yang tidak melakukan *fraud* 54. Adapun proses pemilihan sampel disajikan pada tabel 1.

Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial statement fraud (FRAUD)* yang

diukur dengan menggunakan model Beneish M-Score. *Beneish M-Score* diukur dengan menggunakan 8 (delapan) rasio keuangan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki indikasi untuk memanipulasi pendapatan dalam laporan keuangan (Beneish 1997). Delapan rasio keuangan dan pengukurannya disajikan pada tabel 2.

Setelah dilakukan perhitungan kedelapan rasio tersebut, kemudian diformulasikan kedalam rumus Beneish M Score Model:

$$\begin{aligned}
 \text{M-Score} = & -4.84 + 0.920 \text{ DSRI} + 0.528 \text{ GMI} + \\
 & 0.404 \text{ AQI} + 0.892 \text{ SGI} + 0.115 \\
 & \text{DEPI} - 0.172 \text{ SGAI} - 0.327 \text{ LVGI} \\
 & + 4.697 \text{ TATA}
 \end{aligned}$$

Tabel 2: Rasio Keuangan Untuk Mengukur Beneish- M Score

No	Rasio Keuangan	Rumus
1	Days Sales in Receivable Index (DSRI)	$DSRI = \frac{(Net\ Receivables\ t / Sales\ t)}{(Net\ Receivables\ t-1 / Sales\ t-1)}$
2	Gross Margin Index (GMI)	$GMI = \frac{[(Sales\ t-1 - COGS\ t-1) / Sales\ t-1]}{[(Sales\ t - COGS\ t) / Sales\ t]}$
3	Asset Quality Index (AQI)	$AQI = \frac{(TA_t - (CA_t + PPE_t) / TA_t)}{(TA_{t-1} - (CA_{t-1} + PPE_{t-1}) / TA_{t-1})}$
4	Sales Growth Index (SGI)	$SGI = \frac{Sales\ t}{Sales\ t-1}$
5	Depreciation Index (DEPI)	$DEPI = \frac{[(Depreciation\ t-1 / (PPE\ t-1 + Depreciation\ t-1))]}{[(Depreciation\ t / (PPE\ t + Depreciation\ t))]}$
6	Sales General and Administrative Expenses Index (SGAI)	$SGAI = \frac{(SG\&A\ Expense\ t / Sales\ t)}{(SG\&A\ Expense\ t-1 / Sales\ t-1)}$
7	Leverage Index (LVGI)	$LVGI = \frac{[(Current\ Liabilities\ t + Long\ Term\ Debt\ t) / Total\ Assets\ t]}{[(Current\ Liabilities\ t-1 + Long\ Term\ Debt\ t-1) / Total\ Assets\ t-1]}$
8	Total Accruals to Total Assets (TATA)	$TATA = \frac{(Net\ Income\ from\ Continuing\ Operations\ t - Cash\ Flows\ from\ Op)}{Total\ Assets\ t}$

Sumber: Skousen et al. (2009)

Jika Benesih M-Score lebih besar dari -2.22, dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan *fraud*. Sedangkan jika skor lebih kecil dari -2.22, dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan *fraud* (*non fraud*). Selanjutnya perusahaan yang melakukan *fraud* diberi skor 1 dan yang tidak melakukan *fraud* (*non fraud*) diberi skor 0.

Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan variabel yang dikembangkan dari ketiga komponen *fraud triangle*, yaitu (1) *Pressure*, (2) *Opportunity* dan (3) *Rationalization*. Pada penelitian ini pengukuran variabel independen mengacu pada Skousen et al. (2009), akan tetapi tidak memasukkan variabel *organizational structure*, karena kesulitan memperoleh data. Tabel 3 berikut menyajikan variabel independen dan pengukurannya.

Tabel 3: Variabel Independen dan Pengukurannya

<i>Fraud Risk Factor</i>	Nama Variabel	Pengukuran Variabel
<i>Pressure</i>	<i>Financial Stability</i> (ACHANGE)	$= \frac{Total\ Aset\ t - Total\ Aset\ t-1}{Total\ Aset\ t}$
	<i>External Pressure</i> (LEV)	$= \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$
	<i>Personal Financial Need</i> (OSHIP)	$= \frac{Total\ saham\ yang\ dimiliki\ orang\ dalam}{Total\ saham\ biasa\ yang\ beredar}$
	<i>Financial Targets</i> (ROA)	$= \frac{Laba\ setelah\ pajak\ t-1}{Total\ Aset\ t-1}$
<i>Opportunity</i>	<i>Nature Of Industry</i> (RECEIVABLE)	$= \left(\frac{Piutang\ t}{Penjualan\ t} - \frac{Piutang\ t-1}{Penjualan\ t-1} \right)$
	<i>Ineffective Monitoring</i>	$\frac{Jumlah\ anggota\ komite\ audit\ independen}{Jumlah\ total\ komite\ audit}$
<i>Rationalization</i>	<i>Rationalization</i> (AUDCHANGE)	1 (satu) untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor sedangkan 0 (nol) untuk sebaliknya.

Sumber: Skousen et al. (2009)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah model regresi logistik dengan rumus:

$$FRAUD = \alpha + \beta_1 \cdot ACHANGE + \beta_2 \cdot OSHIP + \beta_3 \cdot LEV + \beta_4 \cdot ROA + \beta_5 \cdot RECEIVABLE + \beta_6 \cdot IND + \beta_7 \cdot AUDCHANGE + \epsilon$$

Keterangan :

FRAUD: variabel *dummy*, kode 1 (satu) untuk perusahaan yang melakukan kecurangan laporan keuangan, kode 0 (nol) untuk yang tidak

α : konstanta

β : koefisien variabel

ACHANGE: rasio perubahan aset selama dua tahun

OSHIP : komposisi saham yang dimiliki manajemen

LEV : rasio leverage

ROA : rasio *return on asset* (ROA)

RECEIVABLE: rasio perubahan piutang usaha

IND : proporsi dewan komisaris independen

AUDCHANGE : pergantian auditor

ϵ : *error term*

Selain itu juga dilakukan pengujian tambahan yaitu dengan *Independent Sample T-Test* untuk menguji perbedaan karakteristik dari kedua kelompok sub sampel *fraud* dan *non fraud* berdasarkan 7 (tujuh) variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu disajikan deskripsi data variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi pada tabel 4. Panel A menyajikan deskripsi data untuk total sampel, Panel B untuk sub sampel *fraud* dan Panel C untuk sub sampel *non fraud*.

Tabel 4: Deskripsi Variabel Penelitian

Panel A : Total Sampel

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACHANGE	90	-,3094	1,5881	,192119	,2101762
OSHIP	90	,0000	,2888	,062571	,0887271
LEV	90	,0366	1,0072	,454215	,2018919
ROA	90	,0029	,3211	,082886	,0660785
RECEIVABLE	90	-,1049	,0896	,009437	,0353497
IND	90	,2500	,6667	,364815	,1064242

Sumber : Hasil Olah Data, 2015

Panel B : Sub Sampel Fraud

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACHANGE	36	-,3094	,5279	,224348	,1490865
OSHIP	36	,000010	,256100	,05381639	,086173078
LEV	36	,0366	1,0072	,521713	,2020039
ROA	36	,0129	,2806	,084656	,0593531
RECEIVABLE	36	-,0521	,0611	,012911	,0253889
IND	36	,2500	,3333	,324074	,0265606

Sumber : Hasil Olah Data, 2015

PanelC : Sub Sampel Non Fraud

	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACHANGE	54	-,1824	1,5881	,170633	,2415057
OSHIP	54	,000010	,288800	,06840796	,090715204
LEV	54	,0372	,7611	,409217	,1906355
ROA	54	,0029	,3211	,081706	,0707269
RECEIVABLE	54	-,1049	,0896	,007122	,0407315
IND	54	,2500	,6667	,391975	,1291295

Sumber : Hasil Olah Data, 2015

Analisis Regresi Logistik

Tabel 5: Hasil Uji Regresi Logistik

Persamaan Regresi:

$$\text{FRAUD} = 4,973 + 3,152 \text{ ACHANGE} - 0,401 \text{ OSHIP} + 2,994 \text{ LEV} + 2,608 \text{ ROA} + 0,059 \text{ RECEIVABLE} - 22,705 \text{ IND} + 0,984 \text{ AUDCHANGE} + e$$

Variabel	Prediksi	B	S.E.	Wald	Sig.	Exp(B)	Kesimpulan
ACHANGE	+	3,152	1,585	3,955	,047	23,394	Ha1 didukung
OSHIP	+	-,401	3,047	,017	,895	,669	Ha2 tidak didukung
LEV	+	2,994	1,522	3,872	,049	19,971	Ha3 didukung
ROA	+	2,608	4,306	,367	,545	13,578	Ha4 tidak didukung
RECEIVABLE	+	,059	7,930	,000	,994	1,060	Ha5 tidak didukung
IND	-	-22,705	8,684	6,836	,009	,000	Ha6 didukung
AUDCHANGE	+	,984	,926	1,128	,288	2,675	Ha7 tidak didukung
Constant		4,973	2,713	3,361	,067	144,496	

Hosmer and Lemeshow Test: Chi-square = 13,415, Sig. = 0,098

Overall Model Fit Test : -2 Log Likelihood Block Number = 0 adalah 121,143,

-2 Log Likelihood Block Number = 1 adalah 101,682

Nagel Karke R Square : 0,342

Cox & Snell R Square :0,253

Sumber: Hasil Olah Data, 2015.

Hasil uji hipotesis penelitian dengan model regresi logistik disajikan pada tabel 5. Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi. Berdasarkan hasil uji *Hosmer and Lemeshow* diperoleh nilai *Chi-square* sebesar 13,415 dengan sig 0,098. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu memprediksi nilai observasi karena cocok dengan data observasinya.

Langkah kedua adalah menilai keseluruhan model regresi dengan membandingkan nilai *-2 Log Likelihood Block Number = 0* dan *-2 Log Likelihood Block Number = 1*. Adanya penurunan yang signifikan nilai *-2 Log Likelihood Block Number = 0* sebesar 121,143 menjadi 101,682 pada model *-2 Log Likelihood Block Number = 1*, menunjukkan bahwa model regresi dengan memasukkan semua variabel independen lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Prediksi ketepatan model juga dapat menggunakan matrik klasifikasi yang menghitung nilai estimasi yang benar dan yang salah pada variable dependen. Matrik klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya kecurangan. Hasil nilai Uji klasifikasi disajikan pada tabel 6.

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan 71,1% sampel dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini. Tingginya persentase ketepatan tabel klasifikasi tersebut mendukung tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan sebagai model regresi logistik yang baik.

Langkah selanjutnya adalah menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 6: Hasil Uji Klasifikasi

Classification Table ^a					
Observed		Predicted			
		FRAUD		Percentage Correct	
		0	1		
Step 1	FRAUD	0	45	9	83,3
		1	17	19	52,8
Overall Percentage					71,1

Sumber : Hasil Olah Data, 2015

Pengaruh *Financial Stability* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Berdasarkan tabel 05, koefisien variabel ACHANGE bernilai positif 3,152 dengan nilai signifikansi 0,047, artinya *financial stability* (ACHANGE) berpengaruh positif signifikan terhadap *financial statement fraud*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kondisi ketidakstabilan keuangan perusahaan, maka kemungkinan perusahaan melakukan *financial statement fraud* juga semakin tinggi.

Hasil ini sesuai dengan pernyataan Skousen *et al.* (2009) bahwa manajer menghadapi tekanan untuk melakukan *financial statement fraud* ketika stabilitas keuangan (*financial stability*) terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi. Artinya dengan adanya ketidakstabilan keuangan, akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manajemen.

Loebbecke *et al.* (1989) menunjukkan bahwa kasus dimana perusahaan mengalami pertumbuhan industri di bawah rata-rata, manajemen mungkin melakukan manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan. Kondisi perusahaan yang tidak stabil akan menimbulkan tekanan bagi manajemen karena kinerja perusahaan terlihat menurun di mata publik sehingga akan menghambat aliran dana investasi di tahun mendatang.

Pengaruh *Personal Financial Need* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Koefisien regresi *personal financial need* (OSHIP) adalah -0,401 dengan signifikansi sebesar 0,895, maka dapat disimpulkan bahwa *personal financial need* (OSHIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena masih rendahnya rata-rata kepemilikan manajerial dalam perusahaan sampel, yaitu sebesar 0,062571 atau 6,2571%.

Kepemilikan manajerial yang rendah mengindikasikan bahwa pada perusahaan sampel telah terjadi pemisahan yang jelas antara pemegang saham sebagai pemilik yang mengontrol jalannya perusahaan dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Adanya pemi-

sahan yang jelas menyebabkan manajer tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Skousen *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa persentase kepemilikan saham oleh orang dalam (OSHIP) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*.

Pengaruh *External Pressure* Terhadap *Personal Financial Need*

Koefisien regresi variabel LEVERAGE bernilai positif 2,994 dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 sehingga dapat disimpulkan bahwa *external pressure* (LEVERAGE) berpengaruh positif signifikan terhadap *financial statement fraud*. Artinya semakin besar tekanan dari pihak eksternal maka akan meningkatkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Person (1999) yang menyatakan bahwa leverage (LEV) yang lebih besar dapat dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan kemampuan yang lebih rendah untuk memperoleh tambahan modal melalui pinjaman. Hasil ini juga mendukung pendapat Lou dan Wang (2009) yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mengalami tekanan eksternal perusahaan, dapat diidentifikasi risiko salah saji material yang lebih besar akibat kecurangan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Skousen *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa *external pressure* (LEVERAGE) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*.

Pengaruh *Financial Target* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Koefisien variabel ROA bernilai positif 2,608 dengan signifikansi sebesar 0,545, maka dapat disimpulkan bahwa *financial target* (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*. Artinya bahwa besar kecilnya tingkat ROA yang ditargetkan perusahaan tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Skousen *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa *financial target* (ROA) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Tidak berpengaruhnya ROA terhadap *financial statement fraud* pada penelitian ini kemungkinan disebabkan karena manajer menganggap bahwa besarnya target ROA perusahaan masih dinilai wajar dan bisa dicapai. Manajer tidak menganggap bahwa target ROA tersebut sebagai target keuangan yang sulit untuk dicapai sehingga besarnya target ROA tidak memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen.

Pengaruh *Nature of Industry* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Koefisien variabel RECEIVABLE bernilai positif 0,059 dengan nilai signifikansi sebesar 0,994, maka dapat disimpulkan bahwa *nature of industry* (RECEIVABLE) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*, artinya bahwa besar kecilnya rasio perubahan dalam piutang usaha tidak memicu manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Summers dan Sweeney (1998) yang menyimpulkan bahwa *nature of industry* (RECEIVABLE) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*.

Tidak berpengaruhnya variabel *nature of industry* (RECEIVABLE) terhadap *financial statement fraud* pada penelitian ini kemungkinan disebabkan nilai rata-rata perubahan piutang usaha (RECEIVABLE) pada sub sampel *fraud* dan sub sampel *non fraud* besarnya tidak jauh berbeda, yaitu masing-masing sebesar 0,012911 pada sub sampel *fraud* dan 0,007122 pada sub sampel *non fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang masuk dalam kelompok sub sampel *fraud* maupun sub sampel *non fraud* mempunyai sifat industri yang tidak berbeda, sehingga RECEIVABLE tidak dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan.

Pengaruh *Effective Monitoring* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Koefisien variabel *effective monitoring* (IND) sebesar -22,705 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009, maka disimpulkan bahwa *effective monitoring* (IND) berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial statement fraud*. Artinya bahwa semakin tinggi efektifitas pengawasan perusahaan akan menurunkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Skousen *et al.* (2009) yang menyimpulkan bahwa *effective monitoring* (IND) berpengaruh negatif terhadap *financial statement fraud*. *Fraud* dapat diminimalkan salah satunya dengan mekanisme pengawasan yang baik. Komite audit dipercaya dapat meningkatkan efektifitas pengawasan perusahaan. Artinya bahwa semakin besar proporsi komite audit independen, maka proses pengawasan yang dilakukannya akan semakin efektif sehingga akan menurunkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh *Rationalization* Terhadap *Financial Statement Fraud*

Koefisien variabel AUDCHANGE bernilai positif 0,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,228, maka dapat disimpulkan bahwa *rationalization* (AUDCHANGE) tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial statement fraud*. Artinya bahwa pergantian auditor yang dilakukan perusahaan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Sorenson *et al.* (1983) dan Skousen *et al.* (2009) yang menunjukkan bahwa *rationalization* (AUDCHANGE) berpengaruh positif terhadap *financial statement fraud*. Hasil ini kemungkinan disebabkan karena perusahaan sampel yang melakukan pergantian auditor, bukan disebabkan perusahaan ingin mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh auditor lama, tetapi lebih dikarenakan perusahaan ingin mentaati Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3

ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama.

Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan dilakukan dengan uji beda *Independent Sample T-Test* untuk menguji apakah masing-masing variabel independen dalam penelitian ini mempunyai karakteristik yang berbeda secara signifikan pada kedua kelompok sub sampel penelitian. Hasil pengujian dengan *Independent Sample T-Test* disajikan pada tabel 7.

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel *external pressure* (LEV) dan *effective monitoring* (IND) berbeda secara signifikan pada subsampel perusahaan yang melakukan *fraud* dan yang tidak melakukan *fraud*. Artinya berdasarkan uji beda *Independent sample T-Test*, kedua variabel tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Semakin tinggi *leverage* dan semakin kecil proporsi Komite Audit Independen, maka potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam perusahaan akan semakin tinggi. Hasil ini mendukung hasil pengujian

hipotesis ketiga dan keenam dengan menggunakan analisis regresi logistik.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian terhadap 7 (tujuh) hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik, disimpulkan sebagai berikut: 1) *Financial stability* (ACHANGE) dan *external pressure* (LEV) berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai ketidakstabilan keuangan dan tekanan eksternal yang tinggi, manajemen mempunyai potensi yang lebih tinggi dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. 2) Variabel *effective monitoring* (IND) berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial statement fraud*. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi Komite Audit Independen, maka proses monitoring terhadap perusahaan semakin efektif sehingga akan menurunkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. 3) Variabel *personal financial need* (OSHIP), *financial target* (ROA), *nature of industry* (RECEIVABLE) dan *rationalization* (AUDCHANGE) tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya keempat variabel tersebut tidak mampu mendeteksi potensi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan manufaktur.

Tabel 7: Hasil Uji *Independent Sample T-Test*

	Kelompok	n	Mean	Mean Difference	T statistic	Sig- (2-tailed)
ACHANGE	Non Fraud	54	,170633	-,0537155	-1,304	,196
	Fraud	36	,224348			
OSHIP	Non Fraud	54	,06840796	,014591574	,770	,443
	Fraud	36	,05381639			
LEV	Non Fraud	54	,409217	-,1124962	-2,647	,010
	Fraud	36	,521713			
ROA	Non Fraud	54	,081706	-,0029502	-,214	,831
	Fraud	36	,084656			
RECEIVABLE	Non Fraud	54	,007122	-,0057884	-,830	,409
	Fraud	36	,012911			
IND	Non Fraud	54	,391975	,0679012	3,747	,000
	Fraud	36	,324074			
UDCHANGE	Non Fraud	54	,06	-,111	-1,578	,121
	Fraud	36	,17			

Sumber: Hasil Olah Data, 2015

Implikasi

Penelitian ini memberi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap deteksi *financial statement fraud*, seperti auditor dan pemerintah dalam menilai potensi terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Semakin tinggi perubahan total aset dan LEVERAGE serta semakin rendah proporsi Komite Audit Independen dalam perusahaan, maka potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan perusahaan tersebut semakin besar.

Keterbatasan dan Saran

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain: 1) Variabel yang digunakan untuk mendeteksi *financial statement fraud* pada penelitian ini hanya sebatas variabel yang dikembangkan dari *Fraud Triangel Theory*, yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Disarankan untuk menambahkan variabel independen yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya *financial statement fraud*, misalnya manajemen laba, perataan laba dan *unexpected audit fee* seperti digunakan dalam penelitian Hribar, Kravet, dan Wilson (2014). 2) Pengukuran variabel rasionalisasi dengan menggunakan proksi pergantian auditor (AUDITCHANGE), sebaiknya dikaji secara lebih baik untuk memastikan bahwa pergantian auditor tersebut bukan disebabkan karena perusahaan melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1. Caranya adalah hanya mengelompokkan sebagai sampel perusahaan yang melakukan pergantian auditor (AUDITCHANGE) untuk perusahaan yang melakukan pergantian auditor dan laporan keuangan tahun sebelumnya mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*).

DAFTAR REFERENSI

AICPA. 2002. *Consideration of fraud in a financial statement audit*. Statement on Auditing Standard No. 99. AICPA. New York.

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE). 2014. *Reports to the nations: On occupational fraud and abuse*. Global Fraud Study.

BAPEPAM. 2002. *Pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan-perusahaan publik*. Jakarta: BAPEPAM.

Beasley, M. S., 1996. An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review* 71 (4): 43-65.

Beasley, M., J. V. Dana, dan L. Terry. 2010. *Fraudulent financial reporting*. http://www.coso.org/documents/COSO_FRAUDSTUDY2010_001.pdf (diakses: 13 Mei 2015).

Beneish, M. 1997. Detecting GAAP violation: Implications for assessing earnings management among firms with extreme financial performance. *Journal of Accounting and Public Policy* 16 (3): 271-309.

Brennan, N., dan Mc. Grath. 2007. Financial statement fraud some lesson from US and Europe: An Case studies. *Journal Australia Accounting Review* 17 (42): 49-61.

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO). 1999. *Fraudulent Financial Reporting: 1987-1997 – Analysis of US*. New York: Public Companies.

Cressey, D. 1953. *Other people's money: A Study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.

Dechow, P., R. Sloan, and A. Sweeney. 1996. Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research* 13 (1): 1-36.

- Dunn, P. 2004. The impact of insider power on fraudulent financial reporting. *Journal of Management* 30 (3): 397-412.
- Ernst & Young. 2009. Detecting financial statement fraud: What every manager needs to know.
- Hribar, P., T. Kravet, dan R. Wilson. 2014. A New measure of accounting quality. *Review Accounting Studies Journal* 19 (1): 506-538.
- Loebbecke, J., M. Eining. Dan J. Willingham. 1989. Auditor's experience with material irregularities: frequency, nature, and detestability. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 9 (1).
- Lou, Y.I., dan M. L. Wang. 2009. Fraud risk factor of the fraud triangle assesing the likelihood of fraudulent financial reporting. *Journal of Business and Economic Research* 7 (2): 62-66.
- Person, O. 1999. Using financial information to differentiate failed vs surviving finance companies in Thailand: An Implication for emerging economies. *Multinational Finance Journal* 3 (2): 127-145.
- Skousen, C. J., K. R. Smith, dan J. C. Wright. 2009. Detecting and predicting financial statement fraud: The Effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. *Corporate and Firm Performance Advances in Financial Economics* 13: 53-81.
- Soselisa, R., dan Mukhlisin. 2008. Pengaruh faktor kultur organisasi, manajemen, strategik keuangan, dan auditor terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan publik di Indonesia. Tesis, Unika Atma Jaya Jakarta.
- Spathis, C. T. 2002. Detecting false financial statements using published data: Some evidence from Greece. *Managerial Auditing Journal* 17 (4): 179-191.
- Sukirman., dan P. S. Maylia. 2013. Model deteksi kecurangan berbasis fraud triangle (Studi kasus pada perusahaan publik di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 9 (2): 199-225.
- Summers, S., dan J. Sweeney. 1998. Fraudulently misstated financial statements and insider trading: An Empirical analysis. *The Accounting Review* 73 (1): 131-146.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KINERJA MAQASID SYARIAH BANK SYARIAH DI INDONESIA

Muamar Nur Kholid

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

e-mail: Muamar.nk@uii.ac.id

Arief Bachtiar

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

e-mail: arief.bachtiar@uii.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of good corporate governance, namely board of commissioner, shariah supervisory board, and audit committee to maqasid shariah performance of Islamic bank. This study based on agency theory. This study take sampel from 7 Islamic bank in Indonesia, 2010-2014. The method of analysis of this research used multi regression. The results of this study show that, (1) size of board of commissioner had positive significant to maqasid shariah performance of Islamic bank, (2) size of audit committee had negative significant to maqasid shariah performance of Islamic bank, and (3) shariah supervisory board (DPS) had no significant influence to maqasid shariah performance of Islamic bank.

Keywords : *corporate governance, agency theory, maqasid shariah performance of Islamic bank*
<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art4>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh good corporate governance yang diprosikan dengan jumlah dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada teori agensi dengan menggunakan sampel 7 bank syariah di Indonesia dari tahun 2010-2014 dan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah, (2) jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah, (3) jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia.

Kata kunci : *good corporate governance, teori agensi, kinerja maqasid syariah bank syariah*

PENDAHULUAN

Perkembangan kinerja bank syariah yang hanya dinilai dari pertumbuhan aset dan *market share*, menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai organisasi yang berorientasi pada laba (Reni, Muklis dan Cholismi 2014). Menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008), tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (*maqasid syariah*). Penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah Islam (Reni, Muklis dan Cholismi 2014). Operasional bank

syariah harus sesuai dengan syariah Islam karena syariah Islam memiliki tujuan syariah (*maqasid syariah*) sehingga tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah*, karenanya pengukuran kinerja untuk mengetahui ketercapaiannya terhadap tujuan akan tepat jika pengukurannya berbasiskan pada *maqasid syariah*.

Bank syariah memiliki peran menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan uang (pendanaan) dan menyalurkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang (pembiayaan). Penjelasan mengenai hubungan

antara nasabah dan bank dapat dijelaskan dengan menggunakan dasar teori agensi. Menurut teori agensi, dalam perusahaan terdapat pemisahan antara pemilik dana dengan pengelola dana (bank), dengan kata lain pemilik dana mempercayakan dananya kepada bank syariah untuk dilakukan pengelolaan atas dana tersebut. Pemisahan ini berakibat pada terjadinya kemungkinan masalah agensi. Adanya kemungkinan masalah agensi tersebut mendorong perlunya *good corporate governance*. *Good corporate governance* kaitannya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Faozan 2013). Berkaitan dengan kemungkinan masalah agensi yaitu bank tidak menjalankan operasional usahanya sesuai syariah Islam, maka dibutuhkan mekanisme *good corporate governance* dengan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Mekanisme *good corporate governance* yang secara tidak langsung juga memiliki peran dalam pengawasan kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam adalah dewan komisaris dan komite audit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, dewan komisaris dan komite audit memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut direksi bank syariah terhadap temuan dewan pengawas syariah. Dengan adanya dewan komisaris dan komite audit ini bank syariah mematuhi segenap peraturan-peraturan yang ada, sehingga masalah agensi dapat berkurang yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri.

Beberapa penelitian terkait *good corporate governance* yang dikaitkan dengan kinerja bank dapat ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Mollah dan Zaman (2015) yang meneliti 147 bank syariah di berbagai negara menemukan bahwa jumlah dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh

positif signifikan terhadap ROIAE. Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh dari tahun 2005 sampai 2010 menemukan bahwa jumlah *board of director* berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti 25 bank di Bangladesh 2003-2011 menemukan jumlah *board of director* dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian Al Baidhani (2013) yang mengukur kinerja bank dengan menggunakan ROE, ROA dan profit margin pada bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman, menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Penelitian Sam'ani (2008) yang meneliti bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian Syam dan Najda (2012) yang meneliti kualitas *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh bank syariah Indonesia, menemukan bahwa kualitas *good corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja bank syariah yang diukur dengan ROA.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas baik bank Islam maupun bank konvensional, keseluruhannya menggunakan ukuran profitabilitas berupa ROA, ROE, profit margin ataupun Tobins-Q, yang artinya bahwa peneliti-peneliti sebelumnya tidak membedakan ukuran kinerja antara bank syariah dan bank konvensional. Penelitian ini akan fokus terhadap pengukuran kinerja bank umum syariah yang mengukur kinerja bank tidak hanya dengan ukuran profitabilitas melainkan juga akan diukur dengan kinerja *maqasid syariah* bank syariah yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008). Penelitian ini juga hanya fokus pada mekanisme *good corporate governance* pada struktur internal bank syariah yang terdiri dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *good corpo-*

rate governance yang diproksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal. Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada prinsipal. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymmetric information* dimana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Adanya *asymmetric information* dapat memicu masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan/atau *adverse selection* (Jensen dan Meckling 1976). Terkait dengan kemungkinan munculnya masalah agensi, menurut Jensen dan Meckling (1976) akan menimbulkan biaya keagenan untuk menekan masalah agensi tersebut yang terdiri dari (1) biaya monitoring, (2) *bonding expenditure*, dan (3) *residual loss*.

Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah

Segala aktivitas seorang muslim harus didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat muslim, bank yang merupakan komponen vital dari kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada syariah Islam, yang sering disebut sebagai bank syariah atau bank Islam. Syariah Islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai *maqasid syariah*. Menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008), tujuan Bank Syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (*maqasid syariah*). Hal ini dikarenakan tujuan dari bank Islam tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga memiliki peran di bidang

sosial. Oleh karena tujuannya tidak hanya memaksimalkan laba, maka pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks.

Pengukuran kinerja bank syariah berbasis *maqasid syariah* merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari *maqasid syariah*. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan tersebut. Mohammed, Razak dan Taib (2008) menggunakan klasifikasi maqasid syariah menurut Abu Zaharah (1997) yaitu: (1) *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu); (2) *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan), dan; (3) *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan).

Pengembangan pengukuran kinerja yang dilakukan Mohammed, Razak dan Taib (2008) menggunakan metode dari Uma Sekaran (2000). Metode tersebut dibangun dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi dari setiap tujuan syariah, yang selanjutnya dari dimensi-dimensi tersebut ditentukan elemen-elemen yang menunjukkan ketercapaian dari dimensi tersebut.

Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah

Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris. Menurut Lehn, Patro dan Zhao (2004) ukuran *board of director* (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti *market*, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lain-lain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh

dewan komisaris. Hal tersebut menandakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik, sehingga masalah agensi dapat ditekan dan tujuan yang ingin dicapai oleh bank dapat tercapai. Namun begitu ukuran *board of director* yang besar kurang efektif untuk melakukan koordinasi, dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk melakukan koordinasi (James dan Joseph 2015).

Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) yang meneliti 30 bank di Bangladesh, penelitian Adams dan Mehran (2012) yang meneliti 35 Bank Holding Company dan penelitian Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang meneliti 25 bank di Bangladesh 2003-2011 menemukan bahwa jumlah *board of director* (komisaris) mempengaruhi kinerja keuangan bank. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah

Masalah agensi yang disebabkan karena *asymetric information* antara pemilik dana dengan manajemen dapat memicu bank syariah untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah karena adanya dewan pengawas syariah yang baik, memiliki pengawasan yang baik sehingga diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan *bargaining power* yang dimiliki untuk mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri.

Menurut Muttakin dan Ullah (2012), semakin banyak anggota dewan pengawas syariah akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik. Semakin banyak anggota dewan pengawas syariah

maka pengawasan yang dilakukan akan lebih baik sehingga tingkat kepatuhan syariah bank syariah menjadi lebih baik. Adanya pengawasan yang baik akan menurunkan masalah agensi yang dilakukan oleh manajemen bank syariah, dengan berkurangnya masalah agensi maka kinerja *maqasid syariah* bank syariah menjadi lebih baik.

Keberadaan dewan pengawas syariah adalah untuk memonitoring ketaatan bank syariah terhadap syariah Islam sehingga diharapkan dapat menekan masalah agensi yang pada akhirnya akan mengakibatkan kinerja bank syariah menjadi lebih baik. Penelitian Mollah dan Zaman (2015) menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis berikut:

H2: Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

Komite Audit dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah

Tugas pokok dari komite audit menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 42 ayat 1 adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal dan kecukupan proses pelaporan keuangan. Selain itu pada ayat 2 juga disebutkan bahwa komite audit juga memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Hal tersebut menandakan bahwa komite audit secara tidak langsung juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam. Menurut Al Matari *et al.* (2012), komite audit juga melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang *reliable* (terpercaya) bagi *stakeholder*. Informasi yang *reliable* dan transparansi dalam laporan keuangan ini penting karena hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk dapat mencapai tujuan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari

maqasid syariah. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya komite audit maka tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Menurut Bouaziz (2012), perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan menyediakan sumber daya yang lebih banyak pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan akuntansi dan keuangan. Sementara itu Al Matari *et al.* (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit yang lebih banyak dapat meningkatkan pengetahuan yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Penelitian Al Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman dan Sam'ani (2008) yang meneliti bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Berdasar urain di atas, dirumuskan hipotesis berikut:

H4: Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah

METODA PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut (1) Menyajikan laporan keuangan lengkap di *website* masing-masing bank syariah selama tahun 2010 sampai 2014, (2) Menyajikan laporan *good corporate governance* di *website* masing-masing bank syariah selama tahun 2010 sampai 2014. Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 7 bank umum syariah yang memenuhi kriteria dengan periode pengamatan selama 5 tahun maka total sampel adalah 35. Proses pemilihan sampel disajikan pada Tabel 1.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan

good corporate governance. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari *website* bank syariah terkait.

Tabel 1: Proses pemilihan sampel

Keterangan	Jumlah Bank
Jumlah Bank Umum Syariah	11
Tidak menyajikan laporan tahunan lengkap selama 5 tahun berturut-turut	4
Tidak menerbitkan laporan GCG selama 5 tahun berturut-turut	3
Jumlah sampel per tahun	7

Sumber : Data diolah, 2015

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja *maqasid syariah* bank syariah, sedangkan variabel independennya terdiri dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit.

Pengukuran kinerja merupakan proses menentukan apakah organisasi mencapai tujuannya (Rouse dan Puterill 2003). Kinerja *maqasid syariah* bank syariah dapat didefinisikan sebagai tingkat bank syariah dalam mencapai tujuan syariah Islam (*maqasid syariah*). Kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada penelitian ini mengambil pengukuran yang dikembangkan oleh Mohammed, Razak dan Taib (2008). Adapun langkah-langkah dalam pengukuran kinerja *maqasid syariah* adalah sebagai berikut:

- Mengukur rasio-rasio yang mewakili setiap elemen dari tujuan bank berbasis *maqasid syariah*. Elemen-elemen dan rasio tersebut disajikan dalam Tabel 2.
- Mengalikan hasil pengukuran rasio dengan bobot masing-masing elemen. Bobot masing-masing elemen dapat dilihat dalam Tabel 3.
- Hasil dari langkah b dijumlahkan sesuai dengan klasifikasi elemen menurut tujuan.
- Hasil dari langkah c dikalikan dengan bobot menurut tujuan.
- Menjumlahkan seluruh hasil dari langkah d.

Tabel 2 : Operasionalisasi Rasio Pengukur Kinerja

Konsep (tujuan)	Dimesi	Elemen	Rasio Kinerja
Mendidik Individu	Kemajuan Pengetahuan	Bantuan Pendidikan	R1. Bantuan pendidikan / total biaya
	Peningkatan Keahlian Meningkatkan Kesadaran akan Bank syariah Islam	Penelitian Pelatihan	R2. Biaya penelitian/total biaya R3. Biaya pelatihan/total biaya
	Kontrak yang Adil	Publikasi	R4. Biaya promosi/total biaya
	Jasa dan Produk yang Terjangkau	<i>Fair Return</i>	R5. Laba bersih/total pendapatan
Membangun Keadilan	Menghilangkan Ketidakadilan	Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan & piutang bersih/ Total pembiayaan & piutang
	Profitabilitas	Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
	Distribusi Pendapatan dan Kesesjahteraan	Rasio laba	R8. Laba bersih/total asset
Kepentingan Publik	Investasi dalam Sektor Riil	Pendapatan individu	R9. Zakat/ laba bersih
		Rasio investasi di sektor riil	R10. Total investasi sektor riil/ total asset

Sumber : Mohammed, Razak dan Taib (2008)

Tabel 3 : Bobot Masing-Masing Tujuan dan Elemen

Tujuan	Bobot Tujuan (%)	Elemen	Bobot Elemen (%)
T1.Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Training	26
		E4. Publikasi	23
		Total	100
T2. Keadilan	41	E5. <i>Fair Return</i>	30
		E6. <i>Fair Price</i>	32
		E7. Produk bebas bunga	38
		Total	100
T3.Kesejahteraan	29	E8. Rasio laba	33
		E9. Transfer Pendapatan	30
		E10. Rasio Investasi sektor riil	37
Total	100	Total	100

Sumber : Mohammed, Razak dan Taib (2008)

Menurut Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dari jumlah anggota dewan komisaris.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum

syariah dan unit usaha syariah, Dewan pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan pegawai syariah.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh direksi atas persetujuan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab menilai kecukupan pengendalian internal, kecukupan proses pelaporan keuangan dan

mengevaluasi tindak lanjut direksi atas temuan audit dan/atau rekomendasi dari Bank Indonesia, auditor internal, dewan pengawas syariah dan auditor eksternal. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota komite audit.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterodeksitas, serta pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$KINERJA = \alpha + \beta_1KOMIS + \beta_2DPS + \beta_3KOMIT + \varepsilon$$

Keterangan :

KINERJA= Kinerja *maqasid syariah* bank syariah

KOMIS = Jumlah anggota dewan komisaris

DPS = Jumlah anggota dewan pengawas syariah

KOMIT = Jumlah anggota komite audit

α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
 ε = Error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik

Statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun independen disajikan pada Tabel 4. Hasil uji asumsi klasik masing-masing disajikan pada Tabel 5 untuk uji normalitas dengan kolmogorov smirnov, Tabel 6 untuk uji multikolinearitas, dan Tabel 7 untuk uji heterodeksitas. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia paling baik sebesar 36,09 dan paling rendah 25,99. Dilihat dari variable independen data maksimum paling besar dimiliki oleh jumlah anggota komisaris sebanyak 6 orang sementara paling rendah jumlah dewan pengawas syariah sebanyak 3 orang. Sementara rata-rata jumlah anggota untuk dewan pengawas syariah, komisaris dan komite audit masing-masing 2,48, 4,17 dan 3,40.

Tabel 4: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Nama Variabel	Jumlah Data	Data Minimum	Data Maksimum	Rata-rata	Std. Deviation
Kinerja <i>maqasid syariah</i> bank syariah	35	25,99	36,09	31,62	1,83
Jumlah DPS	35	2,00	3,00	2,48	0,55
Jumlah Komisaris	35	3,00	6,00	4,17	1,43
Jumlah anggota komite audit	35	2,00	5,00	3,40	0,81

Sumber : Data diolah, 2015

Tabel 5: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
N	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean ,0000000
	Std. Deviation 1,60360349
Most Extreme Differences	Absolute ,072
	Positive ,072
	Negative -,063
Kolmogorov-Smirnov Z	,427
Asymp. Sig. (2-tailed)	,993

Sumber : Data diolah, 2015.

Tabel 6: Hasil Uji Multikolinearitas

Nama Variabel	Tolerance	VIF
DPS	.742	1.348
KOMIS	.620	1.612
KOMIT	.796	1.256

Sumber : Data diolah, 2015.

Tabel 8: Hasil Uji Heterodeksitas

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,258	,652		3,461	,002
DPS	-,494	,252	-,389	-1,963	,059
KOMIT	,008	,160	,010	,049	,961
KOMIS	,023	,097	,054	,241	,811

Sumber : Data diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel 5, 6 dan 7, maka dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. Oleh karena itu pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda dapat dilakukan.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda disajikan pada Tabel 8. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 8, menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris (KOMIS) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah pada tingkat signifikan 5%. Hasil ini sejalan dengan penelitian Adams dan Mehran (2012), Muttakin dan Ullah (2012), dan Hoque, Islam dan Ahmed (2012) yang mengukur kinerja bank dengan profitabilitas. Hal ini menan-

dakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris akan semakin baik kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Hasil analisis regresi untuk variabel dewan pengawas syariah (DPS) menunjukkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah dewan pengawas yang banyak tidak dapat mendorong kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena dari statistik deskriptif, rata-rata jumlah anggota dewan pengawas syariah hanya sebesar 2,48 jauh di bawah rata-rata jumlah dewan komisaris yang nilai rata-ratanya sebesar 4,18. Rata-rata jumlah dewan pengawas syariah yang masih sedikit ini kemungkinan menjadikan peran dewan pengawas syariah yang belum maksimal sehingga belum mampu mendorong kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Tabel 8: Hasil Analisis Regresi Berganda

Keterangan	Prediksi	B	t-statistik	Sig-t	Kesimpulan
Constant		34,953	20,773	,000	
KOMIS	-	,651	2,136	,041	Ha1 didukung
DPS	-	-,991	-1,503	,143	Ha2 tidak didukung
KOMIT	-	-1,025	-2,691	,011	Ha3 tidak didukung

Adjusted R Square = ,163
F =3,203 ; sig-F =,037

Sumber : Data diolah (2015)

Menurut Umam (2015), di Indonesia terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain serta terdapat dewan pengawas syariah yang menjadi dewan syariah nasional. Adanya beberapa dewan pengawas syariah yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah di lembaga keuangan lain serta menjabat sebagai dewan syariah nasional menandakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah di Indonesia masih sedikit. Selain itu, rangkap jabatan tersebut dapat mengurangi tingkat pengawasan yang dilakukan dewan pengawas syariah, sehingga keberadaan dewan pengawas syariah belum mampu mendorong peningkatan kinerja bank syariah.

Pada tingkat signifikansi 5%, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit (KOMIT) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah tidak didukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al-Matari, *et al.* (2012) yang meneliti perusahaan di Arab Saudi. Hal tersebut menandakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka kinerja *maqasid syariah* bank syariah justru akan semakin baik.

Hasil analisis tersebut menunjukkan temuan yang berlawanan antara pengujian hipotesis tentang jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/209 beberapa hal yang menjadi tugas dan wewenang dewan komisaris antara lain melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank syariah. Dilihat dari wewenang dan tanggung jawab tersebut dewan komisaris lebih banyak bertugas terkait dengan pembuatan keputusan yang tidak terstruktur (misal keputusan arah rencana strategis bank syariah), sehingga untuk dapat menjalankan tugas tersebut memerlukan lebih banyak jumlah anggota dewan komisaris. Menurut

Muttakin dan Ullah (2012), semakin besar jumlah anggota *board* akan menyediakan pengetahuan, keahlian, kepakaran dan jaringan profesional dan sosial yang lebih baik, oleh karenanya proses pembuatan keputusan akan menjadi lebih baik. Adanya pengetahuan dan keahlian yang lebih baik juga akan meningkatkan tingkat pengawasan, pembuatan keputusan strategis dan pemberian nasihat dewan komisaris terhadap direksi bank syariah sehingga memungkinkan penekanan terhadap masalah agensi.

Sementara itu, menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/209 komite audit memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain melakukan evaluasi pengendalian internal, melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik, melakukan evaluasi pelaksanaan audit internal, melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan bank Indonesia, DPS, dan/atau auditor eksternal. Dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya, komite audit lebih banyak membuat keputusan yang terstruktur dimana pedoman pembuatan keputusan cukup jelas. Misalkan tugas evaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan DPS, keputusan yang diambil terbatas pada apakah management bank syariah sudah melakukan perbaikan atas temuan DPS atau belum, sehingga dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya jumlah anggota komite audit akan lebih baik jika jumlahnya sedikit. Jumlah anggota komite audit yang banyak dapat memungkinkan terciptanya perdebatan yang tidak diperlukan dan penundaan dalam pembuatan keputusan (Ghabayen 2012). Hal ini dapat terjadi karena pembuatan keputusan oleh komite audit lebih pada pembuatan keputusan yang terstruktur sehingga tidak memerlukan banyak sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *good corporate governance* yang diprosikan dengan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah dewan pengawas syariah, dan jumlah anggota komite audit terhadap kinerja *maqasid syariah* bank

syariah. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka kinerja *maqasid syariah* bank syariah akan menjadi lebih baik.

Pengujian terhadap variabel jumlah anggota komite audit menemukan hasil yang berlawanan dengan hipotesis yang dirumuskan. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit justru berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Artinya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit justru akan dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah dari pada jumlah komite audit yang besar. Sementara variabel jumlah anggota dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi bank syariah dalam penentuan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan jumlah anggota dewan pengawas syariah. Perbedaan deskripsi kerja antara dewan komisaris dan komite audit mengakibatkan kebutuhan akan jumlah anggota dewan komisaris dan komite audit menjadi berbeda. Untuk dapat mencapai kinerja *maqasid syariah* bank syariah yang baik membutuhkan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak sementara komite audit akan lebih baik dengan jumlah anggota yang sedikit.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: (1) Jumlah sampel bank yang digunakan hanya 7 bank umum syariah, belum dapat menggunakan 11 bank umum syariah yang sudah ada di Indonesia dan jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 5 tahun dari tahun 2010-2014. Hal ini dikarenakan tidak semua bank syariah di Indonesia menyajikan laporan keuangan di *website* bank syariah secara rutin. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah sam-

pel dengan menambahkan sampel bank syariah dari negara lain. (2) Pengukuran kinerja yang digunakan belum dapat memberikan pedoman tingkatan baik dan buruk kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai pengukuran kinerja *maqasid syariah* yang lebih baik. Hal yang perlu dikembangkan adalah kisaran angka kinerja *maqasid syariah* yang menunjukkan suatu bank telah mencapai *maqasid syariah* yang sangat baik, baik, cukup baik, sedang dan buruk.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, R. B, dan H. Mehran. 2012. Bank board structure and performance: Evidence for large bank holding companies. *Journal Finance Intermediation* 21 (2): 243-267.
- Al Baidhani, A. M. 2013. *The Effect of corporate governance on bank performance*. Cairo: German University in Cairo.
- Al Matari, Y. A., A. K. Al-Swidi, F. H. Fadzil dan E. M. Al Matari. 2012. Board of directors, audit committee characteristics and performance of Saudi Arabia listed companies. *International Review of Management and Marketing* 2 (4): 241-251.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009
- Bouaziz, Z. 2012. The Impact of presence audit committees on the financial performance of Tunisians companies. *International Journal of Management and Business Studies* 2 (4): 57-64.
- Faozan, A. 2013. Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam* 7 (1): 1-14.
- Ghabayen, M. A. 2012. Board characteristics and firm performance: Case of Saudi Arabia. *International Journal of Accounting and Financial Reporting* 2 (2): 168-200.

- Hoque, M. Z., M. R. Islam, dan H. Ahmed. 2012. Corporate governance and bank performance: case in Bangladesh. Available from: *Social Science Research Network* http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2208903, 1-37.
- James, B. J, dan C. Joseph. 2015. Corporate governance mechanisms and bank performance: Resource based view. *International Accounting and Business Conference 2015, IABC 2015*: 117-124.
- Jensen, M. C, dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Lehn, K., S. Patro, dan M. Zhao. 2004. *Determinants of the size and structure of corporate board 1935-2000*. (Working Paper) Pittsburgh: Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh.
- Mohammed, M. O., A. D. Razak, dan F. M. Taib. 2008. The Performance of islamic banking based on the maqasid syariah. *IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*: 1-17.
- Mollah, S, dan M. Zaman. 2015. Shariah Supervision, corporate governance, and performance: Conventional vs islamic banks. *Journal of Banking and Finance* 58: 418-435.
- Muttakin, M. B, dan M. S. Ullah. 2012. Corporate governance and bank performance: Evidence from Bangladesh. *Corporate Board: Role, Duties & Composition* 8 (1): 62-68.
- Reni, D., Muklis, dan A. Cholisni. 2014. Impact of the perception of islamic bank management on islamic bank objective to the social and economic performance using maqasid al-sharia approach. *Proceedings of Developing A Framework for Maqasid Al-Sharia-Based Index Of Socio Economic*, 415-474.
- Rouse, P, dan M. Putterill. 2003. An integral framework for performance measurement. *Management Decision* 41 (8): 791-805.
- Sam'ani. 2008. *Pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004 - 2007*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syam, D, dan T. Najda. 2012. Analisis kualitas penerapan good corporate governance pada bank umum syariah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap terhadap tingkat pengembalian dan resiko pembiayaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Keuangan* 2 (1): 195-206.
- Umam, K. 2015. Urgensi standarisasi dewan pengawas syariah dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia* 1 (2): 114-138.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jakarta.
- Zahrah, M. A. 1994. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

PENGARUH *ENTRENCHMENT EFFECT* TERHADAP KUALITAS AUDIT DAN PERAN EFEKTIFITAS KOMITE AUDIT

Herlina Tri Utami

Universitas Indonesia

e-mail: herlinatriutami@gmail.com

Vera Diyanty

Universitas Indonesia

e-mail: vera.diyanty@ui.ac.id

Abstract

This research aims to investigate the negative entrenchment effect the controlling shareholder to the audit quality and the role of audit committee effectiveness. This study argues that potential agency conflict due to the negative entrenchment effect of controlling shareholder is capable in influencing the selection of public accounting firm between big four, second tier and third tier, that will affect the audit quality. The sample of this research are the manufacturing companies which are listed in the Indonesian stock exchange from 2010 to 2013. This study gives evidence a positive influence between the negative entrenchment effects to the the selection of a high quality public accounting firm. The increasing agency conflict due to the negative entrenchment effect, the probability of selecting a high quality accounting firm is also increasing. In addition, this research also give evidence that the effectiveness of audit committee can enforce the management to the probability of selecting a high audit quality due to negative entrenchment effect

Keywords: *Entrenchment Effect, Audit committee effectiveness, Corporate Governance, Audit Quality*

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art5>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi negative entrenchment effect dari pengawasan shareholder pada kualitas audit dan peran efektifitas komite audit. Penelitian ini berpendapat bahwa potensi konflik keagenan disebabkan oleh negative entrenchment effect dari pengawasan shareholder mampu dalam mempengaruhi pemilihan kantor akuntan publik antara big four, second tier and third tier, yang akan mempengaruhi kualitas audit. Sampel dari penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Indonesian stock exchange dari tahun 2010- 2013. Penelitian ini memberikan bukti pengaruh positif antara negative entrenchment effect pada pemilihan sebuah kantor akuntan publik yang memiliki kualitas tinggi. Meningkatnya konflik keagenan disebabkan oleh negative entrenchment effect, probabilitas dari pemilihan sebuah kantor akuntan publik yang berkualitas tinggi juga meningkat. Sebagai tambahan, penelitian ini juga memberikan bukti bahwa efektifitas dari komite audit dapat melaksanakan manajemen untuk probabilitas pemilihan sebuah kualitas audit yang tinggi yang disebabkan oleh negative entrenchment effect.

Kata Kunci: *Entrenchment Effect, Audit committee effectiveness, Corporate Governance, Audit Quality*

PENDAHULUAN

Berle dan Means (1932) menjelaskan bahwa masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham terjadi akibat struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar di tangan

banyak pemegang saham (*dispersed ownership*). Dalam struktur ini, pemegang saham cenderung tidak mampu untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap tindakan manajemen sehingga kendali perusahaan

menjadi di tangan manajemen (Shleifer dan Vishny 1986). Umumnya, perusahaan dengan struktur kepemilikan tersebar banyak ditemukan di negara-negara *common law* dengan perlindungan atas *property rights* yang kuat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, ataupun Irlandia (Claessens *et al.* 2002).

Tidak seperti negara-negara *common law*, pada negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dengan perlindungan atas *property rights* yang lemah, mayoritas struktur kepemilikan perusahaannya cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir pemegang saham. Claessens dan Fan (2002) menyatakan bahwa ketika struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi di tangan segelintir pemegang saham pengendali, pemegang saham pengendali tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengarahkan berbagai kebijakan perusahaan, atau yang dikenal sebagai *entrenchment effect*. Adanya *entrenchment effect* tidak selalu menyebabkan timbulnya konflik keagenan di tubuh perusahaan. Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali akan terjadi ketika pemegang saham pengendali memilih untuk mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan pemegang saham non-pengendali tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya (Claessens dan Fan 2002). Fenomena ini disebut juga sebagai *negative entrenchment effect* (Claessens dan Fan 2002).

Claessens dan Fan (2002) menyatakan bahwa adanya *negative entrenchment effect* berpotensi untuk semakin memburuk pada perusahaan yang dikendalikan melalui mekanisme kepemilikan piramida. Hal ini dikarenakan melalui mekanisme kepemilikan piramida pemegang saham pengendali dapat memiliki hak kendali¹ yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak arus kasnya² sehingga pemegang saham pengendali dapat dengan leluasa mengekspropriasi kekayaan perusahaan tanpa harus menanggung biaya yang tinggi bila terjadi kerugian ataupun penurunan nilai perusahaan (Claessens *et al.* 2000). Untuk menutupi aktivitas ekspropriasinya, pemegang saham pengendali termotivasi

untuk menjaga agar pengungkapan laporan keuangannya tetap tidak transparan sehingga ia dapat dengan bebas melakukan tindakan ekspropriasi.

Salah satu cara yang digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk menjaga ketidaktransparansian laporan keuangannya adalah dengan menurunkan kualitas pengawasan eksternal dari kantor akuntan publik (Lin dan Liu 2009) dengan cara menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih rendah. Choi *et al.* (2007) dalam penelitiannya membuktikan adanya pengaruh negatif atas *entrenchment effect* terhadap kualitas audit. Menurut DeAngelo (1981), kualitas audit adalah probabilitas akuntan publik untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran pada sistem akuntansi klien (*error/fraud*) serta melaporkan pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, berdasarkan penelitian Fan dan Wong (2005) serta El Ghouli (2007) menemukan bahwa timbulnya potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect* ternyata berpengaruh positif terhadap pemilihan kualitas audit yang diprosikan dengan ukuran kantor akuntan publik. Menurut Fan dan Wong (2005) fenomena tersebut muncul sebagai akibat dari timbulnya motivasi pemegang saham pengendali untuk menghindari risiko peningkatkan *cost of capital*³ yang membuat perusahaan kesulitan dalam mengakses pendanaan eksternal (Claessens dan Fan 2002).

Terjadinya peningkatan *cost of capital* akan merugikan pemegang saham pengendali ketika perusahaan dihadapkan pada potensi pertumbuhan yang tinggi (Fan dan Wong 2005). Hal ini dikarenakan ketika terdapat potensi pertumbuhan yang tinggi, adanya kesulitan dalam mengakses pendanaan eksternal akan membuat perusahaan kesulitan dalam mengambil prospek bisnis yang tersedia sehingga pemegang saham pengendali menjadi tidak dapat menikmati hasil dari pertumbuhan operasi bisnisnya (Fan dan Wong 2005; El Ghouli *et al.* 2007). Hal ini akan memotivasi pemegang saham pengendali untuk menunjuk kantor akuntan publik yang berkualitas tinggi dalam memberikan *assurance* atas keandalan

laporan keuangan perusahaan (Claessens dan Fan, 2002). Penunjukan kantor akuntan publik yang memiliki kualitas audit tinggi terbukti dapat meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan keuangan di mata pemegang saham non-pengendali ataupun investor (Kim *et al.* 2002; Lennox 1999).

Dalam mekanisme pelaksanaan *corporate governance*, penunjukan auditor akan sangat dipengaruhi oleh rekomendasi dari Komite Audit dalam mendukung terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan perusahaan (Pedoman *Good Corporate Governance* Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia). Komite audit yang efektif umumnya beranggotakan atas orang-orang independen dari komunitas bisnis yang memiliki reputasi tinggi sehingga lebih peduli akan adanya risiko kerugian reputasional apabila terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan (Abbot dan Parker 2000), Simunic dan Stein (1996) menemukan bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk secara langsung mendorong akuntan publik yang telah dikontrak oleh perusahaan untuk meningkatkan ruang lingkup audit sesuai hasil analisis komite audit. Abbott dan Parker (2000) menemukan bahwa perusahaan yang komite auditnya berisikan anggota independen dengan frekuensi rapat dua kali dalam satu tahun cenderung untuk memilih akuntan publik yang berasal dari KAP Big 6.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *negative entrenchment effect* pemegang saham pengendali terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik. Penelitian ini mengacu pada penelitian Choi *et al.* (2007) serta Fan dan Wong (2005) dalam melihat pengaruh *negative entrenchment effect* pemegang saham pengendali akhir terhadap pemilihan kantor akuntan publik. Adapun pengembangan penelitian yang dilakukan adalah bahwa penelitian ini juga akan menginvestigasi pengaruh keefektifan komite audit dalam memoderasi dampak *negative entrenchment effect* terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik.

Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia karena lebih dari 50%, struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi dan pemegang saham pengendali akhir banyak memiliki hak kendali di atas hak arus kasnya (Diyanty 2012) sehingga potensi adanya *negative entrenchment effect* cukup tinggi. Potensi dari *negative entrenchment effect* ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas audit. Kualitas laporan keuangan dari suatu kualitas audit yang andal tentunya akan mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali beserta manajemen dan pemegang saham non-pengendali.

Dalam penentuan probabilitas pemilihan kantor akuntan publik, peneliti akan membandingkan keputusan pemilihan perusahaan terhadap tiga jenis golongan kantor akuntan publik yaitu kantor akuntan publik *big four*, *second tier*, dan *third tier*. Penggolongan kantor akuntan publik akan mengacu kepada pendekatan Soedibyo (2010) yang mengelompokkan kantor akuntan publik berdasarkan ukuran (*size*) dari kantor akuntan publik tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Struktur Kepemilikan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah bentuk kontrak antara *principal(s)* dan *agent(s)* dimana *agent* bertanggung jawab untuk memberikan jasa profesionalnya serta membuat keputusan mewakili kepentingan *principal*. Dalam menjalankan tugasnya, tindakan yang dilakukan *agent* tidak selamanya searah dengan kepentingan *principal*. Tindakan oportunistik itulah yang kemudian menyebabkan munculnya konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* (Berle dan Means 1983). Dalam Struktur kepemilikan yang tersebar yang hampir sebagian besar banyak terdapat pada negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris cenderung memiliki perlindungan investor yang kuat. Sedangkan sebagian besar Negara yang meng-

anut *civil law* cenderung memiliki perlindungan investor yang lemah (La Porta 2000). Dengan kondisi perlindungan investor terhadap investor yang lemah, seorang pemegang saham menjadi terinsentif untuk mendapatkan kendali yang lebih besar atas aset atau perusahaannya dengan tujuan untuk melindungi investasinya dari tindakan oportunistik manajemen. Hal inilah yang menyebabkan struktur kepemilikan menjadi terkonsentrasi.

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi apabila mayoritas kepemilikan perusahaan berada di tangan segelintir pemegang saham yang disebut sebagai pemegang saham pengendali. Terkonsentrasinya kepemilikan kemudian menyebabkan pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan baik atas arah maupun proses operasional perusahaan, hal ini dikenal juga sebagai *entrenchment effect* (Coffee 2010).

Untuk mendapatkan kendali atas perusahaan, selain melalui akuisisi langsung, Claessens dan Fan (2002) menyatakan bahwa pemegang saham dapat menggunakan dua buah mekanisme lain, yaitu mekanisme kepemilikan piramida (*pyramid ownership*) serta mekanisme lintas kepemilikan (*cross-holding*). Melalui mekanisme kepemilikan piramida, seorang pemegang saham pengendali memungkinkan untuk dapat memiliki hak kendali yang lebih besar dibandingkan dengan hak arus kas mereka. Hak kendali itu sendiri adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan⁴. Sementara hak arus kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan⁵ (Claessens *et al.* 2000).

Entrenchment effect tidak selalu menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Konflik keagenan baru akan terjadi ketika pemegang saham pengendali memilih untuk mengarahkan kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pribadinya sehingga menyebabkan pemegang saham non-pengendali tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Fenomena ini dikenal juga sebagai *negative entrenchment effect*.

Claessens dan Fan (2002) menyatakan bahwa, adanya *negative entrenchment effect* berpotensi untuk semakin memburuk pada perusahaan yang dikendalikan melalui mekanisme kepemilikan piramida. Hal ini dikarenakan melalui mekanisme kepemilikan piramida, pemegang saham pengendali dapat memiliki hak kendali yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak arus kasnya, sehingga pemegang saham pengendali dapat dengan leluasa untuk melakukan kegiatan yang tujuannya tidak searah dengan pemegang saham non-pengendali tanpa harus menanggung biaya yang tinggi bila terjadi kerugian ataupun penurunan nilai perusahaan (Claessens *et al.* 2000).

Pengaruh *Negative Entrenchment* Pemegang Saham Pengendali Akhir Terhadap Probabilitas Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Melalui mekanisme kepemilikan piramida pemegang saham pengendali dapat memiliki hak kendali yang lebih tinggi dibandingkan dengan hak arus kasnya (Claessens dan Fan 2002). Hal inilah yang memotivasi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi yang merupakan *negative entrenchment effect*. Dengan lebih tingginya hak kendali dibandingkan dengan hak arus kasnya, pemegang saham pengendali dapat dengan leluasa mengekspropriasi kekayaan perusahaan tanpa harus menanggung biaya yang tinggi bila terjadi kerugian ataupun penurunan nilai perusahaan (Claessens *et al.* 2000).

Untuk menutupi tindakan ekspropriasinya agar tidak dapat dideteksi oleh pihak eksternal dengan cara menurunkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) pada laporan keuangan perusahaannya (Fan dan Wong, 2005). Dengan adanya penurunan kualitas pengungkapan akan membuat tingkat ketidaksimetrisan informasi antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali meningkat (Choi *et al.* 2007).

Untuk menjaga tingkat ketidaksimetrisan informasi, pemegang saham pengendali mungkin termotivasi untuk menunjuk kantor akuntan publik (KAP) dengan kualitas audit yang lebih rendah dalam rangka menutupi kon-

disi finansial perusahaan yang sebenarnya (Choi *et al.* 2007). Argumen tersebut dibuktikan oleh Choi *et al.* (2007) dalam penelitian yang dilakukannya terhadap perusahaan-perusahaan publik di Korea yang menemukan adanya hubungan *negatif* antara selisih hak kendali dan hak arus kas terhadap pemilihan kualitas audit dari akuntan publik.

Namun terjadi suatu kesimpulan yang berlawanan berdasarkan hasil penelitian Fan dan Wong (2005) serta El Ghouli (2007) bahwa adanya potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect* tidak selalu berasosiasi negatif dengan pemilihan kualitas audit dari kantor akuntan publik. Fan dan Wong (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada kondisi pasar yang sedang bertumbuh, adanya konflik keagenan yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan serta naiknya *cost of capital* dipandang dapat merugikan pemegang saham pengendali, karena membuat pemegang saham pengendali kesulitan untuk mengakses pendanaan eksternal (El Ghouli 2007). Padahal, adanya pendanaan eksternal akan sangat berguna untuk menunjang pertumbuhan perusahaan, mengingat besarnya peluang bisnis yang ditawarkan oleh perekonomian pada negara-negara berkembang (Fan dan Wong 2005).

Dihadapkan pada risiko tersebut, pemegang saham pengendali mungkin termotivasi untuk mengarahkan manajemen untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit tinggi dalam rangka memitigasi timbulnya kekhawatiran pemegang saham non-pengendali akan adanya potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect*. Pendapat tersebut dibuktikan oleh Fan dan Wong (2005) dalam penelitian yang dilakukannya di Asia Timur, termasuk Indonesia yang hasilnya pada negara berkembang, kantor akuntan publik dengan kualitas audit tinggi terbukti menjadi salah satu mekanisme tata kelola yang dipilih oleh perusahaan untuk memitigasi terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali serta untuk meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan.

Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *negative entrenchment effect* akan berpengaruh terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik berdasarkan kualitas auditnya

Pengaruh Keefektifan Komite Audit Terhadap Dampak *Negative Entrenchment Effect* Pada Probabilitas Pemilihan Kantor Akuntan Publik

Komite audit yang efektif mampu menghasilkan ruang lingkup audit yang lebih luas. Seperti Simunic dan Stein (1996) yang menemukan bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk secara langsung mendorong akuntan publik yang telah dikontrak oleh perusahaan untuk meningkatkan ruang lingkup audit sesuai hasil analisa komite audit. Lalu Knapp (1991) yang menemukan bahwa komite audit memiliki kemampuan untuk memitigasi adanya ancaman pemutusan kontrak akuntan publik serta pembatasan ruang lingkup audit oleh manajemen.

Berbagai temuan di atas mengindikasikan bahwa tingkat keefektifan komite audit mampu mempengaruhi keleluasaan pemegang saham pengendali dalam memanipulasi laporan keuangan dan secara tidak langsung insentif atas *negative entrenchment effect*. Argumen ini dibuktikan oleh Sharma *et al.* (2011) yang menemukan adanya hubungan positif antara *audit client importance* dengan *earning management* semakin diperlemah ketika komite audit perusahaan efektif. Mengacu pada penjelasan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Efektifitas komite audit akan mempengaruhi dampak *negative entrenchment effect* terhadap probabilitas pemilihan KAP berdasarkan kualitas auditnya.

METODA PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Data diperoleh dari

Laporan Tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), *Datastream Thomson Reuters* di Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PDEB-FEUI) serta *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Untuk penelusuran struktur kepemilikan dilakukan dengan menggunakan data akte pendirian persero yang didapatkan dari Departemen Hukum dan Hak Kemanusiaan Republik Indonesia.

Populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2013. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan agar sampel yang didapatkan dapat merepresentasikan penelitian yang dilakukan. Kriteria yang ditetapkan oleh peneliti adalah: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tanggal 31 Desember 2010 hingga 31 Desember 2012 (tidak pernah *delisting*, suspensi saham ataupun *go private*). 2) Perusahaan yang data kepemilikan sahamnya dapat dilakukan penelusuran hingga ke pemegang saham pengendali akhir dan dapat diukur besaran *entrenchment effect*nya. 3) Perusahaan yang nilai ekuitasnya tidak negatif. 4) Perusahaan yang memiliki seluruh komponen yang diperlukan untuk pengukuran variabel-variabel di dalam model penelitian ini. 5) Perusahaan tidak terkatagori Asing Tapi Indonesia (ASTINDO) yaitu perusahaan yang pada awal pendiriannya dimiliki oleh keluarga tetapi kemudian mengalami perubahan kepemilikan menjadi kepemilikan asing di tahun-tahun berikutnya dengan kendali masih di keluarga yang sama. 6) Perusahaan yang memiliki seluruh komponen yang diperlukan untuk pengukuran variabel-variabel di dalam model penelitian ini.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut diperoleh total sampel dalam penelitian ini setiap tahunnya masing-masing sebanyak 77 perusahaan selama 4 tahun (2010-

2013). Tabel 1 berikut menyajikan jumlah sampel berdasarkan jenis kepemilikan saham.

Tabel 1: Sampel Penelitian Operasionalisasi Variabel

Kepemilikan Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Prosentase
Asing	38	49%
Keluarga	37	48%
Pemerintah	2	3%

Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas audit diproksikan menggunakan ukuran kantor akuntan publik. Proksi ini sesuai dengan penelitian DeAngelo (1981) yang menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran dengan kualitas audit dari sebuah kantor akuntan publik, yang artinya semakin besar ukuran kantor akuntan publik semakin tinggi pula kualitas audit dari kantor akuntan publik tersebut dan sebaliknya semakin kecil ukuran kantor akuntan publik semakin rendah pula kualitas audit dari kantor akuntan publik tersebut.

Mengacu pada penelitian Soedibyo (2010), pada penelitian ini ukuran dari kantor akuntan publik akan dibagi menjadi 3 golongan dengan detail sebagai berikut: a) Golongan satu, yaitu KAP *third tier* dengan jumlah staff profesional <100 orang. b) Golongan dua, yaitu untuk KAP *second tier* dengan jumlah staff profesional antara 100 – 400 orang. c) Golongan tiga, yaitu untuk KAP besar (Big four) dengan jumlah staff profesional >400.

Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *cash flow leverage*. Variabel *cash flow leverage* merupakan rasio hak kendali dibandingkan dengan hak arus kas. Mengacu pada penelitian Diyanty (2012), *cash flow leverage* digunakan sebagai proksi *negative entrenchment effect* pemegang saham pengendali akhir berupa insentif ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham non-pengendali.

$$\text{Cash Flow Leverage} = \frac{\text{Hak Kendali}}{\text{Hak Arus Kas}}$$

Menurut Claessens *et al.* (2000), definisi pengendali akhir adalah pemegang saham dengan hak kendali yang sangat besar sehingga dapat mempengaruhi arah kebijakan perusahaan dan tidak dikontrol oleh pihak luar. Dalam menghitung *cash flow leverage* perlu dihitung terlebih dahulu hak kendali dan hak arus kasnya.

Menurut La Porta *et al.* (1999) hak arus kas terdiri dari hak arus kas langsung dan hak arus kas tidak langsung. Hak arus kas langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri. Hak arus kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase kepemilikan pemegang saham pengendali akhir dalam setiap rantai kepemilikan (LaPorta *et al.* 1999).

$$\text{Hak arus kas} = \text{Hak arus kas langsung} + \text{Hak arus kas tidak langsung}$$

Menurut La Porta *et al.* (1999) hak kendali terdiri atas hak kendali langsung dan hak kendali tidak langsung. Hak kendali langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya sendiri pada perusahaan-perusahaan. Hak kendali tidak langsung adalah penjumlahan hak kendali minimum (*the weakest link*) pada setiap rangkaian kepemilikan.

$$\text{Hak kendali} = \text{Hak kendali langsung} + \text{Hak kendali tidak langsung}$$

Variabel Moderasi

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah efektivitas komite audit. Pengukuran efektivitas komite audit menggunakan metode *scoring* Hermawan (2009) yang mencakup pengukuran independensi, aktivitas, serta kompetensi. Perhitungan skor berdasarkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun

mengacu pada pertanyaan yang dibuat oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) serta modifikasi yang pernah dilakukan oleh Hermawan (2009) mengacu pada literatur yang mendukung penelitian ini. Untuk setiap pertanyaan, penilaian akan terdiri atas 2 kemungkinan jawaban, yaitu *Good* dan *Poor*, dan 3 kemungkinan jawaban, yaitu *Good*, *Fair*, dan *Poor*. Jawaban *Good* diberi nilai 3, *Fair* diberi nilai 2, dan *Poor* diberi nilai 1. Untuk pertanyaan yang tidak dapat diperoleh informasinya dari laporan tahunan perusahaan, maka akan diberi jawaban *Poor* (nilai 1). Maksimum skor yang bisa didapatkan oleh sebuah perusahaan adalah 33.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari *financial leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, potensi pertumbuhan dan jumlah komisaris independen.

Financial leverage

Financial leverage dihitung dari total utang dibagi dengan total aset. Rasio ini mengukur seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dilihat dari sisi hutang/pinjaman. Semakin besar rasio *financial leverage* maka semakin besar pula ketergantungan perusahaan terhadap kreditur dan semakin besar pula biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Berbagai penelitian terdahulu menemukan hasil yang cukup beragam berkenaan dengan pengaruh *leverage* terhadap pemilihan kantor akuntan publik (Grossman dan Hart 1982).

Ukuran perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan (*size*) dihitung berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan (Faccio *et al.* 2001). Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan pemilihan kantor akuntan publik, seperti Willenborg (1999) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar umumnya lebih kompleks sehingga membutuhkan proses audit yang lebih kompleks dengan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi yang lebih tinggi.

Kedua sumber daya tersebut dapat ditemukan pada kantor akuntan publik dengan ukuran yang lebih besar.

Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA). Profitabilitas perusahaan diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap kemungkinan dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi. Berikut adalah formula yang digunakan untuk menghitung ROA perusahaan setiap tahunnya.

$$ROA_{it} = \frac{Net\ Income_{it}}{Total\ Asset_{it}}$$

Likuiditas (CURR)

CURR merupakan proksi yang menggambarkan tingkat likuiditas perusahaan. CURR dihitung dari *total current asset* dibagi dengan *total sasset perusahaan*. Mengacu pada hasil penelitian Copley dan Douhett (2002), peneliti akhirnya memperkirakan bahwa peningkatan likuiditas akan menyebabkan dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih rendah.

$$CURR_{it} = \frac{Current\ Asset_{it}}{Total\ Asset_{it}}$$

Potensi Pertumbuhan (ATURN)

ATURN merupakan proksi yang menggambarkan potensi pertumbuhan perusahaan. ATURN dihitung dari *total sales* dibagi dengan *total asset* perusahaan. Lin dan Liu 2009; dan Anderson *et al.* 2004 membuktikan adanya bahwa seiring dengan meningkatnya potensi growth perusahaan perusahaan cenderung menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi.

Jumlah Komisaris Independen

O’Sulliva (2000) mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara proporsi komisaris independen terhadap kualitas audit. Selain itu Beasley dan Petroni (2001) juga mengemukakan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen semakin tinggi kemungkinan dipilihnya akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi. Tabel 2 berikut menyajikan operasionalisasi variable penelitian.

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel

Variabel Dependen	
$Ln \frac{P(KAP_i \leq m)}{P(KAP_i > m)}$	Probabilita (P) dipilihnya KAP dengan ukuran lebih rendah dibandingkan dengan KAP dengan ukuran lebih tinggi
Variabel Independen	
CFL_{it}	Cash Flow Leverage = hak kendali dibagi dengan hak arus kas pemegang saham pengendali akhir
Variabel Moderasi	
EFKOMAUD_{it}	Prosentase score efektivitas komite audit tahun berjalan ($Score_{it}/Max\ Score$)
Variabel Kontrol	
LEV_{it}	Leverage Perusahaan ($Total\ Debt_{it}/Total\ Asset_{it}$)
SIZE_{it}	Ukuran Perusahaan ($Ln\ Total\ Asset_{it}$)
ROA_{it}	Return on assets perusahaan ($Net\ Income_{it}/Total\ Asset_{it}$)
CURR_{it}	Likuiditas _{it} ($Current\ Asset/Total\ Asset$)
ATURN_{it}	Potensi Pertumbuhan ($Total\ Sales_{it}/Total\ Asset_{it}$)
KOMINDEP_{it}	Jumlah komisaris independen _{it}

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisa data kuantitatif menggunakan metode *ordered logistic regression* dengan pendekatan *maximum likelihood estimation* (MLE). Data penelitian ini akan berbentuk data panel karena berupa gabungan antara data *cross section* (perusahaan) dan *time series* (tahun). Adapun model penelitian yang akan digunakan adalah:

$$\ln \frac{P(KAP_i \leq m)}{P(KAP_i > m)} = \alpha_m - \beta'x$$

Di mana:

$$\begin{aligned} \beta'x = & \beta_0 + \beta_1CFL_{it} + \beta_2EFEKOMAUD_{it} \\ & + \beta_3EFEKOMAUD_{it} \\ & * WEDGE_{it} + \beta_4LEV_{it} \\ & + \beta_5SIZE_{it} + \beta_6ROA_{it} \\ & + \beta_7CURR_{it} \\ & + \beta_8ATURN_{it} \\ & + \beta_9KOMINDEP_{it} + \epsilon_{it} \end{aligned}$$

* α_m = *Cutoff Point*

*** m = *katagori KAP (1 – 2)*

** β_0 =*Intercept*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh rata-rata sekitar 49% perusahaan terbukti dikendalikan oleh keluarga. Cukup tingginya prosentase keluarga sebagai pemegang saham pengendali

akhir menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga cukup dominan di Indonesia.

Berdasarkan data pada tabel 3 terlihat bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki hak kendali yang melebihi hak arus kas. Hal ini mencerminkan adanya potensi negative entrenchment effect yang cukup besar dari pemegang saham pengendali.

Berkenaan dengan penunjukkan kantor akuntan publik, pada tabel 4 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2010 sampai pada tahun 2013, dari total 308 sampel perusahaan, 131 diantaranya memilih untuk menunjuk kantor akuntan publik *second tier*, 122 diantaranya memilih untuk menunjuk kantor akuntan publik *Big four*, dan sisanya memilih untuk menunjuk kantor akuntan publik *third tier*. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kantor akuntan publik *second tier* merupakan kantor akuntan publik yang mayoritas ditunjuk oleh perusahaan sampel, kemudian diikuti oleh kator akuntan publik *big four* dan terakhir kantor akuntan publik *third tier*.

Apabila dilihat dari trendnya dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik *big four* dan *second tier* terbukti mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, jumlah perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik *third tier* terbukti mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan cenderung termotivasi untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan ukuran yang lebih besar.

Tabel 3: Statistik Deskriptif Variabel Cash Flow Leverage

Kepemilikan Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Prosentase
Asing	38	49%
Keluarga	37	48%
Pemerintah	2	3%
Jumlah	77	100%

Tabel 4: Jumlah Kantor Akuntan Publik yang Ditunjuk Perusahaan Sampel Tahun 2010 – 2013

Size KAP	2010	2011	2012	2013	Total	Rata-Rata
Third Tier	17	14	13	11	55	13.75
Second Tier	32	33	32	34	131	32.75
BIG 4	28	30	32	32	122	30.50

Tabel 5: Efektivitas Komite Audit

EFEKOMAUD	2010	2011	2012	2013
Mean	69.22%	69.58%	70.05%	72.22%
Min	36.36%	36.36%	36.36%	39.39%
Max	93.94%	87.88%	84.85%	90.91%
Median	69.70%	69.70%	72.73%	72.73%
Standart Deviasi	12.72%	12.27%	11.53%	11.48%

Data terkait efektivitas komite audit disajikan pada table 5. Efektivitas komite audit ditentukan berdasarkan rasio antara nilai yang didapatkan dari proses scoring dibandingkan dengan total maksimum nilai yang bisa didapatkan dari proses scoring. Semakin tinggi rasio efektivitas komite audit semakin efektif pula komite audit tersebut. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa selama tahun 2010 hingga tahun 2013 rasio efektivitas komite audit secara konstan mengalami peningkatan. Dari yang awalnya 69,22% meningkat menjadi 69,58% pada tahun 2011, kemudian menjadi 70,05% pada tahun 2012, lalu menjadi 72,22% pada tahun 2013. Adanya peningkatan dari rasio efektivitas komite audit menjadi sebuah indikasi bahwa rata-rata perusahaan memiliki komite audit yang semakin efektif setiap tahunnya.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh *Negative Entrenchment Effect* Pemegang Saham Pengendali Akhir Terhadap Probabilitas Pemilihan KAP Berdasarkan Kualitas Auditnya

Pengujian model penelitian ini telah melewati uji multikolinieritas, uji *proportional odds assumption* serta uji kelayakan keseluruhan model. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa pengujian *generalized ordinal logit* membagi variabel dependen menjadi dua katagori. Katagori pertama merupakan perbandingan antara probabilita dipilihnya kombinasi KAP *big four* dan *second tier* dengan probabilita dipilihnya KAP *third tier*, sementara katagori kedua merupakan perbandingan antara probabilita dipilihnya KAP *big four* dibandingkan dengan probabilitas dipilihnya KAP *non-big four*. Melalui hasil regresi antar katagori, dapat diketahui bahwa baik pada

katagori pertama maupun katagori kedua, variabel *cash flow leverage* secara konsisten memiliki koefisien positif dengan tingkat signifikansi dibawah alpha 10%. Hal ini memiliki arti bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara KAP *big four*, *second tier* dan *third tier*, peningkatan prosentase hak kendali atas hak arus kas akan secara konsisten berpengaruh terhadap dipilihnya kantor akuntan publik dengan ukuran yang lebih besar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect*, perusahaan cenderung menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemegang saham non-pengendali terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fan & Wong (2005) serta El-Ghoulet *al.*(2007).

Sesuai penelitian Claessens *et al.* (2002) yang menemukan adanya *negative entrenchment effect* umumnya dikompensasi pemegang saham non -pengendali baik dengan menurunkan nilai perusahaan ataupun dengan meningkatkan *cost of capital* perusahaan. Fan dan Wong (2005) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada kondisi pasar yang sedang bertumbuh, adanya penurunan nilai perusahaan serta peningkatan *cost of capital* dipandang dapat merugikan pemegang saham pengendali karena membuat pemegang saham pengendali kesulitan untuk mengakses pendanaan eksternal. Dihadapkan pada risiko tersebut, pemegang saham pengendali menjadi termotivasi untuk mengarahkan manajemen untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor atas kre-

dibilitas dan keandalan laporan keuangan perusahaan.

Argumen tersebut dibuktikan oleh Fan dan Wong (2005) dalam penelitian yang dilakukannya di Asia Timur, termasuk Indonesia yang hasilnya menemukan bahwa perusahaan-perusahaan dengan potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect* terbukti cenderung memilih kantor akuntan publik *big 5* dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non-big 5*. Hasil penelitian Fan dan Wong

(2005) tersebut juga dikonfirmasi oleh El-Ghoul *et al.* (2007) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa di sebagian besar negara Eropa, khususnya negara-negara selain United Kingdom, terjadinya peningkatan potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect* terbukti mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk memilih kantor akuntan publik *big four* dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non-big four*.

Tabel 6: Hasil Regresi Antar Kategori

Variabel	Partial Proportional Odds Model						
	Prediksi	Koefisien	Stand.Err	Z	P> z		
Uji Kelayakan Model							
LR chi2(9)		103.97					
Prob > chi2		0.0000					
Pseudo R2		0.2675					
Uji Hipotesa (Per Komparasi Katagori KAP)							
1	CFL		0.9920	0.3901	2.54	0.0110	**
	Efekomaud		2.4182	1.0013	2.41	0.0160	**
	Efekomaud*CFL		7.9245	2.9071	2.73	0.0060	***
	Lev	+	0.5685	1.0051	0.57	0.2860	
	Size	+	-0.1225	0.1692	-0.72	0.2345	
	Roa	+	3.9075	1.8534	2.11	0.0175	**
	Curr	-	1.3016	0.8862	1.47	0.0710	*
	Komindep	+	1.3642	0.3233	4.22	0.0000	***
	Constanta/1		2.0158	4.5412	0.44	0.6570	
	2	CFL		0.9920	0.3901	2.54	0.0110
Efekomaud			2.4182	1.0013	2.41	0.0160	**
Efekomaud*CFL			7.9245	2.9071	2.73	0.0060	***
Lev		+	-3.5515	1.0046	-3.54	0.0000	***
Size		+	0.9567	0.1473	6.49	0.0000	***
Roa		+	3.9075	1.8534	2.11	0.0175	**
Curr		-	-2.5920	0.9557	-2.71	0.0035	***
Komindep		+	0.5026	0.2274	2.21	0.0135	**
Constanta/2			-26.2549	4.0937	-6.41	0.0000	***

***signifikan pada level 1%, **signifikan pada level 5%, *signifikan pada level 10%
 1 = Probabilita KAP *Third Tier* versus KAP *Second Tier* + KAP *Big 4*
 2 = Probabilita KAP *Third Tier* + KAP *Second Tier* versus KAP *Big 4*
KAP: 1 jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik *third tier*, 2 jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik *second tier*, dan 3 jika perusahaan menggunakan kantor akuntan publik *Big 4*; **WEDGE**: hak kendali - hak arus kas; **EFEKOMAUD**: prosentase dari *score* efektivitas komite audit; **LEV**: rasio leverage perusahaan; **SIZE**: Logaritma natural dari total aset perusahaan; **ROA**: return on asset; **CURR**: current asset/total Asset; **KOMINDEP** : jumlah komisaris independen.

Secara garis besar hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi terbukti menjadi salah satu mekanisme tata kelola yang dipilih oleh perusahaan untuk memitigasi konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dan non-pengendali. Hal itu dibuktikan dari meningkatnya probabilitas dipilihnya kantor akuntan publik dengan ukuran kualitas audit yang lebih tinggi ketika *cash flow leverage* pemegang saham pengendali akhir meningkat.

Pengaruh Moderasi Keefektifan Komite Audit Terhadap Pengaruh *Negative Entrenchment Effect* pada Probabilitas Pemilihan Kantor Akuntan Publik Berdasarkan Kualitas Auditnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keefektifan komite audit secara signifikan mempengaruhi dampak *negative entrenchment effect* pada pemilihan kantor akuntan publik berdasarkan kualitas auditnya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Dhaliwal, Naiker dan Navassi (2006). Dalam hal ini adanya komite audit yang efektif mampu memperkuat motivasi pemegang saham pengendali akhir untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi. Oleh karena itu berdasarkan hasil regresi hipotesis kedua dapat didukung.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kantor akuntan publik *big four*, *second tier* dan *third tier*, dengan adanya komite audit yang efektif terbukti memperkuat probabilitas dipilihnya kombinasi kantor akuntan publik *big four* dan *second tier*. Sementara ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kantor akuntan publik *Big four* dan *non-Big four*, dengan adanya komite audit yang efektif terbukti memperkuat probabilitas dipilihnya kantor akuntan publik *Big four* dibandingkan dengan probabilitas dipilihnya kantor akuntan publik *non-Big four*.

Carcello dan Neal (2003) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ketika sebuah perusahaan mengalami kesulitan finansial, adanya komite audit yang efektif cenderung mempengaruhi munculnya opini

audit *going concern* dari akuntan publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Simunic dan Stein (1996) dalam penelitiannya juga menyimpulkan komite audit memiliki kemampuan untuk secara langsung mendorong akuntan publik yang telah dikontrak oleh perusahaan untuk meningkatkan ruang lingkup audit sesuai hasil analisa komite audit. Abbott dan Parker (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang komite auditnya berisikan anggota independen dengan frekuensi rapat dua kali dalam satu tahun cenderung untuk memilih akuntan publik yang berasal dari kantor akuntan publik Big 6. Serta, Dhaliwal, Naiker dan Navassi (2006) berhasil membuktikan bahwa adanya komite audit yang efektif mampu mempengaruhi kecenderungan atas dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit yang tinggi. Dengan demikian penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya karena memberi kesimpulan yang sama yaitu bahwa semakin efektif komite audit, maka semakin mendorong perusahaan untuk memilih KAP yang memiliki kualitas audit yang tinggi. Dengan kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat memberikan hasil audit yang berkualitas sehingga mampu melindungi pemegang saham non-pengendali dari potensi konflik keagenan dengan cara mempengaruhi pemegang saham pengendali untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit yang lebih tinggi.

Analisis Variabel Kontrol

Variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik berdasarkan kualitas auditnya, tetapi pada katagori kedua adanya peningkatan variabel *leverage* terbukti mempengaruhi dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih rendah. Hasil regresi tersebut memiliki arti bahwa ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kombinasi kantor akuntan publik *big four* dan *second tier* dengan kantor akuntan publik *third tier*, peningkatan *leverage* cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemilihan kantor akuntan publik pada sebuah perusahaan. Namun, ketika perusahaan dihadapkan pada

pilihan antara kantor akuntan publik *big four* dan *non-big four*, peningkatan *leverage* akan menyebabkan probabilita dipilihnya kantor akuntan publik *big four* lebih rendah dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non-big four*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Titman dan Trueman (1986).

Ukuran perusahaan (*size*) ternyata berpengaruh signifikan terhadap probabilita pemilihan kantor akuntan publik ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kantor akuntan publik *big four* dan *non-big four*. Hasil regresi tersebut sesuai dengan penelitian Willenborg (1999).

Untuk variabel profitabilitas (ROA) dapat dibuktikan bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan ROA maka probabilita dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi juga meningkat. Ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kantor akuntan publik *big four*, *second tier* dan *third tier*, adanya peningkatan ROA akan menyebabkan probabilita dipilihnya kombinasi kantor akuntan publik *big four* dan *second tier* lebih tinggi dibandingkan dengan probabilita kantor akuntan publik *third tier*. Lebih lanjut ketika perusahaan dihadapkan pada pilihan antara kantor akuntan publik *big four* dan *non-big four*, adanya peningkatan ROA akan menyebabkan probabilita dipilihnya kantor akuntan publik *big four* lebih tinggi dibandingkan dengan kantor akuntan publik *non-big four*. Hasil regresi ini sesuai dengan penelitian Lin dan Liu (2009).

Dari analisis regresi tersebut terbukti bahwa jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap probabilita pemilihan kantor akuntan public. Hasil regresi tersebut sesuai dengan penelitian Beasley dan Petroni (2001).

Analisis Efek Marginal

Hasil dari pengujian efek marginal menunjukkan bahwa adanya peningkatan CFL akan menyebabkan probabilita dipilihnya kantor akuntan publik *third tier* dan *second tier* menurun tetapi. Sementara untuk kantor akuntan publik *big four*, adanya peningkatan

CFL terbukti meningkatkan probabilita dipilihnya kantor akuntan publik. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan *negative entrenchment effect*, perusahaan lebih bertendensi untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi.

Berkenaan dengan variabel interaksi efektivitas komite audit dengan *negative entrenchment effect*, pengujian efek marginal menunjukkan bahwa peningkatan keefektifan komite audit akan memperkuat probabilita dipilihnya kantor akuntan publik *big four*. Sementara untuk kantor akuntan publik *third tier* dan *second tier*, peningkatan keefektifan komite audit akan memperlemah probabilita dipilihnya kedua kantor akuntan public. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keefektifan komite audit akan makin mendorong pengaruh *negative entrenchment effect* terhadap probabilita dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara *negative entrenchment effect* dengan pemilihan kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi. Dengan kata lain seiring dengan terjadinya peningkatan potensi konflik keagenan akibat *negative entrenchment effect*, probabilita dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi juga meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Fan dan Wong (2005) serta El-Ghoulet *et al.* (2007).

Mengacu pada penelitian Fan dan Wong (2005), ditemukannya pengaruh positif antara *negative entrenchment effect* terhadap probabilitas pemilihan kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi dapat dilandasi oleh argumen bahwa, pada kondisi pasar yang sedang bertumbuh, adanya konflik keagenan yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan serta naiknya *cost of capital* akan merugikan pemegang saham pengendali karena membuat pemegang saham pengendali kesulitan dalam mengakses pendanaan eksternal (El Ghoulet *et al.* 2007). Oleh karena itu

pemegang saham pengendali cenderung termotivasi untuk mengarahkan perusahaan untuk menunjuk kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan akses terhadap pendanaan eksternal.

Peningkatan keefektifan komite audit terbukti memperkuat pengaruh *negative entrenchment effect* terhadap probabilitas dipilihnya kantor akuntan publik dengan kualitas audit lebih tinggi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagai salah satu organ pengawasan internal, komite audit yang efektif terbukti mampu untuk melindungi pemegang saham non-pengendali dari potensi tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Rentang sampel pada penelitian ini hanya meliputi tahun 2010 hingga 2013 dan terbatas pada industri manufaktur. Penggunaan data sampai dengan tahun 2013 dan hanya industri manufaktur dikhawatirkan tidak cukup mencerminkan kondisi seluruh perusahaan publik yang sebenarnya saat ini. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa mencakup seluruh industri. 2). Penelusuran struktur kepemilikan tidak dilakukan terhadap perusahaan asing, sehingga terdapat risiko bahwa ketika perusahaan asing tersebut ternyata merupakan afiliasi dari pemegang saham pengendali akhir, peneliti tidak memasukkan hak kendali dan hak arus kas perusahaan asing tersebut ke dalam proses penghitungan hak kendali dan hak arus kas pemegang saham pengendali akhir. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sudah dapat ditemukan sumber data untuk penelusuran kepemilikan asing sehingga dapat diketahui siapa yang mengendalikan perusahaan asing tersebut. 3). Mengacu pada literatur sebelumnya, penelitian ini berfokus pada ukuran kantor akuntan publik (*big four, second tier, third tier*) sebagai proksi kualitas audit. Namun dalam praktiknya kualitas audit tidak hanya dapat ditentukan berdasarkan besarkecinya kantor akuntan publik. Dapat terjadi

fenomena dimana sebuah perusahaan menunjuk kantor akuntan publik dengan ukuran yang lebih kecil tanpa dilandasi oleh motivasi untuk menutupi adanya tindakan ekspropriasi. Di harapkan pada penelitian selanjutnya dapat digunakan proksi kualitas audit yang lebih komprehensif.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi regulator maupun investor. Hasil penelitian ini mampu mendorong regulator untuk memperkuat aturan dalam pelaksanaan audit sehingga kualitas audit terjaga dari dampak *negative entrenchment effect* sehingga kepentingan pemegang saham non pengendali atau minoritas terlindungi. Bagi Investor, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor untuk lebih *concern* terhadap auditor dari laporan keuangan *investee* sehingga bisa memprediksi kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan dimana mereka berinvestasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abbot, J., dan S. Parker. 2000. Auditor selection and audit committee characteristic. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 19 (2): 47-66.
- Abbot, J. L., S. Parker, G. Peters, dan K. Raghunandan. 2003. The association between audit committee characteristic and audit fees. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 22 (22): 17-32.
- Anderson, U., K. Kadous, dan L. Koonce. 2004. The role of incentives to manage earnings and quantification in auditors' evaluations of management-provided information. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 23 (1): 11-27.
- Beasley, M., dan K. Petroni. 2001. Board independence and audit firm type. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* 2 (1): 97-114.
- Berle, A., dan G. Means. 1932. *The Modern Corporation and Private Property*. New York: MacMillan.

- Carcello, J., dan T. Neal. 2000. Audit committee composition and auditor reporting. *The Accounting Review* 75 (4): 453-467.
- Carcello, J., dan T. Neal. 2003. Audit committee characteristics and auditor dismissals following “new” going concern reports. *The Accounting Review* 78 (1): 95-117.
- Choi, J., S. Kwak, dan H. Yoo. 2007. The association between audit fees and the ownership structure. *Seoul Journal of Bussiness* 13 (2): 83-103.
- Claessens, S., S. Djankov, J. Fan, dan L. Lang. 2000. The separation of ownership and control in East Asian Corporation. *Journal of Financial Economics* 58 (1-2): 81-112.
- Claessens, S., S. Djankov, J. Fan, and L. Lang. 2002. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings. *Journal of Finance* 57 (6): 2741–2771.
- Claessens, S., J. Fan. 2002. Corporate governance in Asia: A survey. *International Review of Finance* 3 (2): 71-103.
- Copley, P. A., dan E. B. Douthett. 2002. The association between auditor choice, ownership retained, and earnings disclosure by firms making initial public offerings. *Contemporary Accounting Research* 19 (1): 49–75.
- Coffee, C. J. 2010. Dispersed ownership: the theories, the evidence, and the enduring tension between lumpers and splitters. *Columbia Law and Economics Working Paper*. Number 363.
- Dhaliwal, D., V. Naiker, dan F. Navissi. 2006. Audit committee financial expertise, corporate governance and accruals quality: An empirical analysis. Working Paper: University of Arizona (May).
- DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics* 3 (3): 183-199.
- Diyanty, V. 2012. Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi dan kualitas laba. (Unpublished Dissertation). Program Pascasarjana Akuntansi, Universitas Indonesia, Depok.
- El Ghoul, S., O. Guedhami, C. Lennox, dan A. Pittman. 2007. Ownership structure, agency problem, and auditor choice : Evidence form Western European Firms. http://www.apjfs.org/2007/report/311_guedhami2.pdf (diakses 15 Juni 2015).
- Fan, J. P. H., dan T. J. Wong. 2005. Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? evidence from East Asia. *Journal of Accounting Research* 43 (1): 35-72.
- Hermawan, A. A. 2010. Pengaruh efektifitas fewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. Unpublished Dossertation, FE UI Graduate Program in Accouting.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Kim, J. B., C. K. Min, dan C. H. Yi. 2002. Auditor designation, auditor Independence, and Earnings Management: Evidence from Korea. *Working Paper, Hong Kong Polytechnic University and Hankuk University of Foreign Studies*
- Knapp, M. C. 1991. Factors that audit committee members use as surrogates for audit quality. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 10 (1) : 35–52.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, dan R. W. Vishny. 1999. Corporate

- ownership around the world. *Journal of Finance* 54 (2): 471-517.
- La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, dan R. W. Vishny. 2000. Investor protection and corporate governance. *Journal of Financial Economics* 58 (1-2): 3-27.
- Lennox, C. 1999. Audit quality and auditor size: An evaluation of reputation and deep pockets hypotheses. *Journal of Business Finance & Accounting* 26 (7/8): 779-805.
- Lin, J. Z., dan M. Liu. 2009. The impact of corporate governance on auditor choice: Evidence from China. *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation* 18 (1): 44-59.
- O'Sullivan, N., 2000. The impact of board composition and ownership on audit quality: evidence from large UK companies. *The British Accounting Review* 32 (4): 397-414.
- Sharma, V. D., D. S. Sharma, dan U. Ananthanarayanan. 2011. Client importance and earnings management: The moderating role of audit committees. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory* 30 (3):125-156.
- Shleifer, A., dan R. W. Vishny. 1986. Large shareholders and corporate control. *The Journal of Political Economy* 94 (3): 461-488.
- Simunic, D. A., dan M. T. Stein. 1996. The impact litigation risk on audit pricing: A review of the economics and the evidence. *Auditing: Journal of Practice and Theory* 15: 119-134.
- Soedibyo, A. N. 2010. Peran nutrient information dan information consciousness dalam memoderasi hubungan antara job satisfaction dan turnover intention di Kantor Akuntan Publik. Unpublished Thesis, Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
- Titman, S., dan B. Trueman. 1986. Information quality and the valuation of new issues. *Journal of Accounting and Economics* 8 (2): 159-172.
- Willenborg, M. 1999. Empirical analysis of the economic demand for auditing in the initial public offerings market. *Journal of Accounting Research* 37 (1): 225-239.

¹ Hak kendali adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting

² Hak arus kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan

³ Penurunan *cost of capital* terjadi ketika perusahaan mampu mendapatkan pinjaman (*debt*) dengan bunga yang lebih rendah dan ketika perusahaan mampu menjual saham dengan harga yang lebih mahal (Lin & Liu, 2009)

⁴ Hak kendali (*control right*) terdiri dari hak kendali langsung dan hak kendali tidak langsung. Hak kendali langsung adalah prosentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya sendiri. Sementara hak kendali tidak langsung adalah penjumlahan atas hak kendali minimum dalam setiap rantai (La Porta et al, 1999).

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA: PERSPEKTIF ISMORFISMA INSTITUSIONAL

Hafiez Sofyani*

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
e-mail: hafiez.sofyani@umy.ac.id

Rusdi Akbar

Prodi Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Indonesia
e-mail: rusdi.aknar@ugm.ac.edu

Abstract

The purpose of this study is to examine the association of individual characteristics of local government toward the implementation of performance measurement systems (PMS). In addition, this study will also investigate the institutional isomorphism phenomenon which occurs related to the PMS implementation. The study employs a mixed methods approach i.e. two-stage sequential explanatory. The first stage was hypothesis testing using Structural Equation Modeling (SEM), and the second stage using deductive thematic analysis. The study find that self-efficacy and conscientiousness trait associated with PMS implementation. Then, PMS implementation is triggered and triggering different isomorphism phenomenon i.e. coercive, mimetic and normative.

Keywords: *Employee Characteristics, Performance Measurement System, Institutional Isomorphism*

<http://dx.doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan karakteristik pemerintah daerah menuju penerapan performance measurement systems (PMS). Penelitian ini juga menginvestigasi fenomena isomorfisma institusional yang berhubungan dengan penerapan PMS. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran seperti *two-stage sequential explanatory*. Langkah pertama menguji hipotesis menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)*, dan langkah kedua menggunakan *deductive thematic analysis*. Penelitian ini menemukan self-efficacy dan conscientiousness berhubungan dengan penerapan PMS. Kemudian, penerapan PMS dipicu dan memicu fenomena isomorfisma yang berbeda seperti koersif, mimetic dan normatif.

Katakunci: *Karakteristik Karyawan, PMS, Isomorfisma Institusional*

PENDAHULUAN

Isu kinerja dan sistem pengukuran kinerja di ranah sektor publik, khususnya lembaga pemerintahan masih menjadi topik hangat penelitian (Ittner *et al.* 2002; Sofyani dan Akbar 2013). Di Indonesia sendiri kajian kinerja masih menjadi tugas rumah dari Badan Pemeriksa Keuangan selaku lembaga yang terlibat dalam pengembangan instrument sistem pengukuran kinerja. Sampai hari ini,

banyak lembaga pemerintahan, khususnya pemerintah daerah, yang hanya berfokus pada upaya pencapaian kinerja keuangan dan upaya memperoleh opini audit “wajar”. Padahal, karakteristik lembaga sektor publik yang notabene nirlaba, seharusnya lebih mengutamakan *outcome* dan *impact* dari suatu operasional yang diselenggarakan oleh organisasi daripada aspek keuangan.

Di Indonesia isu menyangkut sistem pengukuran kinerja di lembaga pemerintah,

baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999. Inpres tersebut mengisyaratkan untuk diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia. Dalam perjalanannya, implementasi sistem pengukuran kinerja ini berjalan tidak sesuai harapan. Dalam laporan yang diunggah di situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pelaporan akuntabilitas kinerja, dari semua pemerintah daerah di Indonesia tahun 2010, hanya terdapat 9 (sembilan) pemerintah provinsi dan 5 (lima) kabupaten/kota yang dinilai B (baik). Sedangkan pemerintah daerah yang mendapat predikat CC (cukup baik) ada sekitar 16,27 persen dari total 29 provinsi dan 57 kabupaten/kota yang dievaluasi. Capaian ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sekitar 20 persen pemerintah daerah mendapat penilaian akuntabilitas kinerja CC (cukup baik). Pada tahun 2012, terjadi penurunan pada kabupaten yang memperoleh predikat B (baik), yakni hanya 2 (dua) kabupaten saja, yaitu; Sukabumi dan Sleman, dan 104 (23,74 persen) kabupaten/kota yang mendapatkan predikat CC (cukup baik) dari total 438 kabupaten/kota yang dievaluasi (www.menpan.go.id).

Dari berbagai permasalahan yang muncul terkait implementasi sistem pengukuran kinerja tersebut, maka banyak pula riset-riset yang mengangkat isu sistem pengukuran kinerja yang didasarkan pada teori organisasi (Pfeffer 1982). Namun, beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Julnes dan Holzer (2001), Cavaluzzo dan Ittner (2004), Sofyani dan Akbar (2013) mengenai sistem pengukuran kinerja hanya berfokus kepada faktor internal dan eksternal organisasional yang lebih mengarah kepada hal-hal non-manusia atau individu. Sementara, Robbins dan Timothy (2010) mengemukakan bahwa kinerja atau prestasi organisasi bergantung pada kinerja individu atau anggota organisasi. Berdasarkan argumen tersebut penelitian ini menguji faktor karakteristik individu dan kai-

tannya dengan implementasi sistem pengukuran kinerja di lembaga pemerintah daerah. Karakteristik yang dimaksud meliputi: tingkat *self efficacy* dan jenis keperibadian individu, yaitu: *Conscientiousness*, *Openness To Experience*, dan kesesuaian kompetensi pendidikan individu dengan tugas dan peran individu tersebut di organisasi (Larson 1977; Collins 1979; DiMaggio dan Powell 1983; Gudono 2014).

Penelitian mengenai faktor karakteristik individu terhadap implemantasi sistem penguuran kinerja penting dilakukan sebagaimana pendapat Lee dan Bobko (1994) yang mengemukakan bahwa individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan mencurahkan fokusnya untuk mencapai tujuan atau kinerja yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa *Self efficacy* mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara penetapan tujuan dan kinerja individu (Robbins 1998). Sedng - kan dalam hal kepribadian, McRae dan Costa (1986) dan Guadagno *et al.* (2007) menyatakan bahwa orang yang memiliki sifat *conscientiousness* secara individual mampu memecahkan masalah dan mencapai level kesuksesan yang tinggi melalui perencanaan yang penuh tujuan dan penuh ketekunan. Adapun individu yang *opennes to experience* cenderung imajinatif, menyukai sesuatu yang bervariasi, dan bebas. Penjelasan lain mengenai individu dengan tipe *opennes to experience* dikemukakan oleh McElroy *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa orang dengan tipe *opennes to experience* memiliki keinginan dan kesediaan untuk mengeksplorasi suatu ide baru.

Selain tiga faktor individu di atas, Meister (1998) secara spesifik mengemukakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, tindakan atau perilaku, dan pola pikir yang secara reliabel membedakan antara seseorang dengan orang lain khususnya dalam hal pencapaian kinerja. Dengan demikian, kompetensi dapat menggiring kepada kesuksesan dimasa mendatang (McClelland 1973). Berdasarkan kajian literatur dan beberapa penelitian terdahulu tersebut, peneliti menduga faktor karakteristik individu berupa *self effi-*

cacy yang tinggi, kepribadian *conscientiousness*, *openness to experience*, dan kompetensi yang dimiliki pegawai pemerintah daerah, akan memberikan dampak positif terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Cavaluzzo dan Ittner (2004); Julnes dan Holzer (2001); dan Sofyani dan Akbar (2013), penelitian ini tidak hanya fokus pada pengujian hipotesis yang didasarkan pada teori institusional, tetapi juga berupaya mengeksplorasi fenomena implementasi sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang didasari pada teori isomorfisma institusional (DiMaggio dan Powell 1983). Menurut Akbar *et al.* (2012) studi yang mengadopsi teori institusional mengasumsikan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan tetapi juga untuk kekuasaan politik dan legitimasi institusional. Oleh karena itu, dari perspektif tersebut, logika perubahan dalam sistem pengukuran kinerja (*Performance Measurement System—PMS*) yang dilembagakan ke dalam organisasi akan berhubungan dengan tiga mekanisme isomorfisma: koersif, mimetik, dan normatif (Scott 1998; DiMaggio dan Powell 1983). Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan pendekatan metoda riset campuran yang memungkinkan mampu menggali tujuan-tujuan penelitian yang agak kompleks.

Hasil penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan teori isomorfisma institusional khususnya dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas implementasi sistem pengukuran kinerja di ranah sektor publik. Selain itu hasil penelitian ini juga menjadi tambahan referensi untuk riset di bidang sektor publik khususnya yang berkaitan dengan isu sistem pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan faktor karakteristik individu.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Isomorfisma Institutional

Banyak literatur institusional menekankan bahwa struktur dan proses organisasi cende-

rung menjadi seragam (*isomorphic*) dengan norma–norma yang diterima untuk jenis organisasi tertentu (DiMaggio dan Powell 1983). Hal ini berakibat pada munculnya perilaku organisasi untuk melegitimasi cara–cara tertentu dalam hal pengorganisasian (Sofyani dan Akbar 2013). Dalam kajian organisasi, mayoritas studi menggunakan teori organisasi (beberapa literatur menyebutnya teori institusional) untuk menjelaskan perilaku organisasi yang diteliti (Berry *et al.* 2009). Namun, belakangan muncul perspektif lain yang digunakan untuk menjelaskan perilaku organisasi, khususnya sektor publik, yakni isomorfisme institusional (lihat Akbar *et al.* 2012; Wijaya dan Akbar 2013; Sofyani dan Akbar 2013).

Isomorfisma institusional merupakan turunan dari teori organisasi (Gudono 2014). Meyer dan Rowan (1977) dan Fennell (1980) mengemukakan ada dua jenis isomorfisma, yakni: (1) isomorfisma kompetitif (*Competitive Isomorphism*), yakni: asumsi rasionalitas sistem yang menekankan persaingan pasar, perubahan yang bagus, dan pengukuran kesesuaian; dan (2) isomorfisma institusional (*Institutional Isomorphism*); organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi untuk kekuasaan legitimasi politik dan institusional, untuk kesesuaian sosial serta ekonomi. Konsep isomorfisma institusional merupakan alat yang berguna untuk memahami politik dan tata cara yang meliputi kehidupan organisasi yang lebih modern.

Isomorfisma institusional merupakan sebuah konsep yang berguna pada organisasi saat ini dimana politik dan budaya “seremonial dan administratif formil” tertanam dalam kehidupan organisasi, khususnya dalam organisasi sektor publik di Indonesia (Sofyani dan Akbar 2013). DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme untuk perubahan *institutional isomorphic* (bagaimana organisasi menyesuaikan diri). Pertama, isomorfisma koersif (*coercive*), isomorfisma mimetik atau meniru-niru (*mimetic*), dan isomorfisma normatif (*normative*) yang biasanya berhubungan dengan profesionalisasi. Isomor-

fisma koersif merupakan hasil dari tekanan formal maupun informal yang diberikan pada organisasi dengan organisasi lainnya dimana mereka saling bergantung dan didalamnya terdapat fungsi organisasi.

Isomorfisma meniru-niru terjadi ketika teknologi organisasi kurang dipahami (March dan Olsen 1976), ketika tujuan yang ambigu, atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan yang simbolik (Wijaya dan Akbar 2013), maka organisasi akan cenderung menjadikan diri mereka sebagai model yang sama seperti organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi. Sedangkan isomorfisma normatif berkaitan dengan profesionalisme yang ditafsirkan sebagai perjuangan kolektif dari anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metoda kerja mereka, untuk mengontrol "produksi" dan untuk mengembangkan kognitif dan melegitimasi otonomi pekerjaan mereka. (Larson 1977; Collins 1979; DiMaggio dan Powell 1983; Sofyani dan Akbar 2013).

Menurut Akbar *et al.* (2012) studi yang mengadopsi teori institusional mengasumsikan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber daya dan pelanggan tetapi juga untuk kekuasaan politik dan legitimasi institusional. Oleh karena itu, dari perspektif tersebut, logika perubahan dalam sistem pengukuran kinerja (*Performance Measurement System-PMS*) yang dilembagakan ke dalam organisasi bisa ditempuh dengan tiga mekanisme isomorfisma institusional koersif, mimetik, dan normatif (Scott 1998; DiMaggio dan Powell 1983).

Sistem Pengukuran Kinerja dan Isomorfisma

Terbitnya Inpres No 7 tahun 1999 juga menjadi pintu gerbang reformasi birokrasi pasca orde baru. Bersamaan dengan itu lahir Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah di Indonesia. Namun, jika dilihat dari segi teoritis, adalah bentuk isomorfisma mimetik atau upaya meniru-niru pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan di negara lain yang dinilai lebih maju. Menurut Tolbert dan Zucker (1983)

reformasi pelayanan sipil diadopsi karena menjadi simbolis dari pemerintahan yang baik bukan karena tujuan efisiensi. Oleh karenanya, peniruan yang dilakukan dapat mengarahkan organisasi kepada pelaksanaan suatu mekanisme kerja yang hanya sebatas seremonial formal, bukan berorientasi pada substansi (March dan Olsen 1976, DiMaggio dan Powell 1983; Tolbert dan Zucker 1983; Sofyani dan Akbar 2013; Gudono 2014).

Dari pandangan lain, Sihaloho dan Halim (2005) menilai bahwa niat penggunaan sistem pengukuran kinerja lebih didominasi oleh tekanan luar (isomorfisma koersif) (Tolbert dan Zucker 1983). Hal itu dimungkinkan berdampak pada pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang tidak bernilai tambah tekanan yang ada hanya memunculkan kepatuhan semu atau pelaksanaan ritual yang bertujuan agar organisasi dilihat patuh oleh lingkungan di luarnya (Gudono 2014). Berangkat dari argumen di atas, kemungkinan pendorong pelaksanaan SAKIP didasari pada isomorfisme *mimetic* dan koersif sangat erat kaitannya dengan faktor individu atau anggota organisasi yang menjalankan organisasi itu sendiri.

Perumusan Hipotesis

Self efficacy

Self efficacy diturunkan dari teori Kognitif sosial (*Social cognitive theory*) yang pertama kali dikemukakan oleh Bandura (1997). Secara sederhana teori kognitif sosial menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasional digerakkan dari lingkungan, dan secara terus-menerus mengalami proses berpikir terhadap informasi yang diterima. Hal tersebut memengaruhi motivasi, sikap, dan perilaku individu. Individu yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan mencurahkan semua perhatiannya untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu tugas. Ketika menghadapi hambatan atau kesulitan dalam pencapaian tujuan, individu yang memiliki *self efficacy* tinggi akan berusaha secara maksimal agar mampu bertahan lebih lama dan berhasil mencapai tujuan atau kinerja yang ditetapkan (Lee dan Bobko 1994). Dengan demikian, individu yang

memiliki *self efficacy* tinggi akan mungkin menjalankan sistem pengukuran kinerja sebagai suatu amanat yang harus dilakukan sebaik mungkin dan seperti yang seharusnya demi mempertahankan profesionalismenya (Larson 1977; Collins 1979). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H1a: Self efficacy yang tinggi dari pegawai pemerintah berhubungan positif dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja.
 H1b: Self efficacy yang tinggi dari pegawai pemerintah berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja.
 H1c: Self efficacy yang tinggi dari pegawai pemerintah berhubungan positif dengan penggunaan informasi kinerja.

Conscientiousness

Conscientiousness (di literatur lain disebut dengan “*intellect*”) berhubungan dengan cara individu mengontrol, mengatur, dan mengarahkan dorongan hati (*impulse*). Orang yang memiliki sifat *conscientiousness* secara individual menghindari masalah dan mencapai level kesuksesan yang tinggi melalui perencanaan yang penuh tujuan dan penuh ketekunan (McRae dan Costa 1986). Individu yang memiliki tipikal ini pada sisi positifnya sangatlah pintar dan dapat diandalkan. Dengan rasional, kedisiplinan, kehati-hatian, suka menganalisis, dapat menentukan tindakan, mengadopsi opini, dan cenderung menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat kesimpulan atau sebagai dasar pengambilan keputusan dimiliki individu *conscientiousness* (Korzaan dan Boswell 2008; McRae dan Costa 1986) mungkin untuk mengarahkan tindakan individu tersebut kepada pola perilaku normatif terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja, khususnya di lingkup pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H2a: Conscientiousness berhubungan positif dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja.
 H2b: Conscientiousness berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja.

H2c: Conscientiousness berhubungan positif dengan penggunaan informasi kinerja.

Openness to Experience

McRae dan Costa (1986) dan Guadagno *et al.* (2007) mengatakan bahwa individu yang memiliki *openness to experience* cenderung imajinatif, menyukai sesuatu yang bervariasi, dan bebas. McElroy *et al.* (2007) menambahkan bahwa orang dengan tipikal *openness to experience* memiliki keingintahuan dan kesediaan untuk mengeksplorasi suatu ide baru. Individu yang terbuka cenderung untuk menemukan ide-ide baru, mendapatkan nilai-nilai luar biasa, dan sepenuh hati mempertanyakan otoritas. Sifat imajinatif, kreatif, dan memiliki keinginan intelektual tinggi yang dimiliki individu dengan tipikal *openness to experience* (Korzaan dan Boswell 2008; McRae dan Costa 1986) akan mungkin untuk mengarahkan tindakan individu tersebut kepada keinginan melaksanakan sistem pengukuran kinerja secara baik dan profesional dan tidak hanya sebatas tuntutan administratif saja. Profesionalisme adalah sumber dari munculnya isomorfisma normatif (Larson 1977; Collins 1979; DiMaggio 1983). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H3a: Openness to experience berhubungan positif dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja.
 H3b: Openness to experience berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja.
 H3c: Openness to experience berhubungan positif dengan penggunaan informasi kinerja.

Kompetensi Pendidikan

Kompetensi (*competency*) didefinisikan sebagai karakteristik yang dimiliki seseorang yang memungkinkan mereka untuk memiliki kinerja yang unggul (McClelland 1973). Lebih jauh, McClelland (1973) menyatakan bahwa kompetensi dapat menggiring kepada kesuksesan dimasa mendatang. Sedangkan Meister (1998) secara lebih spesifik mengemukakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, tindakan atau perilaku, dan pola pikir yang secara reliabel membedakan antara

seseorang dengan orang lain khususnya dalam hal pencapaian kinerja. Dalam konteks penelitian ini, individu yang memiliki latar belakang pendidikan di sektor publik khususnya pemerintahan ataupun pendidikan yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang diemban akan lebih mampu menjalankan konsep sistem pengukuran kinerja dibandingkan dengan individu yang berlatar belakang pendidikan bukan dari sektor publik dan tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Hal ini dikarenakan konsep dari sistem pengukuran kinerja secara teoritis telah dipelajari oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan sektor publik dan sesuai dengan tugas. Sehingga, aplikasi praktis dari konsep disiplin ilmu tersebut di lingkungan kerja menjadi lebih dipahami oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan di sektor publik dan sesuai dengan tugasnya daripada yang tidak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H4a: Kesesuaian tugas dengan kompetensi berhubungan positif dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja.
- H4b: Kesesuaian tugas dengan kompetensi berhubungan positif dengan akuntabilitas kinerja.
- H4c: Kesesuaian tugas dengan kompetensi berhubungan positif dengan penggunaan informasi kinerja.

Sebagaimana pendapat Larson (1977) dan Collins (1979), DiMaggio (1983) isomorfisma normatif berhubungan dengan profesionalisme sebagai perjuangan kolektif dari anggota organisasi untuk menentukan kondisi dan metoda kerja mereka dan untuk mengembangkan kognitif dan melegitimasi otonomi pekerjaan mereka. Profesionalisme jarang dicapai dengan sukses karena profesional harus berkompromi dengan klien non-profesional, atasan, atau regulator. Dua aspek profesionalisasi merupakan sumber penting dari isomorfisma yakni; pertama, profesionalisasi bersandar dari pendidikan formal dan legitimasi dalam basis kognitif yang dihasilkan oleh pakar perguruan tinggi. Kedua, dihasilkan oleh pertumbuhan dan penyebaran

jaringan profesional yang datang ke dalam organisasi. Dalam penelitian ini, karakteristik individu yang dimasukkan peneliti sebagai variabel independen semuanya terkait dengan dua aspek profesionalisme yang dimaksudkan di atas. Oleh karenanya, berdasarkan argumen di atas, maka peneliti membangun rumusan masalah yang akan dikaji dengan metoda kualitatif sebagai berikut:

RM: Bagaimana pemerintah daerah menjalankan sistem pengukuran kinerja dalam sudut pandang teori isomorfisma institusional? Apakah karakteristik individu yang terhubung dengan profesionalisme akan menggiring kepada isomorfisma normatif sebagaimana argumen yang dipaparkan Larson (1977), Collins (1979), DiMaggio (1983), dan Gudono (2014)?

Pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan informasi kinerja

Ketersediaan laporan informasi kinerja yang berorientasi hasil akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja untuk mendukung pembuatan keputusan pada suatu organisasi (Artley dan Stroh 2001; The Urban Institute 2002). Kondisi ini menggambarkan adanya pengaruh secara langsung antara pengembangan sistem pengukuran kinerja dengan akuntabilitas kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Kloot (1999) menyampaikan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan penggunaan informasi kinerja adalah informasi kinerja yang dihasilkan dari implementasi sistem pengukuran kinerja suatu organisasi. Peningkatan akuntabilitas kinerja akan meningkatkan keinginan pihak manajemen dan staf untuk menggunkan informasi kinerja dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian terdapat pengaruh secara tidak langsung antara pengembangan sistem pengukuran kinerja terhadap penggunaan informasi kinerja melalui akuntabilitas kinerja (Cavaluzzo dan Ittner 2004; Nurkhamid 2008; Sofyani dan Akbar 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H5a: Pengembangan sistem pengukuran kinerja berhubungan langsung secara positif terhadap akuntabilitas kinerja.
- H5b: Pengembangan sistem pengukuran kinerja berhubungan langsung secara positif terhadap penggunaan informasi kinerja.
- H5c: Pengembangan sistem pengukuran kinerja berhubungan tidak langsung secara positif terhadap penggunaan informasi kinerja melalui akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

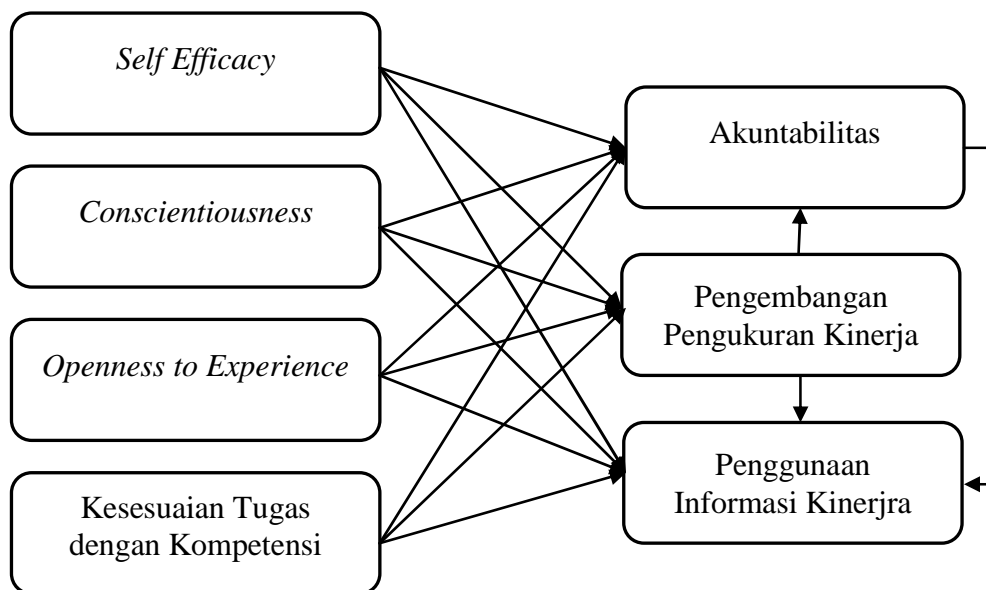
Populasi, Sampel dan Level Analisis

Penelitian dilakukan di pemerintah daerah lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi; Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Objek penelitian adalah Instansi Pemerintah Daerah (Dinas, Badan, dan Kantor). Metoda pemilihan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu

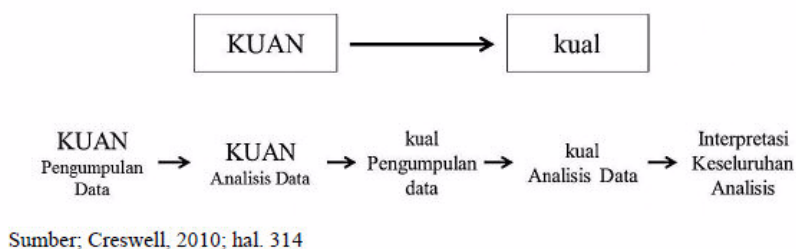
sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yakni: pejabat minimal eselon 4 (empat) di masing-masing dinas, badan, atau kantor dengan harapan para pejabat dinas/badan/kantor yang menjadi responden telah terlibat dalam proses penyusunan perencanaan strategis dan laporan kinerja sehingga responden yang dipilih diyakini telah memahami kondisi di dalam dinas, kantor atau badan yang ditempatinya (Sihaholo dan Halim 2005; Nurkhamid 2008).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer melalui penyebaran angket kuesioner dan wawancara kepada responden dengan metoda penelitian campuran (*mixed method*). Pada beberapa kasus peneliti juga melakukan mini observasi untuk memperoleh data pendukung. Penelitian metoda campuran secara formal didefinisikan sebagai kelas penelitian yang menuntut peneliti mencampur atau menggabungkan teknik penelitian, metoda, pendekatan, konsep atau bahasa kuantitatif dan kualitatif ke dalam studi tunggal (Johnson dan Onwuegbuzie 2004).



Gambar 1: Model Penelitian



Sumber: Creswell, 2010; hal. 314

Gambar 2: Strategi Eksplanatoris Sekuensial

Strategi yang digunakan adalah eksplanatoris sekuensial (Creswell 2010), yaitu dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama lalu diikuti dengan pengumpulan dan analisis secara kualitatif (wawancara semi-terstruktur) pada tahap kedua yang dibangun berdasarkan hasil kuantitatif. Metoda ini digunakan karena apabila cakupan penelitian ini hanya dijelaskan dengan menggunakan data kuantitatif, maka dikhawatirkan tidak dapat menangkap fenomena isomorfisma institusional yang ingin digali. Selain itu, dengan menggunakan satu pendekatan integratif ini, peneliti mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik serta dapat menguji hasil penelitian dari pendekatan yang berbeda (Creswell 2010).

Penggunaan metoda penelitian campuran ini bukan semata-mata karena dinilai baru, sedang naik daun, atau lagi trendi. Pendekatan metode campuran ini sangat cocok untuk penelitian ruang lingkup sektor publik karena kekhawatiran terjadinya bias normatif atau yang biasa disebut sebagai *desirability bias*. Oleh karenanya, penggunaan metoda penelitian campuran diharapkan mampu mendeteksi jika pada penelitian telah terjadi bias normatif tersebut, melalui mekanisme wawancara yang bisa digunakan sebagai alat konfirmasi apakah kuesioner telah diisi oleh responden sesuai keyakinannya atau tidak. Selain itu, menurut Creswell (2010) metoda penelitian campuran juga dapat digunakan untuk mengeksplorasi jika terdapat *outlier* dan ekstrim ketika menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama, lalu dapat ditindaklanjuti dengan wawancara kualitatif tentang kasus-kasus *outlier* tersebut untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dari hasil olah data kuantitatif.

Metode Penelitian Campuran (*Mixed Method Research*)

Penelitian metoda campuran terdiri dari dua jenis pendekatan penelitian, yaitu; penelitian kuantitatif yang merupakan metoda untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan metoda untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Paradigma positivistik sebagai landasan metoda kuantitatif, berurusan dengan hal-hal yang empirik (tampak) untuk dicari hubungan pada masing-masing variabelnya. Sebaliknya, paradigma interpretif sebagai landasan metoda kualitatif, berurusan dengan hal-hal yang tidak tampak untuk digali kebenaran yang sebenarnya (Creswell 2010).

Kompleksitas masalah penelitian yang dilakukan menuntut jawaban dari fenomena yang terjadi tidak hanya sekedar sederhana dalam angka-angka pada pengertian kuantitatif atau kata-kata pada penelitian kualitatif. Dengan mengkombinasikan survei dengan wawancara semi-terstruktur, maka peneliti dengan pendekatan pragmatis ini dapat membuka pintu untuk menerapkan metoda yang beragam, asumsi yang bervariasi, serta bentuk yang berbeda dalam pengumpulan data dan analisis data (Creswell 2010). Pandangan pragmatis dapat menjembatani perbedaan filosofis, yaitu mereka yang setuju dengan *positivists* dan *post-positivists* bahwa ada suatu realitas eksternal. Kedua, mereka yang menolak bahwa ada kebenaran absolut (Creswell 2010).

Menurut Hartono (2010) walaupun secara konsep penelitian metoda ilmiah

(kuantitatif) dan naturalis (kualitatif) berbeda, tetapi sebaiknya tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan, karena keduanya memiliki kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya tersendiri, sehingga seharusnya digunakan secara komplementer, satu melengkapi yang lainnya. Pendekatan mana yang harus digunakan dalam melakukan penelitian tergantung pada tiga hal, yakni; (1) konteks penelitian, (2) kondisi atau lingkungan yang terjadi, dan (3) tingkat keluasan dan kedalaman yang diinginkan. Hartono (2010) juga menambahkan kedua pendekatan ini dapat digabungkan untuk digunakan bersama-sama. Hal ini dimungkinkan dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau sinergi tersendiri karena pada hakikatnya masing-masing pendekatan mempunyai kebaikan-kebaikan sendiri. Metoda campuran dengan menghadirkan wawancara ini juga direkomendasikan oleh Nurkhamid (2008) agar penjelasan dari hasil pengujian hipotesis tidak bersifat spekulatif, tetapi benar-benar merujuk pada kondisi di lapangan.

Keuntungan utama dari metoda penelitian campuran adalah memungkinkannya peneliti untuk secara bersamaan mengajukan pertanyaan konfirmatori dan eksplorasi dan karenanya memverifikasi dan menghasilkan teori dalam penelitian yang sama (Creswell 2010). Selain itu data wawancara yang dipakai untuk mendukung data survei memungkinkan peneliti untuk memperluas teori yang masih ada, sehingga dapat dipakai sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk membuka perspektif baru untuk membantu mengembangkan keterampilan metodologi baru yang besar (Creswell 2010).

Alat dan Teknik Analisis

Penelitian ini akan menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Penggunaan alat analisis PLS bertujuan untuk memprediksi model dalam rangka pengembangan teori. Karakteristik PLS yang bekerja dengan mengacu kepada perhitungan nilai varian dinilai sangat cocok untuk penelitian ini (Hartono dan Abdillah 2009; Sholihin dan Ratmono 2013).

Di samping itu, PLS juga kombinasi dan model yang kompleks serta dapat digunakan untuk ukuran sampel yang relatif kecil.

Tahap Analisis Data

Teknik analisis data kuantitatif

Merancang Model Struktural (Inner Model)

Model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar konstruk (variabel laten). Arah hubungan antar variabel laten dalam model penelitian ini merupakan hubungan satu arah sehingga digambarkan dengan panah arah tunggal. Terdapat dua macam konstruk dalam model, yaitu: (1) Konstruk Eksogen, merupakan konstruk yang tidak diprediksi oleh konstruk lain dalam model dan biasa disebut juga dengan variabel independen. Konstruk eksogen dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk endogen. (2) Konstruk Endogen, merupakan konstruk yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk eksogen dan hanya dapat berhubungan kausal dengan konstruk endogen dan merupakan variabel dependen.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural dilakukan untuk menilai seberapa baik model yang diajukan untuk memprediksi konstruk yang diukur atau juga untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Evaluasi dilakukan dengan melihat skor *R Square* (R^2) yang dihasilkan dari tabel iterasi algoritma PLS. Semakin tinggi nilai R^2 (mendekati 1,00) berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan.

Merancang Model Pengukuran (Outer Model) dan Konstruksi Diagram Jalur

Model pengukuran dirancang dengan cara menghubungkan indikator dengan variabel latennya. Dalam penelitian ini merupakan model indikator yang digunakan adalah jenis konstruk reflektif karena indikator-indikator pengukuran merefleksikan konstruk (variabel laten) yang dibangun. Selain itu, indikator reflektif juga sesuai untuk mengukur persepsi. Rancangan model pengukuran membentuk diagram jalur yang menunjukkan hubungan

kausalitas antar variabel. Dalam menggambar diagram jalur (*path diagram*), digunakan prosedur *nomogram reticular action modeling* (RAM) sebagaimana ketentuan yang direkomendasikan oleh Falk dan Miller (1992), yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstruk teoretikal yang menunjukkan suatu variabel laten digambar dengan bentuk oval atau lingkaran.
- b. Variabel-variabel terukur (indikator) digambar dengan bentuk kotak.
- c. Hubungan tidak simetris yang menunjukkan satu arah digambarkan dengan panah arah tunggal.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Parameter untuk menilai model pengukuran adalah validitas konvergen, validitas diskriminan yang diperoleh melalui proses iterasi algoritma.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas diperoleh melalui uji *T-statistic* yang dihasilkan dari proses *bootstrap*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *T-table* dengan nilai *T-statistics* yang dihasilkan dari proses *bootstrap*. Hipotesis diterima (terdukung) jika nilai *T-statistics* lebih tinggi dibandingkan nilai *T-table*. Dengan tingkat keyakinan 95 persen (*alpha* 5 persen), maka nilai *T-table* untuk uji hipotesis satu ekor (*one-tailed*) adalah $\geq 1,64$ (Hair *et al.* 2006).

Teknik Analisis Kualitatif

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik deduktif yang menurut Braun dan Clarke (2006) merupakan metoda analitik kualitatif untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola atau tema yang terdapat didalam data. Analisis tematik sendiri merupakan salah satu klasifikasi dari teknik analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah yang ditempuh meliputi melakukan *coding*, mengelompokkan dalam kategori-kategori, menemukan ide utama dan mengelompokkannya ke dalam tema-tema, selanjutnya menemukan pola umum dari kecende-

rungan yang berhasil ditemukan dari data. Dalam analisis tematik peneliti tidak diperlukan penjelasan rinci tentang kerangka teori dan pendekatan yang digunakan, akan tetapi untuk membuat menjadi jelas posisi teori tertentu menjadi penting untuk disandarkan (Braun dan Clarke 2006). Dalam proses analisis dan penentuan tema, peneliti menggunakan konsep teori isomorfisma institusional yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji untuk membantu menjelaskan hasil berdasarkan temuan data di lapangan.

Untuk memastikan realibilitas dan validitas dari data kualitatif yang sudah terkumpul, maka bisa melakukan beberapa prosedur, antara lain; untuk memastikan validitas data dengan memeriksa kembali hasil transkrip untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi. Lalu untuk memastikan reliabilitas data, maka perlu melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer de-briefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian (Creswell 2010).

Difinisi operasional dan pengukuran variabel

Self Efficacy

Variabel ini menggambarkan tingkat keyakinan responden terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Bandura (1997) dengan menggunakan skala likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

Conscientiousness

Variabel ini menggambarkan karakter responden seperti rasional, suka menganalisis, dapat menentukan tindakan, dan mengadopsi opini, dan cenderung menggunakan informasi yang tersedia untuk membuat kesimpulan atau sebagai dasar pengambilan keputusan (Korzaan dan Boswell 2008). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Korzaan dan Boswell (2008) berdasarkan *International Personality Item Pool* (IPIP) dengan menggunakan skala likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

Opennes To Experience

Variabel ini menggambarkan karakter responden seperti rasa keingintahuan intelektual. Orang yang tingkat *Opennes To Experience*-nya tinggi cenderung lebih mudah menerima dan memiliki banyak toleransi terhadap hal-hal atau ide baru, serta memiliki keinginan dan kemauan untuk mengalami hal baru atau merumuskan ide baru (Korzaan dan Boswell 2008). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Korzaan dan Boswell (2008) berdasarkan *International Personality Item Pool* (IPIP) dengan menggunakan skala likert 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

Keseuaian Tugas dengan Kompetensi Pendidikan

Variabel ini menggambarkan kesesuaian tugas dan jabatan individu dengan kompetensi akademik individu tersebut. Variabel ini diukur dengan melihat program studi responden sewaktu menempuh pendidikan tinggi dengan tugas dan jabatan yang diemban responden saat ini.

Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja

Variabel ini menunjukkan upaya organisasi melakukan pengembangan sistem pengukuran kinerja yang dicerminkan dengan penentuan dan penetapan berbagai tipe ukuran kinerja yang berorientasi hasil untuk berbagai kebijakan/program/kegiatan yang dijalankan oleh suatu organisasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Cavaluzzo dan Ittner (2004) dengan menggunakan skala *Likert* 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

Akuntabilitas Kinerja

Variabel ini mengukur sejauh mana para manajer merasa bertanggungjawab untuk mencapai target capaian dari suatu program/kegiatan/kebijakan yang dijalankan oleh organisasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Cavaluzzo dan Ittner (2004) dengan menggunakan skala *Likert* 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

Penggunaan Informasi Kinerja

Variabel ini mengungkapkan berbagai jenis penggunaan informasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini diadopsi dari Cavaluzzo dan Ittner (2004) dengan menggunakan skala *Likert* 1-5 (1 = sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN***Pilot Test***

Sebelum instrumen penelitian disebarkan kepada para responden, instrumen harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu, instrumen kuesioner terlebih dahulu diujicobakan (*pilot test*) kepada responden yang memiliki karakteristik sama dengan calon sampel penelitian. *Pilot test* dilakukan kepada para pegawai pemda yang sedang menempuh kuliah di Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (MEP UGM). Dari hasil penyebaran 50 instrumen diperoleh 31 instrumen yang layak untuk diujikan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan *software* SmartPLS. Hasil *pilot study* menunjukkan bahwa nilai AVE dan *Communality* masing-masing $>0,5$ dan mendekati $0,5$. Nilai *Composite Reliability* masing-masing $>0,6$ dan *cross loading* $>0,6$. Selain itu, pada hasil *cross loading* dapat ditemukan masing-masing indikator yang ada pada suatu variabel laten (konstruk) mempunyai nilai *cross loading* tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan dengan nilai yang ada pada konstruk lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini valid dan reliabel, sehingga layak digunakan untuk penelitian (Chin 1998).

Gambaran Umum Responden

Pengumpulan data dilakukan dua tahap dengan metoda berbeda, yakni, pertama: pengumpulan data kuantitatif dengan menyerahkan kuesioner penelitian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Provinsi DIY. Kemudian, hasil jawaban

kuesioner dirangkum dan dianalisis dengan *software* SmartPLS. Tahap kedua: hasil olah data kuantitatif digunakan sebagai dasar melakukakan perumusan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara terhadap responden yang tersebar di enam daerah penelitian. Adapun rincian *response rate* dan *usable response rate* dapat disimak pada Tabel 1.

Analisis Data Kuantitatif

Non-Response Bias

Pengumpulan data dilakukan dalam dua periode yang berbeda, yakni minggu pertama dan kedua. Untuk memastikan tidak ada perbedaan jawaban responden dari dua periode tersebut, maka 60 respon akhir (tujuh hari kerja kedua) dibandingkan dengan tanggapan sebelumnya yaitu 59 respon awal (tujuh hari kerja pertama) menggunakan *Mann-Whitney Test* (Field 2009). Dari hasil *Mann-Whitney Test* dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat per-

bedaan signifikan dari semua variabel yang digunakan [Asymp. Sig. (2-tailed)] > 0.05.

Selain itu, dengan daerah penelitian yang cukup luas, yakni meliputi enam wilayah, maka untuk memastikan tidak ada perbedaan jawaban responden antar wilayah, dilakukan *Kruskal Wallis Test*, yakni uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih kelompok data sampel secara bersamaan (Supangat 2007). Dari hasil *Kruskal Wallis Test* ditemukan nilai *Asymp. Sig.* > 0.05 yang artinya tidak terdapat perbedaan jawaban dari responden di enam wilayah berbeda yang dijadikan sampel penelitian.

Hasil Perancangan Model Struktural

Dalam model struktural ini, terdapat 14 konstruk yang terdiri dari 11 konstruk eksogen (independen) dan 3 (tiga) konstruk endogen (dependen). Model struktural ditunjukkan pada gambar 1.

Tabel 1: Rincian *Respon Rate* dan *Usebale Respon rate*

Keterangan	Disebar	Diterima	Tidak Lengkap	Tidak Sesuai Kriteria sampel	Dianalisis	% Dari Jlh Disebar
DIY	24	22	6	2	14	58,33%
Yogyakarta	21	19	3	1	15	71,43%
Sleman	24	21	7	3	11	45,83%
Bantul	29	27	2	2	23	79,31%
Gunung Kidul	23	23	5	4	14	60,87%
Kulon Progo	21	21	1	0	20	95,24%
Jumlah	142	133	24	12	97	68,31%

Tabel 2: Ringkasan Iterasi Algoritma PLS

Var	AVE	Composite Reliability	Cronbachs Alpha	Communality
AKT	0,47387	0,777464	0,613566	0,47387
CON	0,67316	0,89147	0,839625	0,67316
KTDK	1	1	1	1
OTE	0,710309	0,907303	0,870019	0,710309
PIK	0,665424	0,908587	0,874145	0,665424
PSPK	0,645509	0,878533	0,81845	0,645509
SE	0,538317	0,821524	0,747657	0,538317
R Square				
AKT				0,473236
PIK				0,50844
PSPK				0,286024

Catatan: nilai R Square: 0,67 = *substantial*, 0,33 = *moderate*, 0,19 = *weak*, (Chin 1998; Chin *et al.* 2003; Henseler 2009)

Evaluasi Model Pengukuran

Uji Validitas Konvergen

Parameter uji validitas konvergen dilihat dari skor AVE dan *communality*. Skor masing–masing variabel, kecuali AKT (Akuntabilitas) bernilai di atas 0,5. Artinya, probabilitas indikator di suatu konstruk masuk ke variabel lain lebih rendah (kurang 0,5). Sehingga, probabilitas indikator tersebut konvergen dan masuk di konstruk yang dimaksud lebih besar, yaitu di atas 0,5 atau 50%. Meskipun idealnya skor AVE >0,5, namun skor >0,4 masih diberi toleransi (Lai dan Fan, 2008; Vinzi et al., 2010).

Uji Validitas Diskriminan

Parameter validitas diskriminan mengacu pada skor *cross loading*. Dari hasil pengujian *Cross Loading* ditemukan masing–masing indikator di suatu konstruk di dalam model pengukuran telah memenuhi syarat validitas diskriminan karena masing–masing indikator di suatu konstruk berbeda dengan indikator di konstruk lain dan mengumpul pada konstruk yang dimaksud dengan skor > 0,6.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat dari skor *Composite Reliability* dan *Crombach Alpha* dengan syarat nilainya > 0,6 (Hair et al. 2006; Hartono dan Abdillah 2009). Dari Tabel 2 da-

pat disimak skor *Composite Reliability* semua konstruk lebih dari 0,6. Begitu pula untuk skor *Crombach Alpha*, semua konstruk juga memiliki skor lebih dari 0,6. Dengan demikian, konstruk–konstruk penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Evaluasi Model Struktural

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R^2 (*R-Square*) untuk konstruk dependen. Dari Tabel 2 dapat disimak bahwa nilai R^2 untuk konstruk AKT (Akuntabilitas) adalah sebesar 47,32%, nilai R^2 untuk konstruk PIK (Penggunaan Informasi Kinerja) adalah sebesar 50,84% persen dan nilai R^2 untuk konstruk PSPK (Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja) adalah sebesar 28,60%. Nilai-nilai tersebut bermakna bahwa model penelitian yang diajukan dapat menjelaskan variabel konstruk AKT (Akuntabilitas) sebesar 47,32%, konstruk PIK (Penggunaan Infromasi Kinerja) sebesar 50,84%, dan konstruk PSPK (Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja) sebesar 28,60%,. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diajukan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Ringkasan hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Arah	Koefesien	Nilai-T	Hasil
H1a	SE → AKT	+	0,083529	0,732224	Tidak Terdukung
H1b	SE → PIK	+	0,145	1,297199	Tidak Terdukung
H1c	SE → PSPK	+	0,209785	1,733182*	Terdukung
H2a	CON → AKT	+	0,15637	1,270705	Tidak Terdukung
H2b	CON → PIK	+	0,175011	1,797711*	Terdukung
H2c	CON → PSPK	+	0,01212	0,08046	Tidak Terdukung
H3a	OTE → AKT	+	0,06031	0,599775	Tidak Terdukung
H3b	OTE → PIK	+	0,012862	0,117262	Tidak Terdukung
H3c	OTE → PSPK	+	0,035696	0,328744	Tidak Terdukung
H4a	KTDK → AKT	+	0,04521	0,581382	Tidak Terdukung
H4b	KTDK → PIK	+	-0,07485	0,959456	Tidak Terdukung
H4c	KTDK → PSPK	+	-0,01049	0,137729	Tidak Terdukung
H5a	PSPK → AKT	+	0,239338	2,727981*	Terdukung
H5b	PSPK → PIK	+	0,267782	2,465997*	Terdukung
H5c	PSPK → AKT → PIK	+	0,481327	5,575069*	Terdukung
			0,479591	5,557762*	

Catatan: *signifikan pada nilai *T-Table* 1,64 (*one-tailed*) dan P-value <0,05

Analisis Data Kualitatif

Dari hasil pengujian hipotesis, variabel *self efficacy* dan *conscientiousness* secara empirik berhubungan positif terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja, masing-masing dalam hal pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Menurut beberapa responden, keberhasilan pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja dinilai akan bisa diraih oleh adanya ketekunan, dedikasi, dan kematangan intelektual pegawai pemda. Beberapa karakter tersebut berperan penting dalam meningkatkan profesionalitas kerja yang mampu melahirkan isomorfisma normatif. Hasil ini sejalan dengan pendapat Lee dan Bobko (1994) dan Guadagno *et al.* (2007). Hasil ini juga sejalan dengan paparan beberapa responden yang diperoleh dari hasil wawancara.

“...komitmen penting dimiliki pegawai. Setelah itu dedikasi dan loyalitas kepada atasan...”¹ (Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Dasar Bantul)

“Orang yang tekun dan dia bisa bertahan dengan rutinitas yang mampu memberikan kinerja baik...” (Kasubbid Litbang Sarpras dan Tata Ruang Bappeda Kota Yogyakarta)

“...bekerja dengan jiwa itu bisa dilakukan jika bekerja karena kesesuaian antara kemampuan dan modal ilmu yang dimiliki dengan tugas yang dikerjakan. Sehingga, ketika orang itu tepat di bidangnya biasanya mereka lebih kompeten, lebih tekun, lebih menjiwai, lebih kreatif juga.” (Kasubbag Perencanaan Dinas Parpora Kulon Progo)

“...ya harus punya intelektual, semangat tinggi, tekun, loyal, dan mudah beradaptasi...” (Analisis Kebutuhan Program Diklat Badan Kepegawaian Daerah DIY)

Sedangkan variabel *opennes to experience* yang identik dengan karakter seseorang yang kreatif secara statistik tidak berhubungan

signifikan dengan pelaksanaan sistem pengukuran kinerja. Tidak terdukungnya variabel *opennes to experience* bisa jadi dikarenakan pada realita di lapangan yang ditemukan peneliti, yakni tugas dan wewenang pegawai pemda dibatasi oleh peraturan. Sehingga, kapasitas pegawai pemda untuk melakukan improvisasi atau kreatifitas dalam hal tertentu tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan beberapa responden berikut:

“Kami membutuhkan orang tekun, tapi juga penuh kreatifitas. Kalau orang tekun tapi tidak kreatif nanti *saklek*... Tapi kita melayani masyarakat dan kita menegakkan kebijakan bupati dengan berbagai kebijakannya harus sesuai dengan perda yang ada. Kita (satpol PP, *pen*) sebagai kepanjangan tangan pimpinan, maka pelaksanaan operasi di lapangan tetap harus sesuai peraturan.” (Kepala Kantor TU Satpol PP Gunung Kidul)

Berikut beberapa pendapat dari responden lain yang serupa dengan pendapat dari responden Gunung Kidul di atas:

“... ruang gerak kita dibatasi... Kan sudah ada plotnya. Jadi kita tinggal mengisi. Jadi memang daya ekspresi kita tidak tertuangkan di sini. Jadi analisisnya ya apa adanya.” (Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Dasar Bantul)

“Orang kreatif tidak punya ruang di sini. Idealnya posisi litbang itu adalah fungsional peneliti. Jadi dia langsung bertanggungjawab ke kepala bappeda... Saya pikir birokrasi kita memang belum memberikan ruang kepada insan kreatif...”² (Kasubbid Litbang Sarpras dan Tata Ruang Bappeda Kota Yogyakarta)

“...ketika orang itu tepat di bidangnya biasanya mereka lebih kompeten, lebih tekun, lebih menjiwai, lebih kreatif juga. Contohnya saat acara seni, mereka alumni Institut Seni Indonesia itu

bekerja cepat dan bagus. Tapi kalau yang lain mengerjakan tentu tidak sebagus orang seni.”(Kasubbag Perencanaan Dinas Parpora Kulon Progo)

Kesesuaian Tugas dengan Kompetensi Pendidikan

Dari hasil pengujian hipotesis, variabel kesesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan secara empirik tidak berhubungan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja, baik dalam hal pengembangan sistem pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja maupun penggunaan informasi kinerja. Keadaan ini bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan dapat ditutupi oleh adanya pelatihan, kompetensi non-akademik yang dimiliki pegawai (seperti: kemampuan mengontrol emosi, kemampuan memimpin, kemampuan menyesuaikan diri dan mengembangkan kapasitas kompetensi dan intelektual, dsb), dan pengalaman pegawai SKPD³. Pengalaman di dianggap mampu menjadi modal untuk menyesuaikan diri di instansi baru jika terjadi *rolling* jabatan atau tempat kerja.

Di samping itu, adanya tuntutan untuk siap ditempatkan di posisi manapun juga berkemungkinan menjadi alasan lain. Fakta di lapangan yang ditemukan adalah kesesuaian antara formasi (posisi/tugas) dengan kompetensi pegawai pemda sangat sulit dicapai karena adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara formasi jenis pekerjaan dengan spesifikasi pegawai yang tersedia saat rekrutmen pegawai pemerinth daerah dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh responden dari Sleman dan Bantul berikut ini:

“Saya rasa ketika pejabat atas seperti orang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berkoordinasi dengan kepala-kepala SKPD untuk mendiskusikan penempatan pegawai, mereka tentu mempertimbangkan segala hal terkait siapa yang akan menempati posisi tertentu. Entah itu kompetensi, kemampuan lain, pengalaman, ataupun faktor lain semuanya dipertimbangkan. Jadi menurut saya, spesifikasi dalam hal

kompetensi tidak begitu berpengaruh dalam pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dan dalam hal pencapaian kinerja. Disamping itu juga ada pelatihan yang dapat memberi kontribusi positif dari yang tadinya antara kompetensi dengan pekerjaannya tidak sesuai menjadi sesuai dan mampu bekerja di posisi yang diembannya.” (Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pendidikan Dasar Bantul)

“Tidak harus sesuai. Tapi, tidak boleh keluar dari rumpun. Misalnya di kepala kantor *perpus* ya idealnya dari IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Misalnya insinyur jadi kepala *perpus* kan tidak pas. Artinya tidak harus sesuai tapi tidak boleh keluar dari rumpun. *Kan* ketidaksesuaian itu bisa dikembangkan dengan pelatihan dan juga pengalaman yang bersangkutan...”⁴ (Kepala Kantor Perpusda Sleman)

Meski demikian, terdapat pula argumen berbeda dari beberapa responden lain yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian tugas dan kompetensi adalah masalah besar dan mengganggu implemmentasi sistem pengukuran kinerja, khususnya dalam upaya pencapaian kinerja. Berikut beberapa pendapat responden yang kontra dengan pendapat dari responden dari Bantul dan Sleman:

“...ya memang jika *the right man in the right position* tentu berbeda dengan *wrong man in the wrong position*. Saya mencontohkan spesifik saja... Kalau di bagian kebudayaan kan banyak alumni ISI (Institut Seni Indonesia), itu memang sangat cocok sekali. Mereka intuisinya sangat kuat ketimbang kami yang non lulusan seni, kalau kami *tunanya* kurang...” (Kasubbag Perencanaan Dinas Parpora Kulon Progo).

“Lha ini (dengan terkejut dan antusias mendengar pertanyaan peneliti)... Saya pikir kita semua sudah tahu yang namanya *the right man in the right place*. Seseorang kalau ingin melak-

sanakan tugas maksimal dan ingin hasil maksimal pula, maka SKPD khususnya BKD harus menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian di bidangnya. Namun kita melihat selama ini, kadang-kadang karena berbagai kebijakan, ada hal yang kurang pas, maka kita berusaha untuk menyesuaikan. Saya berharap agar dalam mengisi kekosongan pejabat yang ada, diambilkan dari orang yang membidangi kaitannya dengan penegakan perda atau hukum, itu dari sajana hukum. Kami harap jangan ditempatkan orang yang asal (tidak sesuai, *pen*), hanya karena orang tersebut golongannya sudah mencukupi lalu ditempatkan diposisi itu. Jadi, kalau bisa ya harus *the right man in the right place*. Kalau di Pol PP ada pendidikan dasar ke Pol PP-an untuk penyesuaian kompetensi dengan tugas di Satpol PP. Ini semacam matrikulasi kalau di perguruan tinggi.”(Kepala Kantor TU Satpol PP Gunung Kidul).

“Oya, itu masalah besar. Saya alami sendiri. Jadi saya masuk bappeda dulu di bagian sekretariat. Saya pernah pengalaman membuat LAKIP. *Basic* saya teknik arsitektur, *magister urban management* dan *urban planning*, tapi jadi kepala TU waktu itu. *Itu nggak banget* (tidak sesuai dengan spesifikasi kompetensi, *pen*). Cuma *problem*-nya memang pada tingkat struktural itu sering dirotasi. *Problem*-nya lagi adalah SDM yang dipunya dengan formasi yang tersedia itu tidak selalu *match*. Sehingga, memang ada beberapa formasi yang akhirnya tidak *matching* dengan *profile* orang yang mengisi itu (formasi, *pen*). Ini *problem*, dan pelatihan tidak bisa mengatasi masalah itu. Saya orang teknik biasanya lemah di administrasi tapi disuruh membawahi bidang administrasi. Saya pikir birokrasi kita yang di Indonesia ini hanya mengikuti *trend*, jadi hanya sebatas *labeling*, belum masuk ke level

esensi.” (Kasubbid Litbang Sarpras dan Tata Ruang Bappeda Kota Yogyakarta).

“ya masalahnya *kan* karena seringkali kita (satuan kerja perangkat daerah, *pen*) dimasuki oleh “orang-orang titipan”... entah dari mana datangnya (orang titipan)... masalah berikutnya adalah “orang-orang titipan” ini seringkali tidak memiliki komepetensi bahkan hasil kerjanya jelek... yaaa... memang mau tidak mau kita menghadapi realita politik seperti ini... dan orang di pemda sudah maklum dengan keadaan seperti ini... sangat disayangkan...”⁵ (Kasubbag dinas perhubungan Bantul).

Dari pendapat responden Kota Yogyakarta, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul di atas ditemukan adanya indikasi bahwa banyak dari pegawai pemda menginginkan kondisi yang ideal, yakni formasi yang disesuaikan dengan kompetensi pendidikan. Ketidaksesuaian dianggap sebagai kendala dan masalah yang menghambat pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang selanjutnya berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Responden dari Bappeda kota Yogyakarta bahkan menilai bahwa fenomena ketidaksesuaian antara tugas dan jabatan mengindikasikan bahwa pelaksanaan sistem pengukuran kinerja di Indonesia hanya upaya legitimasi dan “*labeling*” yang dalam sudut pandangan isomorfisma institusional disebut dengan isomorfisma mimetik. Situasi ini juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan system pengukuran kinerja di SKPD belum menyentuh level esensi atau isomorfisma yang sifatnya normatif. Namun, karena kondisi yang ada sulit untuk ideal, maka setiap SKPD melakukan penyesuaian diri dengan cara berbeda.

Kondisi ketidaksesuaian tugas dan kompetensi tersebut selanjutnya memicu fenomena isomorfisma koersif sebagaimana yang terjadi di Bappeda pemkot Yogyakarta dan mungkin juga terjadi di banyak SKPD di lingkup pemda DIY dimana pegawai pemda dituntut untuk melaksanakan tugas yang telah

diemban kepadanya, khususnya dalam pelaksanaan system pengukuran kinerja. Selain itu, fenomena tersebut juga memicu isomorfisma normatif sebagaimana yang terjadi di Satpol PP Gunung Kidul sebagai respon menyikapi kondisi tidak idealnya posisi dengan kompetensi pendidikan khususnya terkait pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dengan membuat program pelatihan khusus kesatpol PP-an untuk membantu pelaksanaan tugas pegawai.

Responden dari Disparpora Kulon Progo mengemukakan kesesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan sudah menjadi pertimbangan penting oleh Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo dan kepala SKPD, meskipun dalam realita di lapangan kondisi ideal ini masih sangat sulit diwujudkan. Pada kondisi tugas sesuai dengan kompetensi, hal itu akan sangat membantu implementasi sistem pengukuran kinerja, baik dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun upaya pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja. Kesesuaian tugas dan kompetensi pendidikan ini memicu dorongan pelaksanaan sistem pengukuran kinerja dari fenomena isomorfisnormatif.

Di sisi lain, ketika responden dari BKD DIY dikonfirmasi mengenai pertimbangan apa yang menjadi dasar BKD menempatkan seorang pegawai pada posisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, responden hanya menjawab “tidak tahu”, seagaimana yang dikutip berikut ini:

“Kalau itu saya kurang tahu karena itu kebijakan pimpinan langsung.”(Analisis Kebutuhan Program Diklat Badan Kepegawaian Daerah DIY)

Namun, dari jawaban responden dari BKD DIY tersebut, dapat ditemui adanya opini yang sejalan dengan yang dipaparkan oleh Kasubag dinas perhubungan Bantul, bahwa tidak sesuainya tugas dan kompetensi dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat politis dan sudah menjadi hal yang dimaklumi di lingkungan pemda.

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan perpaduan dari analisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga kele-

bihannya adalah peneliti dapat menemukan informasi yang lebih mendalam mengenai masalah penelitian yang ingin diuji. Variabel *self efficacy* dan *conscientiousness* secara empirik dengan pendekatan kuantitatif berhubungan positif terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja. Hasil ini sejalan dengan pendapat Lee dan Bobko (1994) dan Guadagno *et al.* (2007) sebagaimana yang dipaparkan dalam perumusan hipotesis. Tetapi hubungan yang tercipta dari masing-masing variabel hanya dalam hal pengembangan sistem pengukuran kinerja dan penggunaan informasi kinerja. Pada kasus ini, *self efficacy* dan *conscientiousness* mampu memicu terjadinya isomorfisnormatif.

Dari hasil pengujian hipotesis, kesesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan secara empirik tidak berhubungan terhadap implementasi sistem pengukuran kinerja, baik dalam hal pengembangan sistem pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja maupun penggunaan informasi kinerja. Dari hasil analisis kualitatif, dijelaskan bahwa keadaan ini bisa jadi dikarenakan ketidaksesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan dapat ditutupi oleh adanya pelatihan, kompetensi non-akademik yang dimiliki pegawai (seperti: kemampuan mengontrol emosi, kemampuan memimpin, kemampuan menyesuaikan diri dan mengembangkan kapasitas kompetensi dan intelektual, dsb), dan pengalaman pegawai SKPD.

Pengalaman dianggap mampu menjadi modal untuk menyesuaikan diri di instansi baru jika terjadi *rolling* jabatan. Kondisi ini adalah ciri dari isomorfisma mimetik. Di samping itu, adanya tuntutan (koersif) untuk siap ditempatkan di posisi manapun juga berkemungkinan menjadi alasan lain. Faktanya di lapangan, memang kesesuaian antara formasi (posisi/tugas) dengan kompetensi pegawai pemda sangat sulit dicapai karena adanya kesenjangan yang cukup tinggi antara formasi dengan spesifikasi pegawai yang tersedia. Meski demikian, dari hasil analisis kualitatif pula diperoleh argumen berbeda yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian tugas dan kompetensi adalah masalah besar dan mengganggu

implementasi sistem pengukuran kinerja, khususnya dalam upaya pencapaian kinerja. Pada kondisi tugas sesuai dengan kompetensi, hal itu akan sangat membantu implementasi sistem pengukuran kinerja, baik dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja maupun upaya pencapaian kinerja dan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dorongan yang muncul pada pelaksanaan sistem pengukuran kinerja adalah dari isomorfisma koersif dan mimetik jika terjadi ketidaksesuaian, dan dari isomorfisma normatif jika kesesuaian tugas dan kompetensi pendidikan itu terpenuhi.

Implikasi penting dari hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi sistem pengukuran kinerja, karakter individu pegawai pemda menjadi aspek yang harus diperhatikan sebelum menerima seseorang bekerja di instansi lingkup pemerintah daerah, khususnya terkait *self efficacy* dan *conscientiousness*. Hal itu karena kinerja organisasi yang baik berasal dari pegawai yang memiliki kinerja yang baik pula (Robbins dan Timothy 2010), dan salah satu pemicu pegawai pemda memiliki kinerja yang baik adalah *self efficacy* yang tinggi dan karakter *conscientiousness* yang dimiliki pegawai pemda itu sendiri. Selain itu, dua karakter tersebut juga mampu membawa implementasi sistem pengukuran kinerja ke level isomorfisma normatif. Untuk masa mendatang, implementasi sistem pengukuran kinerja harus segera diintegrasikan dengan perangkat sistem informasi agar dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan SAKIP dan pelaporan LAKIP.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang akan memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan-keterbatasan itu antara lain: pertama, *item-item* yang terdapat dalam kuesioner penelitian banyak yang di-*drop*, sehingga pengukuran-pengukuran yang dipakai untuk menjelaskan konstruk yang dibangun kurang maksimal. Ketiga, data penelitian ini merupakan hasil dari instrumen yang berdasarkan pada persepsi responden, maka hal ini dapat menimbulkan masalah jika per-

sepsi responden berbeda dengan keadaan sesungguhnya. Keempat, pengukuran variabel kesesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan (KTdK) hanya dilakukan dengan pendekatan pembobotan, yakni memberikan bobot '1' jika posisi responden tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan bobot '2' jika posisi responden sesuai dengan latar belakang pendidikan. Pendekatan yang merupakan pengembangan dari peneliti sendiri ini sangat mungkin memiliki kelemahan.

Kelima, penelitian ini hanya dilakukan di lingkup wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga kurang mampu mengeneralisasi praktik-praktik pengukuran kinerja secara luas, khususnya di Indonesia. Keenam, wawancara kepada responden hanya dilakukan di tujuh SKPD berbeda. Padahal, setiap SKPD memiliki karakter dan tugas yang spesifik, sehingga hasil wawancara tidak bisa dijadikan dasar sebagai simpulan apa yang terjadi di seluruh SKPD yang menjadi sampel penelitian. Terakhir, jumlah sampel pada tahap survei jika dibandingkan dengan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk menguji model persamaan struktural sangat jauh dari ideal (97 berbanding 212 sampel). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang ada di lapangan memang terbatas dan ditambah lagi *respon rate* di lapangan yang relatif rendah.

Beberapa masukan yang direkomendasikan untuk pengembangan penelitian berikutnya, yaitu; pertama, peneliti berikutnya dapat mencari faktor-faktor lain yang dapat menangkap fenomena isomorfisma dalam kaitannya dengan implementasi sistem pengukuran kinerja. Kedua, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk dilakukan di pemda selain lingkup DIY atau bahkan memperluas wilayah penelitian hingga ke seluruh pemda di Indonesia, agar dapat memberikan hasil yang memiliki validitas eksternal lebih baik. Ketiga, penelitian selanjutnya yang memasukkan variabel kesesuaian tugas dengan kompetensi pendidikan (KTdK) sebaiknya tidak melakukan pengukuran variabel tersebut hanya dengan pendekatan pembobotan, tetapi sebaiknya berdasarkan pengukuran yang lebih baik yang bisa saja bersumber dari penelitian lain.

Keempat, penelitian selanjutnya sangat diharapkan untuk mencukupi aturan sampel ideal agar hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil yang lebih baik. Terakhir, penggunaan *mixed methods* sangat disarankan bagi penelitian berikutnya, karena dengan menggunakan teknik ini, maka hasil yang diperoleh dapat digali lebih dalam dan dapat melihat dari sudut pandang yang beragam dan kaya dibandingkan apabila hanya menggunakan satu analisis saja. Disamping itu, penggunaan strategi lain, seperti: eksploratoris sekuensial, transformatif sekuensial, triangulasi sekuensial dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan kebaikan metodenya.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, R., P. Robyn., dan P. Brian. 2012. Performance measurement in Indonesia: The Case of local government. *Pacific Accounting Review* 24 (3): 262-291.
- Artley, W., dan S. Stroh. 2001. The performance-based management handbook. *Establishing and maintaining a performance-based management program*, 21-26.
- Bandura. 1997. *Self-efficacy; The exercise of control*. W. H. Freeman and Company.
- Berry, A. J., A. F. Coad., E. P. Harris., D. T. Otley., dan C. Stringer. 2009. Emerging themes in management control: A review of recent literature. *The British Accounting Review* 41 (1): 2-20.
- Braun, V., dan V. Clarke. 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology* 3: 77-101.
- Cavalluzzo, K.S., dan C. D. Ittner. 2004. Implementing performance measurement innovations: Evidence from government. *Accounting, Organizations and Society* 29: 243-267.
- Chin, W. W. 1998. Issues and opinion on structural equation modeling. *MIS Quarterly* 22 (1): 1-14.
- Chin, W. W., B. L. Marcolin., dan P. R. Newsted. 2003. A Partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results form a monte carlo simulation study and voice mail emotion/adoption study. *Information Systems Research* 14 (2): 189-217.
- Collins, R. 1979. *The credential society*. New York: Academic Press.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches*. California: Sage Publication.
- DiMaggio, P. J., dan W. W. Powell. 1983. *The Iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields*. Dalam W. W. Powell dan P. J. DiMaggio (editor). *The New institutionalism in organizational analysis* (p/ 63-82). Chicago: The University of Chicago Press.
- Falk, R. F., dan N. B. Miller. 1992. *A primer for soft modeling*. University of Akron Press.
- Fennell, M. L. 1980. The effects of environmental characteristics on the structure of hospital clusters. *Administrative Science Quarterly* 25 (3): 484-510.
- Guadagno, R. E., B. M. Okdie., dan C. A. Eno. 2007. Who blogs? Personality predictors of blogging. *Computer in Human Behavior* 24 (5): 1993-2004.
- Gudono. 2014. *Teori organisasi edisi 3*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Hartono, J., dan Abdillah. 2009. *Konsep dan aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Hair, J. F., C. W. Black., B. J. Babin., R. E. Anderson., dan R. L. Tatham. 2006. *Multivariate data analysis* (Vol. 6).

- Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Hartono, J. 2010. *Metodologi penelitian bisnis - Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman (Edisi pertama)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Henseler, J., C. M. Ringle., dan R. R. Sinkovics. 2009. The Use of partial least squares International marketing. *Advances in International Marketing* 20: 277–319.
- Ittner, C.D., D. F. Larcker., dan T. Randall. 2002. Performance implications of strategic performance measurement in financial services firms. *Working paper*, University of Pennsylvania and University of Utah.
- Julnes, P. L., dan M. Holzer. 2001. Promoting the utilization of performance measures in public organization: An Empirical study of factors affecting adoption and implementation. *Public Administration Review* 61 (6): 693–708.
- Johnson R. B., dan A. J. Onwuegbuzie. 2004. Mixed methods research: A Research paradigm whose time has come. *Educational Researcher* 33 (7): 14–26.
- Kloot, L. 1999. Performance measurement and accountability in Victorian Local Government. *The International Journal of Public Sector Management* 12 (7): 565-583.
- Korzaan, M. L., dan K. T. Boswell. 2008. The influence of personality Traits and information privacy concerns on behavioral intentions. *Journal of computer information systems* 48 (4): 15.
- Lai, M., dan S. L. Fan. 2008. *Use of fit perception in employee behavioral criteria in Taiwan IT industry*. *Business and Information* 5 (1). Available also at, <http://academic-papers.org/ocs2/session/Papers/A2/234.doc>.
- Larson, M. S. 1977. *The rise of professionalism: A Sociological analysis*. Berkeley: University of California Pres.
- Lee, C., dan P. Bobko. 1994. Self efficacy belief: Comparison of measures. *Journal of Applied Psychology* 60: 187-191.
- March, J. G., dan J. P. Olsen. 1976. *Ambiguity and choice in organizations*. Bergen, Norway: Universitetsforlaget.
- McClelland, D. C. 1973. Testing for competence rather than intelligence. *American Psychologist* 28 (1): 1-14.
- McCrae, R. R., dan P. T. Costa. 1986. Clinical assessment can benefit from recent advances in personality psychology. *American Psychologist* 41 (9): 1001-1003.
- McElroy, J.C., A. R. Hendrickson., dan A. M. Townsend. 2007. Dispositional factors in internet use: Personality versus cognitive style, *MIS Quarterly* 31 (4): 809-820.
- Meister, J. C. 1998. *Corporate universities in building a world class work force*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Meyer, J. W., dan B. Rowan. 1977. Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology* 83 (2): 340–363.
- Nurkhamid, M. 2008. Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. *Jurnal akuntansi pemerintahan* 3 (1): 45-76.
- Pfeffer, J. 1982. *Organizations and organization theory*. Boston: Pitman.
- Robbins, S. P. 1998. *Organizational behavior: Foundation, realities, dan challenges*. 2nd edition. New York: McGraw Hill.
- Robbins, S. P. Dan A. J. Timothy. 2010. *Organizational behavior* (14th Edition). New Jersey: Prentice Hall.

- Scott, R. W. (1998). *Organizations : Rational, natural, and open system* (4th ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
- Sholihin, M. dan D. Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0 untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sihaloho, F. L., dan A. Halim. 2005. Pengaruh faktor-faktor rasional, politik dan kultur organisasi terhadap pemanfaatan informasi kinerja instansi Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*.
- Sofyani, H., dan R. Akbar. 2013. Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Sakip) di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 10 (2): 184-205.
- Supangat, A. 2007. Statistika: Dalam kajian deskriptif, inferensi, dan nonparametrik. *Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The Urban Institute. 2002. *How and why non-profits use outcome information*. The Urban Institute, Washington, D.C.
- Tolbert, P. S., dan L. G. Zucker. 1983. Institutional sources of change in the formal structure of organizations: The Diffusion of civil service reforms. 1880-1 935. *Administrative Science Quarterly* 23: 22-39.
- Vinzi, V. E., W. W. Chin., J. Henseler., dan H. Wang. 2010. *Handbook of partial least squares: Concepts, methods and applications*. Springer Handbooks of Computational Statistics.
- Wijaya, A. H. C., dan R. Akbar. 2013. The influence of information, organizational objective and targets, and external pressure toward the adoption of performance measurement system in public sector. *Journal of Indonesian Economy and Business* 28: 62-83.

¹ Responden ini juga menyampaikan bahwa pimpinan (kepala dinas) di tempatnya bekerja memiliki komitmen yang sangat kuat. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa pimpinannya sangat menghargai waktu, aspirasi masyarakat dan menjunjung tinggi amanah untuk mencapai kinerja organisasi guna memenuhi kepuasan masyarakat.

² Responden menunjukkan mimik setengah menyesali situasi ini. Dalam penjelasan lebih lanjut yang tidak dipaparkan pada paper ini, responden secara implisit sesungguhnya ingin menyatakan bahwa yang mengalami hal tersebut adalah dirinya sendiri. Perlu diketahui responden ini adalah seorang Master alumni perguruan tinggi di Belanda di bidang tata kota dan sub urban. Dari paparannya, responden ini merasa tidak diposisikan dengan ideal dan tidak diberi ruang improvisasi yang memadai. Ia juga menyayangkan bahwa beberapa kebijakan lebih banyak didominasi kepentingan politik ketimbang kebutuhan masyarakat.

³ Argumen ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden asal kabupaten Sleman.

⁴ Perlu diketahui bahwa responden ini adalah pegawai yang kompetensi lulusan dan tugas pekerjaannya tidak sesuai. Namun, ia sudah memiliki pengalaman kerja yang lama yakni 20 tahun. Catatan tambahan ini perlu penulis tambahkan agar pembaca mengetahui situasinya.

⁵ Dari dealektika intonasi responden saat menyampaikan opininya, responden Nampak bersemangat dengan bersikap sangat kritis terhadap situasi ini (ketidak sesuaian tugas dengan kompetensi aparat pemda). Ia juga menyampaikan bahwa ketika diangkat, posisi responden tersebut sesuai dengan komepetensinya dan ia sangat puas dengan kondisi tersebut. Ia menjadi bersemangat dalam bekerja da nada niat yang kuat untuk mencapai kinerja. Namun, ketika rolling jabatan terjadi, dia merasa posisi saat ini (kasubbag dinas perhubungan) tidak sesuai dengan kompetensinya. Sehingga, ia mengakui bahwa dalam pekerjaannya ia hanya menjalankan apa yang sudah ditugaskan semampunya. Ia merasa kehilangan semangat, kecintaan pada pekerjaan, kepuasan dan niat yang kuat untuk mencapai kinerja.